

**PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MANDIRI PERDESAAN)  
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN PERDESAAN  
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Sains (M.Si.)  
Pada  
Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
NUZUL FIRMAN  
NIM. 20082011035**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
AGUSTUS 2009**

**PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MANDIRI PERDESAAN)  
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN PERDESAAN  
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Sains (M.Si.)  
Pada  
Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
NUZUL FIRMAN  
NIM. 20062011035**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
AGUSTUS 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Pengaruh Implementasi Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM  
Mandiri Perdesaan) terhadap Kesejahteraan  
Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima  
Puluh Kota

Nama Mahasiswa : **NUZUL FIRMAN**

NIM : 20082011035

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik

### Menyetujui,



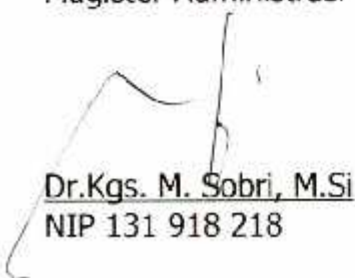
**Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc**  
Pembimbing Pertama



**Drs. Alfitri, M.Si**  
Pembimbing Kedua

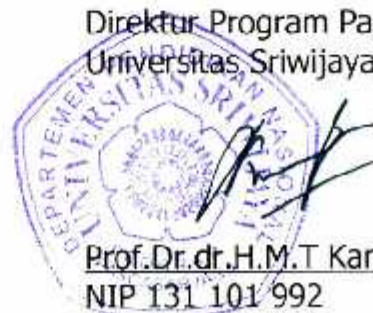
### Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik



**Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si**  
NIP 131 918 218

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Sriwijaya,



**Prof. Dr. dr. H. M. T. Kamaluddin, M.Sc., Sp.FK**  
NIP 131 101 992

Tanggal Lulus : Agustus 2009



## HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama : **NUZUL FIRMAN**

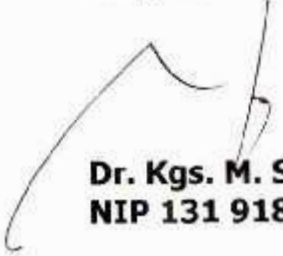
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian : Kebijakan Publik

Tanggal Ujian : 25 Agustus 2009

<b>N O</b>	<b>NAMA DOSEN</b>	<b>TEAM PENGUJI</b>	<b>ASAL INSTANSI</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	Prof.Dr. Bernadette Robiani, M.Sc	Ketua	Staf Pengajar MAP PPs Unsri	1. 
2	Drs. Alfitri, M.Si	Sekretaris	Staf Pengajar MAP PPs Unsri	2. 
3	Prof.Dr. Kusnaka Adimiharja	Anggota	Staf Pengajar PPS UNPAD	3. 
4	Dr.Kgs. M. Sobri, M.Si	Anggota	KPS MAP PPs Unsri	4. 
5	Prof. Dr. Ir. Sriati, MS	Anggota	Staf Pengajar MAP PPs Unsri	5. 
6	Prof.Dr. Waspodo, MA	Anggota	Staf Pengajar MAP PPs Unsri	6. 
7	Dra. Hj. Rogaiyah, M.Si	Anggota	Staf Pengajar MAP PPs Unsri	7. 

**Palembang, Agustus 2009**  
**Menyetujui,**  
**Ketua Program Studi**  
**Magister Administrasi Publik**

  
**Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si**  
**NIP 131 918 218**



# Riwayat Hidup

Nuzul Firman, demikian nama yang diberikan kedua orang tua saat terlahir di atas dunia pada tanggal 21 Agustus 1978 di Padang. Merupakan anak pertama dari pasangan suami istri dr. H. Asykaruddin, Sp.A dengan Hj. Yardek, S.Pd dan memiliki tiga saudara kandung yaitu; dr. Muhammad Fadil, Afifatul Achyar, S.Si dan Fitra Alzakiya Asyari.

Penulis memulai pendidikan di TK Pertiwi Medan, kemudian dilanjutkan ke SD Negeri 2 Payakumbuh dan lulus pada tahun 1991. Setelah lulus SD, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Payakumbuh dan lulus pada tahun 1994. Untuk mendidik kemandirian pada diri sendiri, maka penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke SMU Negeri 3 Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1997. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di kota yang sama, tepatnya di Universitas Padjadjaran Bandung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara dan dapat menyelesaikan studi dengan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada tahun 2002.

Pada tahun 2005 tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2005 penulis menikahi seorang gadis bernama Adelina Eka Putri, SE yang merupakan putri pertama dari pasangan suami istri Desman, BA dan Adlisniwati. Dari pernikahan tersebut, penulis telah dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Shakil Razaq.

Pengalaman kerja yang pernah dilalui penulis sebelum mengikuti pendidikan Pascasarjana Program Magister Administrasi Publik melalui program beasiswa dari Pusbindiklatren – Bappenas adalah sebagai berikut :

1. Karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tahun 2002
2. Staf Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai pada BKD Kabupaten Lima Puluh Kota dari Desember 2003 – Desember 2004
3. Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Januari 2005 – Juli 2008



# ABSTRAK

## **Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Dibimbing oleh : Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc dan Drs. Alfitri, M.Si**

Masalah kemiskinan dan kelaparan di dunia ketiga termasuk Indonesia merupakan permasalahan sosial terbesar yang menghantui dunia dan umat manusia zaman ini. Berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui berbagai pendekatan dan strategi sejak dahulu telah diluncurkan Pemerintah Indonesia, namun masalah kemiskinan tetap menjadi sebuah permasalahan yang pelik di bumi pertiwi.

Gagalnya model-model pembangunan yang menekankan pada sektor ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan telah memunculkan suatu strategi penanggulangan kemiskinan baru melalui program pemberdayaan masyarakat secara komprehensif. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan Pemerintah Indonesia yang mengadopsi konsep pemberdayaan masyarakat secara komprehensif adalah PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam pelaksanaannya, program ini termasuk kebijakan yang diimplementasikan secara *bottom-up* karena masyarakat diberikan kewenangan yang luas oleh perumus kebijakan dalam pengelolaan program. Hal ini menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan pengujian terhadap pengimplementasian program tersebut tentang bagaimana hubungan dan pengaruh implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengacu kepada model implementasi kebijakan yang bersifat *bottom-up* dari Smith. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan sekaligus untuk mengetahui pengaruh implementasi PNPM Mandiri Perdesaan melalui dimensi kebijakan yang diidialiskan, dimensi kelompok sasaran, dimensi implementasi organisasi dan dimensi faktor lingkungan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini dikategorikan sebagai sebuah penelitian terapan karena bertujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan menyebarkan kuesioner. Untuk menjawab pertanyaan yang diungkapkan, maka data yang diperoleh akan dianalisis melalui metode analisis korelasi dan regresi ganda melalui bantuan program SPSS. Sedangkan untuk memaparkan hasil penelitian secara lebih jelas, juga dilakukan analisis secara deskriptif terhadap data yang diperoleh.

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah; bahwa terdapat hubungan yang positif namun sangat rendah antara implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan, serta tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi PNPM Mandiri Perdesaan baik secara keseluruhan ataupun dari masing-masing dimensi implementasi kebijakan Smith terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.



# ABSTRACT

## **The Influence of PNPM Mandiri Perdesaan Implementation Toward Prosperity for Rural Poor Society in Lima Puluh Kota Regency**

**Supervisors by : Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc and Drs. Alfitri, M.Si**

Poverty and famine problem in the third world including Indonesia are the biggest social problem which frighten the world and human kind today. Variety of policy and programs for poverty alleviation by variety of approach and strategy had launched by Indonesian government since long time ago, but poverty problem still become a complicated problem in Indonesia.

The failure of development models which hammer in economic sector into poverty alleviation continuously have emerged a new poverty alleviation strategy through a comprehensive society empowerment program. One of poverty alleviation programs launched by Indonesian government which adopted comprehensive society empowerment program is PNPM Mandiri Perdesaan. This program is implemented with bottom-up policy implementation model because the rural society given extensive authorities by policy makers to manage that program by them self. All of these make me anxious to do this research about PNPM Mandiri Perdesaan implementation. Particularly in how the relationship and influence PNPM Mandiri Perdesaan implementation increase the prosperity of the rural poor society at lima puluh kota regency with refers to bottom-up policy implementation model from Smith. The research purpose to know the relationship and influence between PNPM Mandiri Perdesaan implementation with the prosperity of the rural poor society at lima puluh kota regency.

This research is categorized as applied research because the aim of this research to apply, to examine, and to evaluate capabilities of a theory to solve the practical problems. The research method uses questioners. Then the data will be analyzed with correlation and regression method by SPSS program. The report of this research also analyze the data with descriptive statistics analysis.

The conclusion of this research is the positive existence relationship between PNPM Mandiri Perdesaan implementation with prosperity of the rural poor society, but there isn't significant influence between PNPM Mandiri Perdesaan implementation with prosperity of the rural poor society at lima puluh kota regency.



# Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala pujian dan rasa syukur ini saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena penulisan tesis ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Tesis yang berjudul **Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota** disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc selaku pembimbing I dan Drs. Alfitri, M.Si selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini. Selain itu ucapan terima kasih juga disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bupati Lima Puluh Kota Drs. H. Amri Darwis, SA beserta jajarannya yang telah memberikan ijin dan kesempatan serta bantuan dana untuk mengikuti program beasiswa Pusbindiklatren – Bappenas pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
2. Pimpinan Pusbindiklatren – Bappenas beserta jajarannya yang telah memberikan beasiswa selama mengikuti program ini.
3. Rektor, Pembantu Rektor, para Guru Besar Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
4. Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
5. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
7. Camat Luak, Camat Situjuh Limo Nagari dan Camat Guguk beserta jajarannya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah kerjanya.
8. Para Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan, baik di tingkat kabupaten dan kecamatan yang memberikan berbagai bentuk bantuan selama proses penelitian ini berlangsung.
9. Warga masyarakat di kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari dan Guguk yang telah meluangkan waktu dan memberikan respon positif terhadap penelitian ini.

10. Ade, istri tercinta yang penuh pengertian dan kesabaran senantiasa memberikan motivasi untuk menyelesaikan tulisan ini, serta "kebanggaanku" Muhammad Shakil Razaq yang menjadikan penulis memiliki tekad yang keras untuk menyelesaikan studi ini sampai tuntas.
11. Mama, kedua mertua dan adik-adik tercinta yang senantiasa mengiringi langkah-langkah penulis dengan doa yang tulus.
12. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Magister Administrasi Publik Bappenas angkatan IV (empat), khususnya teman-teman dari mess Dahlia yang telah merasakan bahagiannya berjuang dengan kebersamaan.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa teisis ini masih belum sempurna, baik data, teknik penulisan maupun ketajaman dalam penganalisaannya. Namun dari hati terdalam, penulis berniat dengan kesungguhan penuh untuk menyusun tesis ini demi kemajuan dunia pendidikan dan mudah-mudahan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

# DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
Riwayat Hidup.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Singkatan.....	xvi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	19
1. Kebijakan Publik.....	19
2. Implementasi Kebijakan.....	22
3. Implementasi Program.....	33
4. PNPM Mandiri Perdesaan.....	35
5. Kesejahteraan.....	43
6. Kemiskinan.....	46
7. Kemiskinan Perdesaan.....	50
B. Penelitian Terdahulu.....	52
C. Kerangka Pemikiran.....	55
D. Hipotesis.....	57
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	58
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	61



C.	Populasi dan Sampel.....	63
	1. Populasi.....	63
	2. Sampel.....	63
D.	Definisi Konsep dan Operasional.....	68
	1. Definisi Konsep.....	68
	2. Definisi Operasional.....	76
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	79
	1. Teknik Pengumpulan Data Primer.....	79
	2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.....	79
F.	Teknik Analisis Data.....	80
	1. Analisis Statistik Deskriptif.....	80
	2. Uji Persyaratan.....	81
	a. Uji Validitas Instrumen.....	81
	b. Uji Reliabilitas Instrumen.....	82
	c. Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval....	84
	d. Uji Normalitas Data.....	85
	3. Analisis Korelasi dan Regresi Ganda.....	86

#### **BAB IV      DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A.	Sejarah Kabupaten Lima Puluh Kota.....	90
B.	Letak Geografis.....	94
C.	Kondisi Demografis.....	98
D.	Mata Pencaharian Penduduk.....	100
E.	Kondisi Kemiskinan.....	104
F.	Organisasi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	106

#### **BAB V      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Analisis Statistik Deskriptif.....	110
	1. Deskripsi Responden.....	110
	2. Analisis Deskriptif Variabel Bebas Implementasi.....	115
	PNPM Mandiri Perdesaan	
	3. Analisis Deskriptif Variabel Terikat Kesejahteraan.....	131
	Masyarakat Miskin Perdesaan	
	4. Analisis Deskriptif Terhadap Komposisi Responden.....	143
	per Kecamatan Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan	

B.	Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian.....	148
	1. Pengujian Validitas Instrumen Penelitian.....	148
	2. Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	150
C.	Data Hasil Penelitian.....	152
	1. Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval.....	152
	2. Pengujian Normalitas Data Penelitian.....	155
D.	Analisis dan Pembahasan.....	156
	1. Analisis Korelasi Ganda.....	156
	2. Analisis Regresi Ganda.....	157
	3. Uji Hipotesis Secara Bersama-sama.....	159
	4. Uji Hipotesis Secara Individu.....	161
	5. Koefisien Determinasi.....	164
	6. Pembahasan.....	166

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan.....	173
B.	Saran.....	175

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>TEKS</b>	<b>HAL</b>
1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Kategori Daerah Periode 1996 – 2005	4
1.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Garis Kemiskinan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Daerah Kondisi Februari 2005 – Maret 2006	6
1.3	Perbandingan Jumlah Penduduk / KK dengan Penduduk Miskin / KK Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota per Kecamatan Tahun 2007	14
1.4	Jumlah Keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Tingkat Kesejahteraan per Kecamatan pada Tahun 2007	15
3.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian	76
3.2	Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	89
4.1	Luas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota per Kecamatan	95
4.2	Luas Lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Penggunaan	97
4.3	perkembangan angka-angka demografi dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut jenis kelamin	100
4.4	Perkembangan Jumlah Keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Tingkat Kesejahteraan dari Tahun 2003 - 2007	106
4.5	Jumlah PNS Pemda Kab. Lima Puluh Kota Menurut Tingkat Pendidikan	107
5.1	Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Bebas melalui Dimensi Kebijakan yang Diidealiskan	116
5.2	Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Bebas melalui Dimensi Kelompok Sasaran	119
5.3	Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Bebas melalui Dimensi Implementasi Organisasi	122



5.4	Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Bebas melalui Dimensi Faktor-faktor Lingkungan	127
5.5	Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Terikat Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan	131
5.6	Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Terikat Mengacu Pada Indikator Keluarga Sejahtera I	134
5.7	Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Terikat Mengacu Pada Indikator Keluarga Sejahtera II	137
5.8	Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Terikat Mengacu Pada Indikator Keluarga Sejahtera III	139
5.9	Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Terikat Mengacu Pada Indikator Keluarga Sejahtera III Plus	141
5.10	Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	151
5.11	Proses Transformasi Data Ordinal menjadi Data Interval dengan Metode MSI	154
5.12	Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov	155
5.13	Model Summary	156
5.14	Koefisien Regresi	157
5.15	Koefisien Regresi Uji F	160
5.16	Koefisien Regresi Uji t	162
5.17	Koefisien Korelasi Berganda	164
5.18	Koefisien Regresi per Dimensi	165

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR</b>	<b>TEKS</b>	<b>HAL</b>
2.1	Model Implementasi Kebijakan dari Smith	33
2.2	Kerangka pemikiran	56
3.1	Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota	61
4.1	Lambang dan Arti Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota	94
4.2	Peta Geologi Kabupaten Lima Puluh Kota	96
4.3	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota	99
5.1	Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	110
5.2	Komposisi Responden Berdasarkan Kelompok Umur	111
5.3	Komposisi Responden Berdasarkan Status Perkawinan	112
5.4	Komposisi Responden Berdasarkan Jumlah Anak	113
5.5	Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	114
5.6	Komposisi Responden Berdasarkan Kategori Penerima BLT	115
5.7	Persentase Skor Jawaban Responden Pada Dimensi Kebijakan yang Diidealiskan	118
5.8	Persentase Skor Jawaban Responden Pada Dimensi Kelompok Sasaran	121
5.9	Persentase Jawaban Responden Pada Dimensi Implementasi Organisasi	123
5.10	Persentase Jawaban Responden Pada Dimensi Faktor-faktor Lingkungan	130
5.11	Persentase Penilaian Responden Terhadap Variabel Terikat Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan	133
5.12	Persentase Penilaian Responden Terhadap Variabel Terikat Mengacu Pada Indikator Keluarga Sejahtera I	136

5.13	Persentase Penilaian Responden Terhadap Variabel Terikat Mengacu Pada Indikator Keluarga Sejahtera II	138
5.14	Persentase Penilaian Responden Terhadap Variabel Terikat Mengacu Pada Indikator Keluarga Sejahtera III	141
5.15	Persentase Penilaian Responden Terhadap Variabel Terikat Mengacu Pada Indikator Keluarga Sejahtera III Plus	143
5.16	Komposisi Responden di Kecamatan Luak Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Keluarga	145
5.17	Komposisi Responden di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Keluarga	147
5.18	Komposisi Responden di Kecamatan Guguak Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Keluarga	148



## DAFTAR SINGKATAN

NGO	: Organisasi-organisasi internasional bukan pemerintah
SNPK	: Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan
ADB	: Bank Pembangunan Asia
Bangdes	: Program Pembangunan Desa
IDT	: Program Inpres Desa Tertinggal
PNPM Mandiri	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PNPM Mandiri Perdesaan	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
MDGs	: Millenium Development Goals
PPK	: Program Pengembangan Kecamatan
RTM	: Rumah Tangga Miskin
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPD/N	: Badan Permusyawarahan Desa / Nagari
TPK	: Tim Pengelola Kegiatan
TPU	: Tim Penulis Usulan
KPMD/J	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Jorong
Pokmas	: Kelompok masyarakat
PJOK	: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
TV	: Tim Verifikasi
UPK	: Unit Pengelola Kegiatan
BP-UPK	: Badan Pengawas UPK
F-Kec	: Fasilitator Kecamatan
FT-Kec	: Fasilitator Teknik Kecamatan
PL	: Pendamping Lokal
BKAD/N	: Badan Kerjasama Antar Desa / Nagari
TK PNPM-Kab	: Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten
PJOKab	: Penanggung Jawab Operasional Kabupaten
F-Kab	: Fasilitator Kabupaten
FT-Kab	: Fasilitator Teknik Kabupaten
Kades	: Kepala Desa
Kelompok SPP	: Kelompok Simpan Pinjam Perempuan
ACTORS	: Authority, Confidence, Trust, Opportunity, Responsibilities, support
PDRB	: Pendapatan Distrik Regional Bruto
KK	: Kepala Keluarga
PTO	: Petunjuk Operasional Kebijakan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perda	: Peraturan daerah
KEP	: Kurang Energi Protein
Kantor KBKS	: Kantor Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera
Bagian Kesra	: Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bagian Tapem	: Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Capil	: Bagian Catatan Sipil
KPUD	: Komisi Umum Pemilihan Daerah
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKD	: Badan Kepegawaian Daerah
BPKD	: Badan Pengelola Keuangan Daerah
Bawasda	: Badan Pengawasan Daerah
Dinas PU	: Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Koperindag	: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Kantor Kesbang Linmas	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kantor Satpcol PP	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPN	: Badan Pertanahan Nasional

SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SD	:	Sekolah Dasar
BLT	:	Program Bantuan Langsung Tunai
HOK	:	Harian Orang Kerja
MSI	:	Method of Successive Interval
Frek	:	Frekuensi
Prop	:	Proporsi
SPSS	:	Statistical Product and Service Solutions





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara umum kemiskinan dapat digambarkan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun jika dilihat dari teori-teori klasik tentang kemiskinan, setidaknya ada tiga perspektif dalam melihat kemiskinan (Huri,2008:29).

*Pertama*, kemiskinan sebagai fenomena transendental, di mana seorang menjadi miskin karena takdir Tuhan menghendaki demikian. Salah satu contohnya adalah anak yang terlahir dari keluarga miskin.

*Kedua*, kemiskinan sebagai fenomena sosial, yang mana seseorang menjadi miskin sebagai akibat dari mentalitas orang yang bersangkutan. Contohnya orang menjadi miskin karena malas, bodoh, dan tidak mau bekerja keras.

*Ketiga*, kemiskinan struktural. Perspektif ini melihat kemiskinan sebagai akibat dari struktur masyarakat yang tidak memberi peluang kepada orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Perspektif ini memaknai kemiskinan sebagai kondisi yang tercipta akibat ketimpangan kepemilikan modal dan alat produksi. Hal ini menggambarkan bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu kondisi dari pola hidup yang tercipta karena adanya peran struktur masyarakat yang menindas dan tertindas. Artinya, seseorang menjadi miskin bukan karena malas, bodoh, dan atau tidak punya etos kerja yang tinggi, tetapi lebih karena terdapatnya ketimpangan dalam struktur sosial dimana tidak setiap orang memiliki

kesempatan untuk memiliki modal dan alat produksi yang telah tersedia secara luas.

Masalah kemiskinan dan kelaparan di dunia ketiga adalah permasalahan sosial terbesar yang menghantui dunia dan umat manusia zaman ini. Daman Huri melihat bahwa pangkal dari masalah ini adalah hasrat melakukan penguasaan dan penghisapan sumber-sumber ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing lintas Negara (*Multi Nasional Corporations*) (2008:22). Perusahaan-perusahaan global tersebut memanfaatkan dukungan elit politik di negara-negara kaya dan lembaga kreditor internasional untuk menumpuk kekayaan dan menghisap sumber-sumber penghidupan rakyat di negara-negara dunia ketiga. Kini kekuatan mereka telah menaklukan kekuatan ekonomi negara-negara dunia ketiga yang sesungguhnya diperuntukkan bagi kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya. Kondisi ini telah melahirkan situasi kemiskinan di negara dunia ketiga termasuk Indonesia, dan sebaliknya justru telah memberikan kesejahteraan bagi negara-negara maju. Strahm memperkirakan hanya 10 sampai dengan 30 persen penduduk di negara-negara berkembang dapat menikmati hasil pembangunan yang telah berlangsung hampir setengah abad di bawah bendera "bantuan pembangunan negara maju untuk dunia ketiga" (Huri,2008:23). Realitanya mayoritas penduduk negara dunia ketiga bahkan di Indonesia, hidup tak lebih dari sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum saja. Lebih parahnyanya lagi, lapisan bawah yang jumlahnya mencapai ratusan juta justru mengalami kelaparan yang akut.



Kekurangan gizi dan kelaparan di Indonesia merupakan bagian masalah dari ketidaktepatan penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan yang kompleks, karena dampaknya tak hanya terjadi pada bidang sosial ekonomi semata namun juga berdampak pada bidang politik dan pertahanan keamanan sebuah negara. Dahulu pasca kemerdekaan, kelaparan di Indonesia memang disebabkan karena masyarakat tidak mempunyai uang untuk membeli bahan pangan, namun saat ini kelaparan yang timbul justru lebih disebabkan karena masyarakat tidak mempunyai daya beli terhadap bahan pangan dengan harga yang tinggi. Dalam konteks ini, kelaparan merupakan dampak dari tidak adanya pemerataan pembangunan.

Dalam sejarah perjalanan bangsa ini, Indonesia dipandang pernah menorehkan lembaran sukses dalam memerangi kemiskinan. Pada era 1970-an jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 54,2 juta jiwa, kemudian pada tahun 1990 mengalami penurunan drastis hingga 27,2 juta jiwa. Namun berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor : 47 / IX per tanggal 1 September 2006, mengungkapkan bahwa pada pertengahan 1990-an telah terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin secara tajam mencapai 34,01 juta jiwa (17,47 %) dan terus mengalami kenaikan hingga diakhir tahun 1999 mencapai angka 47,97 juta jiwa (23,43 %) sebagai akibat terpaan badai krisis ekonomi yang menghancurkan sendi-sendi pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Pada periode 1999 - 2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta jiwa (5,23 %), yaitu dari 47,97 juta jiwa pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta jiwa pada tahun 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 18,20 % pada tahun 2002. Penurunan



jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002 - 2005 sebesar 3,3 juta jiwa (2,23 %), yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin turun dari 18,20 % pada tahun 2002 menjadi 15,97 % pada tahun 2005. Namun data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2006 tercatat terjadi kembali peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 39,05 juta jiwa (17,75 %). Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Februari 2005 sebanyak 35,10 juta jiwa (15,97 %), yang berarti jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu tersebut meningkat sebesar 3,95 juta jiwa (1,78 %). Untuk lebih jelasnya mengenai pergeseran jumlah penduduk miskin dalam periode 1996 – 2005 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Kategori Daerah  
Periode 1996 – 2005

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97

Sumber : Data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2006

Lebih lanjut, Berita Resmi Statistik No. 47 / IX per tanggal 1 September 2006 juga mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk miskin di Indonesia berkisar 63,41 % ternyata berdomisili di daerah-daerah perdesaan, sedangkan sisanya 36,59 % bermukim di perkotaan.

Namun pendekatan yang digunakan pemerintah dan organisasi-organisasi internasional (NGO) dalam memandang kemiskinan acapkali mengalami perbedaan. Disatu sisi pemerintah ingin menampilkan sosok yang sukses dalam menanggulangi kemiskinan, misalnya dengan memunculkan hasil survei tentang penurunan jumlah orang miskin kepada publik. Disisi lain, organisasi-organisasi internasional justru merilis bahwa jumlah orang miskin di Indonesia selalu mengalami penambahan dari tahun ke tahunnya. Perbedaan persepsi dalam menanggapi kemiskinan ini jelas mengakibatkan kebingungan dikalangan masyarakat, terutama terhadap lembaga mana yang bisa dipercaya untuk dijadikan acuan / referensi terhadap kondisi masyarakat miskin di Indonesia yang sesungguhnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan pendefinisian ulang terhadap makna kemiskinan di Indonesia. Sejak diratifikasinya perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka melalui UU No. 11 / 2005 pemerintah Indonesia pun menggunakan definisi kemiskinan yang berbasis hak. Hal ini terlihat dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang menyebutkan bahwa kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga termasuk kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau



sekelompok orang, laki-laki atau perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Penyamaan persepsi dan pendefinisian terhadap kemiskinan merupakan hal yang penting karena perbedaan pandangan mengenai pendefinisian kemiskinan tentu akan berdampak pada perbedaan cara yang diterapkan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

Salah satu contoh perbedaan persepsi terhadap kemiskinan antara pemerintah dan organisasi-organisasi Internasional adalah dalam menetapkan garis batas kemiskinan. Lembaga donor internasional seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (ADB) menggunakan tingkat pendapatan \$ 1 per hari sebagai batas kemiskinan (*poverty line*). Sementara itu, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah mengukur kemiskinan melalui tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang dinyatakan dalam ukuran kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan kalori sebagaimana yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Garis Kemiskinan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Daerah Kondisi Februari 2005 – Maret 2006

Daerah / Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Blr)			Jumlah Penduduk Miskin (juta)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
<b>Perkotaan</b>					
Februari 2005	103.992	46.807	150.799	12,40	11,37
Maret 2006	126.527	48.797	175.324	14,29	13,36
<b>Perdesaan</b>					
Februari 2005	84.014	33.245	117.259	22,70	19,51
Maret 2006	103.180	28.076	131.256	24,76	21,90
<b>Kota + Desa</b>					
Februari 2005	91.072	38.036	129.108	35,10	15,97
Maret 2006	114.619	38.778	152.847	39,05	17,75

Sumber : Data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2006



Berdasarkan data yang diungkapkan dalam buku Pedoman Umum PNPM Mandiri yang dikeluarkan melalui Keputusan Menkokesra Nomor : 25/Kcp/Menko/Kesra/VII/2007, mengungkapkan bahwa persebaran penduduk miskin di Indonesia masih berpusat di pulau Jawa khususnya di dua propinsi yaitu propinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.434.459 jiwa dan propinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskinnya sebanyak 3.680.679 jiwa. Selanjutnya kemiskinan terbesar di Indonesia berada di pulau Sumatera, yaitu berada di propinsi Lampung dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 865.132 jiwa. Urutan selanjutnya tingkat kemiskinan terbesar di pulau Sumatera berada di propinsi Sumatera Utara (666.658 jiwa), diikuti propinsi Sumatera Selatan (649.606 jiwa), propinsi Nanggro Aceh Darussalam (510.633 jiwa), propinsi Riau (269.917 jiwa), propinsi Sumatera Barat (259.269 jiwa), propinsi Jambi (190.363 jiwa) dan propinsi Bengkulu (148.655 jiwa). Walaupun jumlah penduduk miskin di propinsi Sumatera Barat lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di propinsi Sumatera Selatan, Nanggro Aceh Darussalam dan Riau, namun Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah kemiskinan didaerahnya secara mandiri karena propinsi Sumatera Barat tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagaimana yang dimiliki ketiga propinsi tersebut sebagai sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, berbagai pemerintah kabupaten / kota di Sumatera Barat sangat membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat melalui program-programnya dalam menanggulangi kemiskinan di bumi Sumatera Barat.

Untuk menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan di propinsi Sumatera Barat khususnya dan propinsi-propinsi lain di Indonesia umumnya, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui berbagai pendekatan dan strategi. Pada zaman pemerintahan orde baru, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui program Pembangunan Desa (Bangdes) yang dituangkan melalui Instruksi Presiden nomor 16 tahun 1969 sampai dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 1984 dan Program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dituangkan melalui Instruksi Presiden nomor 5 tahun 1993. program-program ini diwujudkan melalui pemberian pinjaman dana bergulir, bantuan dana pendamping, serta pembangunan sarana dan prasarana. Program-program penanggulangan kemiskinan ini diimplementasikan secara *top down* dan dinilai melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi secara makro. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada zaman ini dinilai sangat baik dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai angka delapan persen per tahun, namun berdasarkan data Susenas BPS sebagaimana yang telah diungkapkan melalui tabel 1.1 kenyataan justru menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi mencapai 34,01 juta jiwa (17,47 %). Dan pada tahun 1998 dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia telah ikut memperburuk fenomena kemiskinan di Indonesia yang ditunjukkan melalui peningkatan jumlah penduduk miskin secara tajam mencapai angka 49,50 juta jiwa (24,23 %). Penyebabnya adalah karena runtuhnya sendi-sendi perekonomian swasta di Indonesia yang dilanda badai krisis ekonomi sehingga mengakibatkan banyak rakyat Indonesia yang mengalami kehilangan pekerjaan sebagai akibat kebangkrutan usaha-usaha



sektor swasta (skala besar, menengah, dan kecil) sehingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masal terhadap para pekerjanya.

Melalui buku yang berjudul *Demokrasi dan Kemiskinan*, Damanhuri mengungkapkan beberapa kelemahan dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan pada masa orde baru sebagai berikut :

1. berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan;
2. kebijakan yang diluncurkan bersifat sentralistik;
3. lebih bersifat karikatif daripada transformatif;
4. memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek, bukan sebagai subyek;
5. orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan;
6. cara pandang dan solusi yang bersifat menggeneralkan permasalahan kemiskinan tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada (2008:36).

Melalui pembelajaran terhadap pengalaman-pengalaman sebelumnya, telah muncul suatu strategi penanggulangan kemiskinan baru melalui program pemberdayaan masyarakat secara komprehensif. John Friedman mengungkapkan bahwa program pemberdayaan muncul ke permukaan karena dua premis, yaitu kegagalan dan harapan (Miftahusyailan,2008:84). Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan yang menekankan pada sektor ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan harapan yang dimaksudkan adalah munculnya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan persamaan antar generasi.



Lebih lanjut Friedman mengungkapkan bahwa untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya, perlu sekiranya dilakukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat (*empowerment society*) yang lebih komprehensif serta berorientasi jauh ke depan dan berkelanjutan (*sustainable*) (Miftahusyalian,2008:85). Pemberdayaan yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat pemerintah dan stakeholder lainnya bisa bersinergi dalam merencanakan program, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial (*social value*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah ada. Sedangkan Bryant dan White mendefinisikan pemberdayaan sebagai penumbuhan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada "si miskin" (Miftahusyalian,2008:85). Menurut mereka, salah satu cara menciptakan mekanisme dari dalam untuk meluruskan kembali keputusan-keputusan pengalokasian yang lebih berkeadilan adalah dengan menjadikan rakyat memiliki pengaruh dalam penentuan keputusan itu sendiri. Melalui model partisipasi, masyarakat akan terlibat secara langsung dan ikut serta dalam menentukan nasibnya sendiri.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menkokesra selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Nomor 28/KEP/MENKO/KESRA/XI/2006 tentang Tim Pengendali Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang secara resmi diluncurkan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai sebuah program nasional dalam menanggulangi kemiskinan. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama dalam menumbuhkembangkan masyarakat miskin sehingga mereka ditempatkan bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5 – 6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan millenium atau Millenium Development Goals (MDGs).

Persoalan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja khususnya di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi kesadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang terdiri dari lima program turunan yaitu; PNPM Mandiri



Perdesaan, PNPM-P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PNPM-P2DTK (Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus), PNPM-PUAP (Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan), dan PNPM-PISEW (Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Untuk mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan adalah dengan menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem



pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

Friedman berpendapat bahwa pemberdayaan individu merupakan pemberdayaan keluarga dan setiap anggota keluarga (Miftahusyain,2008:86). Asumsinya, apabila setiap anggota keluarga dibangkitkan keberdayaannya, maka unit-unit keluarga berdaya ini akan membangun suatu jaringan keberdayaan yang lebih luas. Jaringan yang luas ini akan membentuk apa yang dinamakan keberdayaan sosial. Asumsi yang diungkapkan Friedman tersebut sangat sejalan dengan strategi yang diterapkan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menempatkan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran program. Asumsinya, proses pemberdayaan terhadap rumah tangga miskin yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan di 12.045 desa yang tersebar di 2.780 kecamatan pada 365 kabupaten di 32 propinsi diharapkan pula dapat membangun suatu jaringan keberdayaan masyarakat diseluruh nusantara sehingga visi PNPM Mandiri Perdesaan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat perdesaan dapat tercapai.

Dari sembilan belas kabupaten / kota di Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang memperoleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) karena selain kabupaten ini mayoritas berkarakteristik daerah perdesaan, kabupaten ini juga mengalami masalah kemiskinan yang cukup pelik. Mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota sangat minim dengan sumber daya alamnya, kecuali hanya dengan mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakatnya, menjadikan masalah kemiskinan dan

kemelaratan masih menjadi sebuah masalah yang sulit ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam penanggulangannya. Dari 327.655 jiwa penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2007, tercatat sebanyak 79.964 jiwa atau 24,40 % masih tergolong dalam kategori masyarakat miskin, atau dalam kata lain dari 88.969 keluarga yang hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 6.628 keluarga atau 7,44 % masih tergolong pada keluarga pra sejahtera / rumah tangga miskin. Angka persentase ini jauh diatas angka persentase jumlah penduduk miskin Indonesia secara keseluruhan (17,75%) pada tahun yang sama. Untuk melihat lebih rinci perbandingan persebaran jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin per kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2007, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3

Perbandingan Jumlah Penduduk / KK dengan Penduduk Miskin / KK Miskin  
di Kabupaten Lima Puluh Kota per Kecamatan Tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perdesaan		Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan		Persentase Penduduk Miskin	Persentase KK Miskin
		Jiwa	KK	Jiwa	KK		
1.	Gunuang Omeh	12.380	3.599	3.324	140	26,85	3,88
2.	Bukit Barisan	21.654	6.394	7.083	612	32,71	9,57
3.	Suliki	32.978	8.583	6.696	429	20,30	4,99
4.	Guguak	13.927	4.004	3.606	681	25,89	17,00
5.	Mungka	22.779	6.150	6.670	359	29,28	5,83
6.	Akahiluru	25.150	6.660	7.548	536	30,01	8,04
7.	Payakumbuh	29.210	7.854	6.198	318	21,22	4,04
8.	Luak	23.184	6.775	5.256	714	22,67	10,53
9.	Lareh Sago Halaban	32.408	9.238	8.041	740	24,81	8,01
10.	Situjuah Limo Nagari	19.161	5.492	4.808	580	25,09	10,56
11.	Harau	41.510	10.688	8.580	612	20,67	5,72
12.	Pangkalan Koto Baru	27.330	6.669	7.140	371	26,13	5,56
13.	Kapur IX	25.984	6.903	5.014	536	19,30	7,76
<b>Jumlah</b>		<b>327.655</b>	<b>88.969</b>	<b>79.964</b>	<b>6.628</b>	<b>24,40</b>	<b>7,44</b>

Sumber : Kantor KBKS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2007



Sedangkan untuk melihat klasifikasi jumlah keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut tingkat kesejahteraannya per kecamatan pada tahun 2007, maka dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jumlah Keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Tingkat Kesejahteraan per Kecamatan pada Tahun 2007

No	Kecamatan	Tingkat Kesejahteraan					Jumlah
		Pra sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III plus	
1.	Payakumbuh	318	1.970	2.482	3.070	14	7.854
2.	Akabiluru	536	1.888	2.444	1.792	0	6.660
3.	Luak	714	1.374	1.249	3.378	60	6.775
4.	Lareh Sago Halabau	740	2.695	2.593	3.113	97	9.238
5.	Situjuh Limo Nagari	580	1.279	1.353	2.220	60	5.492
6.	Harau	612	2.481	3.888	3.580	127	10.688
7.	Guguak	681	916	911	1.375	121	4.004
8.	Mungka	359	1.529	1.986	2.147	129	6.150
9.	Suliki	429	1.726	1.836	4.360	232	8.583
10.	Bukik Barisan	612	1.996	999	2.698	89	5.394
11.	Gunuang Omeh	140	1.169	1.344	896	10	3.559
12.	Kapur IX	536	1.413	2.071	2.834	49	6.903
13.	Pangkalan Koto Baru	371	1.426	3.889	969	14	6.669
<b>Jumlah</b>		<b>6.628</b>	<b>21.862</b>	<b>27.045</b>	<b>32.432</b>	<b>1.002</b>	<b>88.969</b>
<b>Persentase</b>		<b>7,44</b>	<b>24,57</b>	<b>30,39</b>	<b>36,45</b>	<b>1,12</b>	<b>100</b>

Sumber : Kantor KBKS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2007

Dalam rangka memahami bagaimana pengimplementasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui proses pemberdayaan rumah tangga miskin (RTM) perdesaan sebagai kelompok sasaran dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang



diberikan PNPM Mandiri Perdesaan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan sebagai salah satu visi yang ingin dicapai dari program ini, maka melalui penelitian dan penyusunan laporan dalam bentuk tesis terhadap hal tersebut dengan judul **"Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota"**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah yang akan dianalisis melalui penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bagaimana pengaruh implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Rumusan tujuan dan manfaat dari suatu penelitian harus mengacu pada rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang berarti bagi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta para fasilitator pelaksana program PNPM Mandiri Perdesaan (tingkat kabupaten, kecamatan dan desa) sebagai sebuah evaluasi bagaimana pengaruh implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi saran dan masukan dari hasil penjujian konsep model implementasi kebijakan *bottom-up* dari Smith terhadap pengimplementasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota dan mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan indikator ukuran keluarga sejahtera menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebelum dan setelah pengimplementasian program. Selanjutnya, mudah-mudahan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan / referensi terhadap penelitian-penelitian pada bidang / konteks yang sama.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kebijakan publik

Sesungguhnya tidak ada definisi kebijakan publik yang bisa diterima secara umum dalam literatur akademis. Namun demikian, seorang analis dapat juga membaca suatu kebijakan dalam berbagai tindakan pemerintah yang bisa jadi tidak saling berhubungan. Untuk mengatasi masalah konseptual kebijakan, Leslie A. Pal mengategorikan kebijakan menjadi dua macam.

Kategori pertama, definisi kebijakan publik lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama sebagai kunci pengkriteriaannya, sebagaimana yang diungkapkan beberapa definisi kebijakan publik (*public policy*) sebagai berikut :

1. *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern ... Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials (James E. Anderson).*
2. *A set of interrelated decisions taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors to achieve (W.I Jenkins).*
3. *Public policy is whatever government choose to do or not to do (Thomas R. Dye).*
4. *Action or non action in response to demands (Stuart H. Rakoff and Guenther F. Schaefer).*
5. *A projected program of goal values and practices (Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan).*
6. *Policy is, in its most general sense, the pattern of action that resolves conflicting claims or provides incentives for cooperation (Fred M. Frobook).*

Kategori kedua, definisi kebijakan publik lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah, yang mengidentifikasi kebijakan publik (*public policy*) sebagai :



1. *What governments actually do and why (Richard Simeon).*
2. *Action taken by government (Ira Sharkansky).*
3. *A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decision or action, and such a course has to be perceived and identified by the analyst in question (Widodo,2008:10)*

Dari berbagai pengertian kebijakan publik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tataran umum definisi kebijakan publik memang tidak diharuskan sama atau sinonim dengan semua hal yang dilakukan pemerintah.

Antara pendefinisian keputusan (*decision*) dengan pendefinisian kebijakan (*policy*) pun mengalami perbedaan. Dari hari ke hari pemerintah senantiasa membuat keputusan, beberapa diantaranya disampaikan sementara yang lainnya hanya sebagai reaksi terhadap lingkungannya. Padahal, banyak aktivitas dan praktik pemerintah dalam melaksanakan keputusan sebagai wujud kebijakan dipandang bukanlah sebagai suatu bentuk kebijakan melainkan hanya sebagai suatu respons pemerintah terhadap kondisi tertentu.

Kebijakan publik Menurut Edward III dan Sharkansky adalah "*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government program.*" Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah (Islamy,1984:18). Menurut Kartasasmita (1997:142), pengertian kebijakan publik diatas merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan :

1. Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah.
2. Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya.
3. Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.



Selanjutnya Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai *a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*. Kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy,1994:19). Senada dengan hal tersebut Lester dan Steward (2000:18) juga mengungkapkan definisi kebijakan publik sebagai *a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined*. Kebijakan publik dianggap sebagai suatu proses atau rangkaian atau bentuk dari kegiatan pemerintah atau keputusan pemerintah yang dibuat untuk memecahkan masalah publik baik masalah yang nyata maupun masalah yang mungkin akan timbul.

Atas dasar pengertian tersebut, maka dapat diuraikan beberapa elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagai berikut :

1. kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu;
2. kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
3. kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan;
4. kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu);
5. kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

dari pengertian dan elemen yang diuraikan diatas, maka kebijakan publik dibuat dalam kerangka "untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan." Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi, dan intensitasnya. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dibuat dan dipilih serta diimplementasikan oleh pemerintah atau badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum dan politik untuk melakukannya. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah sebagai suatu reaksi terhadap kebutuhan atau masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu kebijakan publik harus berisi langkah-langkah yang telah dirumuskan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat. Selain itu kebijakan publik juga harus mempunyai tujuan tertentu serta demi kepentingan masyarakat luas.

## **2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik dan bersifat sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan dan begitu pula sebaliknya. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Nugroho (2006:119) bahwa implementasi kebijakan adalah

hal yang paling berat. Karena karapkali masalah-masalah yang tidak pernah kita duga sebelumnya tidak pernah muncul ketika dilakukan formulasi suatu kebijakan. Masalah justru sering timbul ketika suatu kebijakan berada pada tahap proses implementasi. Selain itu konsistensi implementasi suatu kebijakan juga sering menjadi masalah di lapangan. Dalam Kamus Webster implementasi diartikan sebagai :

- a. *"to provide the means for carrying out"*, Dapat diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu.
- b. *"to give practical effect to"*, dapat diartikan sebagai menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu (Wahab,1991:50).

Jones mengartikan implementasi secara sederhana sebagai *"getting the job done and doing it."* dan memberikan batasan definisi implementasi sebagai *"a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done."* (Widodo,2008:86). Dalam hal ini implementasi diartikan sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan. Apa yang dikemukakan oleh Jones tentang implementasi merupakan tahapan kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan, yaitu merumuskan tindakan yang akan dilakukan dan melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan tadi.



Selanjutnya Donald S. Van Meter dan Carl E. Va menguraikan batasan implementasi sebagai :

*"policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions."*

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu (Widodo,2008:86).

Dari definisi yang diungkapkan Donald S. Van Meter dan Carl E. Va diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tidak saja hanya dilakukan oleh pemerintah semata, namun juga dapat dilakukan oleh individu, kelompok, dan swasta untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :

*"Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem (s) to be addressed, stipulates the objective (s) to be pursued and in a vaiety of ways."*

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutnya secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (1983:4) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa :

*"To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which included both the effort to administer and the substantive impacts on people and events".*

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

dan Lebih lanjut Mazmanian dan Sabatier (1983:4) juga mengemukakan bahwa :

*"This definition encompasses not only the behavior of the administrative body which has responsibility for the programs and the compliance of target groups, but also the web of direct and indirect political, economic, and social forces that bear intended and unintended - of the programs".*

Definisi ini menekankan tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok, sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan akhirnya berdampak pada yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari suatu program.

Dengan bertumpu pada berbagai pendapat para ahli diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan pengertian tentang implementasi kebijakan adalah sebagai suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sipembuat kebijakan sebelumnya. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata.



Memperhatikan berbagai pengertian tentang implementasi kebijakan diatas dan untuk mempermudah dalam menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, tentunya diperlukan suatu model implementasi kebijakan. Fungsi utama model adalah untuk mempermudah kita menjelaskan suatu konsep. Model dapat didasari oleh suatu teori. Model juga dapat dipakai untuk menguji atau menjelaskan hipotesis sebagai bagian dari perumusan teori. Dengan kata lain model menurut Suharto (2005:70-71) mempunyai kegunaan sebagai berikut :

“(1) Dapat membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman tentang beroperasinya sistem alamiah atau sistem buatan manusia. Model juga dapat membantu menjelaskan sistem apa dan bagaimana sistem tersebut beroperasi. (2) Dengan suatu model maka dapat membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan dan memilah-milah elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan. (3) Membantu peneliti dalam memperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut. (4) Membantu peneliti dalam merumuskan kesimpulan dan hipotesis mengenai hakekat hubungan antar elemen”.

Pandangan mengenai model (teori) implementasi kebijakan banyak kita temukan dalam berbagai literatur, Parsons (2006:123) membagi garis besar model implementasi kebijakan menjadi empat yaitu : Pertama, *the analysis of failure* (model analisis kegagalan). Kedua, model rasional (*top down*) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses. Ketiga, model pendekatan *bottom-up* merupakan kritikan terhadap model pendekatan *top down* dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi. Keempat, teori-teori hasil sintesis (*hybrid theories*).



Implementasi kebijakan yang bersifat *bottom-up* menekankan bahwa implementasi suatu kebijakan tidak lain berisi tentang berbagai strategi dari "birokrasi garis terdepan" (*street level bureaucrats*) dalam memecahkan persoalan sehari-hari (Lipsky,1980:73). Lipsky juga mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan ditingkat lapangan merupakan aktivitas yang memungkinkan pegawai publik mengatasi berbagai persoalan implementasi yang dihadapinya dalam proses keseharian.

Jadi walaupun kebijakan telah disusun sedemikian rupa ditingkat pusat, namun para implementor tidak harus mengikuti kebijakan yang telah ditentukan tersebut seketat mungkin. Argumennya, bahwa kesempatan diskresi dalam tataran pelaksana justru lebih menguntungkan karena para birokrat ditingkat lokal lebih dekat dan diyakini lebih memahami problem yang sebenarnya dibandingkan dengan para pembuat kebijakan yang berada di pusat.

Implementasi kebijakan *bottom-up* dimulai dengan mengidentifikasi para aktor yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang konkrit di level terbawah (*street level bureaucracy*) dari sistem politik-administratif. Selanjutnya mengidentifikasi jaringan para aktor yang terlibat dalam proses implementasi dan bagaimana strategi mereka dalam memecahkan permasalahan. Dalam proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), para pembuat kebijakan telah merumuskan kelompok para pelaku-pelaku pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan melalui pembagian 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :

- a. Di tingkat perdesaan (terbawah), para pelaku yang terlibat dapat dikategorikan sebagai implementator (pelaksana kegiatan) atau "birokrasi garis terdepan" (*street level bureaucrats*), yang meliputi : kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lainnya, tim pengelola kegiatan (TPK), tim penulis usulan (TPU), tim pemantau, tim pemelihara, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), dan kelompok masyarakat (Pokmas).
- b. Di tingkat kecamatan, para pelaku dapat dikategorikan sebagai "fasilitator" dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang meliputi : camat, penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK), tim verifikasi (TV), unit pengelola kegiatan (UPK), badan pengawas UPK (BP-UPK), fasilitator kecamatan (F-Kec) dan fasilitator teknik kecamatan (FT-Kec), pendamping lokal (PL), tim pengamat, badan kerjasama antar desa (BKAD), dan setrawan kecamatan.
- c. Di tingkat kabupaten, para pelaku dapat dikategorikan sebagai "pembina" dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang meliputi : bupati, tim koordinasi PNPM Mandiri kabupaten (TK PNPM-Kab), penanggung jawab operasional kabupaten (PJOKab), fasilitator kabupaten (F-Kab), fasilitator teknik kabupaten (FT-Kab), pendamping UPK, dan setrawan kabupaten.

Implementasi kebijakan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan suatu proses implementasi kebijakan yang bersifat *bottom-up*. Dikatakan demikian karena masyarakat sebagai target atau sasaran kebijakan khususnya ditingkat



perdesaan diharuskan melibatkan diri secara aktif dengan meleburkan dirinya kedalam kelompok atau organisasi yang telah diidentifikasi para pembuat kebijakan sebagai para pelaku atau pelaksana kebijakan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). Lebih jauh dari hal tersebut, selain sebagai pelaksana kebijakan masyarakat juga diberikan kewenangan untuk menentukan garis batas kemiskinan menurut keadaan lingkungan mereka sekaligus menentukan permasalahan yang menjadi penyebab kemiskinan di daerahnya dan berusaha untuk menanggulangnya melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan).

Mendasari uraian diatas, maka dalam rangkaian penelitian ini penulis akan menggunakan model implementasi kebijakan yang bersifat *bottom-up* dari Smith untuk menguji dan menganalisis bagaimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) diimplementasikan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Model implementasi kebijakan dari Smith memandang implementasi sebagai proses atau alur, sehingga dikenal dengan sebutan model proses atau alur. Model ini melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran (Putra,2003:90).

Smith mengungkapkan bahwa model implementasi kebijakan ini meliputi empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi



dan berinteraksi secara timbal balik (Tachjan,2008:39). Oleh karena adanya proses saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Keempat variabel tersebut dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan (*tensions*) diantaranya, sekaligus bisa memunculkan tumbuhnya protes-protes, bahkan aksi fisik, yang pada akhirnya hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini. Namun, pola-pola interaksi keempat variabel dalam implementasi kebijakan yang memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan tersebut justru dimungkinkan akan menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu yang akan menjadi umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan mengembalikannya kedalam matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.

Keempat variabel dalam model implementasi kebijakan yang diungkapkan Smith tersebut, adalah :

1. *Idealized policy* (Kebijakan yang diidealiskan); yaitu suatu pola interaksi yang diidealiskan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group* untuk melaksanakannya. Mendasari penjelasan tersebut maka *idealized policy* mengarah kepada substansi kebijakan yang dapat mempengaruhi objek untuk melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu bagian ini memiliki dimensi kebijakan dan pola interaksi tentang bagaimana interaksi yang terjadi antara implementator dengan objek kebijakan ketika proses implementasi berjalan.

2. *Target groups* (Kelompok sasaran); yaitu bagian dari *policy stakeholder* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilakunya dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
3. *Implementing organization* (implementasi organisasi); yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan pengertian variabel ini maka dapat dikatakan bahwa variabel *implementing organization* mengandung dua dimensi yaitu pelaksana dan organisasi. Dimensi pelaksana membicarakan bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan oleh para pelaksana di lapangan atau disebut juga dengan implementator, kemudian dimensi organisasi membicarakan bagaimana para implementator tersebut diorganisasikan.
4. *Environmental factors* (faktor-faktor lingkungan); yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. Pada penelitian ini variabel *environmental factors* memiliki dua dimensi yaitu bidang sosial budaya dan bidang ekonomi politik. Bidang sosial budaya membicarakan bagaimana kehidupan sosial masyarakat dan kebudayaan lokal dipengaruhi oleh suatu kebijakan. Kemudian bidang ekonomi politik membicarakan tentang implementasi suatu kebijakan tidak akan bisa terlepas dari kepentingan masing-masing pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Selain itu, motivasi ekonomi juga dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.



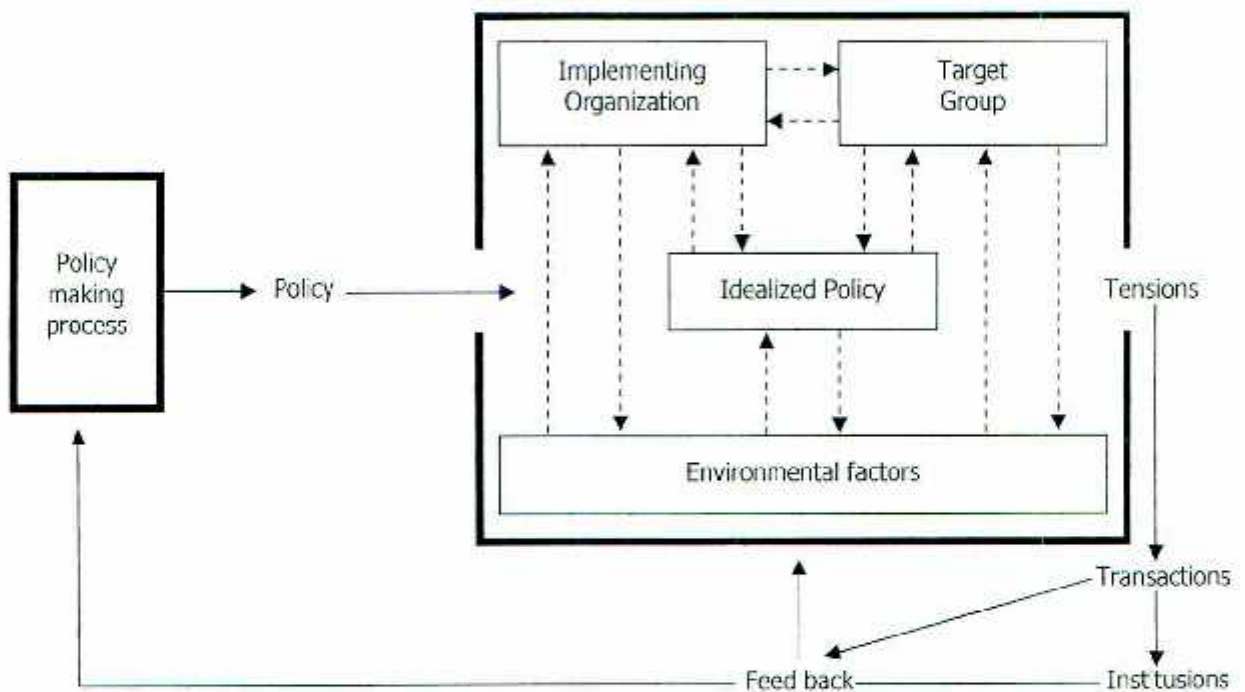
Model implementasi kebijakan dari Smith ini beranggapan bahwa kebijakan tidak dapat berjalan secara linear atau mekanistik dengan sendirinya. Namun tersedia peluang untuk terjadinya interaksi-interaksi melalui proses negosiasi atau bargaining untuk menghasilkan kompromi terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya (Tachjan,2008:39).

Kunci dari implementasi model ini adalah para pelaksana di lapangan dan memperhatikan pola interaksi diantara para pelaksana di lapangan. Artinya kemampuan para pelaksana dilapangan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sangat memegang peranan yang penting, karena dalam aplikasinya para pelaksana memainkan peranan dalam proses negosiasi atau bargaining agar proses implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Terkait dengan konteks penelitian, model implementasi kebijakan dari Smith ini akan digunakan untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menguji pelaksanaan 4 (empat) jenis kegiatan yang tertuang dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), yaitu kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan layanan bidang kesehatan, kegiatan peningkatan layanan bidang pendidikan, dan kegiatan permodalan simpan pinjam kelompok perempuan berdasarkan keempat variabel yang tertuang dalam model implementasi kebijakan dari Smith.



Adapun bagan model implementasi kebijakan dari Smith yang menggambarkan interaksi dari keempat variabel (kebijakan yang diidealiskan, kelompok sasaran, implementasi organisasi, dan faktor-faktor lingkungan) dapat diuraikan melalui gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Smith  
 Sumber (Tachjan, 2008:39)

### 3. Implementasi Program

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah yang bisa dilakukan, yaitu : langsung mengimplementasikan kebijakan publik tersebut dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah merupakan jenis kebijakan publik yang memerlukan penjelasan atau peraturan pelaksanaan lanjutan, sedangkan kebijakan publik seperti keputusan

presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, dll merupakan kebijakan publik yang bersifat operasional atau dapat langsung diimplementasikan.

Ungkapan Cheema dan Rodinelli (1983:27) lebih mempertegas pencampuran program sebagai sasaran dalam mencapai tujuan, yaitu "implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program". Sedangkan Grindle menyatakan bahwa "implementasi adalah suatu proses umum tindakan administratif yang dapat diukur pada tingkatan tujuan program yang spesifik" (Wahab,2005:59). Berkaitan dengan makna program, Weis berpendapat bahwa :

- 1) kadang-kadang program itu hanya berkenaan dengan salah satu aspek dari suatu masalah yang kompleks;
- 2) sehingga bisa saja program tersebut mencapai hasil yang baik sesuai dengan yang diinginkan;
- 3) namun diluar dugaan hasil yang diperoleh membawa efek serius;
- 4) yang mungkin menyebabkan sistem aslinya rusak (Hambali,2007:21).

Lebih lanjut Gibson et al (1996:173) mengungkapkan bahwa tidak ada program yang dapat menyelesaikan semua sasaran yang diinginkan, tetapi paling tidak program mampu menjadi petunjuk arah kemana sasaran kegiatan ditetapkan dan bagaimana mencapai sasaran untuk kepentingan implementasi program tersebut.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dapat diukur melalui tingkatan tujuan program yang spesifik. Program mungkin tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks secara keseluruhan, tetapi paling tidak program dapat memberikan arah kemana kebijakan ditujukan.



#### **4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan)**

Mulai tahun 2007 tepatnya pada tanggal 30 April 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. *Kesejahteraan*; berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. *Kemandirian*; berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan adalah dengan menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi diatas, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan.

Menurut Ronald D. White pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (*political will*) para penguasa (Suhendra, 2006:77).

Sumaryadi (2005:115) mengungkapkan bila komponen-komponen pemberdayaan telah menyentuh dan membudaya dalam diri masyarakat, maka tujuan dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah :

1. Membantu mengembangkan derajat kemanusiaan yang identik dengan masyarakat yang lemah, miskin, rentan, marjinal seperti para petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat yang terbelakang, orang-orang cacat, kelompok wanita yang diskriminatif / terkesampingkan.
2. Dengan melakukan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok tersebut diatas secara sosio ekonomis sehingga dapat hidup lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka serta diharapkan mampu berperan dalam pengembangan masyarakat di lingkungannya.

Kunci mengentaskan rakyat miskin dari belenggu kemiskinan berada pada kekuatan rakyat itu sendiri. Hal tersebut sama artinya dengan upaya pemberdayaan masyarakat atau penguatan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki kekuatan yang utuh untuk merubah masa depannya sendiri, sedangkan pihak luar dapat mengembangkan daya tersebut. Pranarka dan Priyono mengungkapkan bahwa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan secara bertahap. Menurut mereka, ada tiga fase tahapan dalam melakukan pemberdayaan, yaitu :

1. Fase inisial; dimana semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini rakyat bersifat pasif, karena hanya melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap memiliki ketergantungan pada pemerintah.
2. Fase partisipatoris; dimana proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian.
3. Fase emansipatoris; dimana proses pemberdayaan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah. Pada fase ini masyarakat sudah menemukan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan pembaruan dalam mengaktualisasikan dirinya (Miftahusyain,2008:85-86).



Lebih lanjut Kartasasmita (1996) mengungkapkan pula bahwa upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik seperti jalan, irigasi, dan listrik maupun sosial seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin.
3. Memberdayakan rakyat dalam artian melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah (Kartasasmita,1996)

Berdasarkan batasan pengertian dan tujuan pemberdayaan masyarakat diatas, maka yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk melakukan perubahan terhadap masa depan masyarakat desa yang bertujuan untuk menghasilkan suatu kekuatan yang utuh dalam diri masyarakat desa sehingga mencapai kemandirian (*self propelled development*), sedangkan pihak luar dapat mendorong proses pemberdayaan untuk mengembangkan sumber daya masyarakat desa yang diawali dengan kemauan politik (*political will*) pemerintah.

Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khususnya meliputi :

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, masyarakat perdesaan adalah pelaksana terdepan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, baik pada tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan kegiatan, maupun dalam pelestarian hasil kegiatan. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di tingkat kecamatan dan kabupaten berfungsi sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Para pelaku di tingkat perdesaan adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan di desa dan berperan penting dalam kesuksesan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Untuk lebih mengenal dan memahami siapa-siapa yang menjadi para pelaksana program di tingkat perdesaan tersebut, maka selanjutnya dapat diuraikan deskripsinya sebagai berikut :

1. Kepala Desa (Kades); di propinsi Sumatera Barat atau di Kabupaten Lima Puluh Kota disebut dengan Wali Nagari. Peran Kepala Desa pada PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa.
2. Badan Permusyawarahan Desa (BPD atau sebutan lainnya); di propinsi Sumatera Barat atau di Kabupaten Lima Puluh Kota disebut dengan Badan Permusyawarahan Nagari (BPN). Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, Badan Permusyawarahan Desa berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa. BPD juga



bertugas mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam membuat persetujuan pembentukan badan kerja sama antar desa.

3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK); terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPB Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris.
4. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (KPMD/K); di provinsi Sumatera Barat atau di Kabupaten Lima Puluh Kota disebut dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jorong (KPMJ). Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPB Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan.

Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan.

5. Tim Penulis Usulan (TPU); berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan, serta dokumen-

dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJM Desa dan RKP Desa. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan kader-kader desa yang ada.

6. Tim Pemantau; berfungsi menjalankan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan).
7. Tim Pemelihara; berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa perencanaan. Jumlah anggota tim pemelihara sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan). Dalam menjalankan fungsinya, tim pemelihara didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.
8. Kelompok Masyarakat (Pokmas); merupakan kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Misalnya kelompok

arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok SPP, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dsb.

## 5. Kesejahteraan

Sen, (2002:8) mengatakan bahwa *welfare economics* merupakan suatu proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan. Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human development*). Selanjutnya Sen, A. (1992:39-45) lebih memilih *capability approach* didalam menentukan standard hidup. Sen mengatakan: *the freedom or ability to achieve desirable "functionings" is more importance than actual outcomes*. Sedangkan Nicholson (1992:177), mengemukakan prinsipnya mengenai kesejahteraan sosial; yaitu keadaan kesejahteraan sosial maksimum tercapai bila tidak ada seorangpun yang dirugikan.

Untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebuah keluarga, maka diperlukan suatu indikator yang dapat mewakili definisi keluarga sejahtera. Indikator tersebut disusun untuk melihat taraf pemenuhan kebutuhan keluarga yang dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai dengan pemenuhan kebutuhan yang di diperlukan untuk pengembangan diri keluarga. Secara umum ukuran tahapan pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi kedalam tiga kelompok sebagai berikut :

1. Kebutuhan dasar; yang terdiri dari kebutuhan terhadap pangan, sandang, papan, dan kesehatan.



2. Kebutuhan sosial psikologis; yang terbagi atas kebutuhan pendidikan, rekreasi, transportasi, dan kebutuhan untuk berinteraksi sosial baik internal maupun eksternal.
3. Kebutuhan pengembangan; yang merupakan kemampuan keluarga untuk menyisihkan penghasilan untuk tabungan, memberikan pendidikan khusus bagi anak, dan kemudahan dalam pengaksesan informasi (Susanto,2008:5).

Agar definisi kesejahteraan dapat diungkapkan secara lebih terperinci, selanjutnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggolongkan tingkatan keluarga sejahtera dalam tiga tingkatan sebagai berikut :

- a. Keluarga Sejahtera I; yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dengan karakteristik sebagai berikut :
  1. Masing-masing anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing
  2. Makan dua kali sehari atau lebih
  3. Memiliki pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian
  4. Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
  5. Bila anak sakit dibawa kesarana kesehatan
- b. Keluarga Sejahtera II; yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sosial psikologis, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan pengembangan dengan kriteria sebagai berikut :
  1. Anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah secara teratur
  2. Minimal sekali setiap minggu keluarga menyediakan daging / ikan / telur
  3. Setiap anggota keluarga memperoleh satu stel pakaian baru pertahun
  4. Luas lantai rumah minimal 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuninya
  5. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat
  6. Paling kurang anggota keluarga yang berusia diatas 15 tahun telah berpenghasilan tetap
  7. Anggota keluarga yang berumur 10 - 60 tahun dapat baca tulis
  8. Anak usia 5 -15 tahun bersekolah
  9. Bila anak yang hidup berjumlah 2 orang atau lebih, pasangan usia subur memakai alat kontrasepsi

- c. Keluarga Sejahtera III; yaitu Keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, tetapi belum dapat memberi sumbangan yang teratur bagi komunitas atau masyarakat sekitarnya, dengan karakteristik sebagai berikut :
  - 1. Memiliki upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama
  - 2. Mampu menabung
  - 3. Makan bersama minimal 1 kali setiap hari
  - 4. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat
  - 5. Mengadakan rekreasi minimal 1 kali dalam 6 bulan
  - 6. Dapat memperoleh berita dari surat kabar / majalah / TV / radio
  - 7. Anggota keluarga memiliki sarana transportasi sesuai kondisi daerah
- d. Keluarga Sejahtera III Plus; yaitu Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan dalam kegiatan kemasyarakatan dengan karakteristik sebagai berikut :
  - 1. Secara teratur memberi sumbangan sukarela dalam kegiatan sosial dalam bentuk material
  - 2. Anggota keluarga menjadi anggota / pengurus organisasi / institusi masyarakat (Susanto,2008:6-12).

Untuk menjawab permasalahan kedua dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka penulis akan melakukan pengukuran terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan indikator-indikator keluarga sejahtera yang diungkapkan BKKBN diatas sehingga penulis memiliki gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota pasca diimplementasikannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Selanjutnya melalui proses wawancara, observasi dan analisa data, penulis mencoba mengungkapkan hubungan pengaruh pengimplementasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.



## **6. Kemiskinan**

Seseorang bisa dikatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokoknya agar dapat hidup secara layak, ini yang disebut sebagai kemiskinan konsumsi. Namun definisi ini tidak dapat dipakai secara lebih general karena beberapa alasan sebagai berikut :

1. Pengertian ini sering tidak bisa menggambarkan secara utuh realitas kehidupan orang miskin yang muram.
2. Konklusi ini dapat membiaskan bagaimana cara untuk menanggulangi kemiskinan, penyelesaian kemiskinan tak hanya cukup dengan menyediakan bahan makanan saja.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan definisi ini tidak sampai menjamah ke akar masalah, tentang bagaimana kemiskinan terjadi (Huri,2008).

Pada awalnya definisi kemiskinan memang hanya didasarkan pada ketidakmampuan dibidang ekonomi semata. Seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya lebih rendah dari batas minimum tertentu yang ditetapkan. Suparlan (1993:3) mengungkapkan kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.



Kemudian pada awal 1990-an, definisi kemiskinan meluas tidak hanya didasarkan pada tingkat pendapatan atau dari segi ekonomi saja, tapi juga mencakup ketidakmampuan dipandang dari kondisi sosial dibidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Dalam konteks Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan didefenisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Sedangkan Mas'ood mendefinisikan kemiskinan secara lebih luas dengan mengklasifikasikannya menjadi lima jenis, antara lain :

1. Kemiskinan *interstitial*; kondisi deprivasi materiil dan aliensi mendorong timbulnya kantong-kantong kemiskinan yang dikelilingi oleh para pemilik kekayaan, kekuasaan dan aset lain yang besar.
2. Kemiskinan *periferat*; terdapat diwilayah-wilayah pinggiran dan terjadi akibat deprivasi materiil yang berlangsung dalam keadaan isolasi dan aliensi.
3. Kemiskinan *overcrowding*; muncul karena akibat deprivasi materiil akibat desakan kependudukan dan kelangkaan sumber daya.
4. Kemiskinan *sporadik* atau *traumatik*; timbul akibat kerentanan bencana alam, hilangnya pekerjaan, ketidakamanan yang seringkali berkembang menjadi endemik.
5. Kemiskinan *endemik*; muncul karena akibat isolasi, aliensi, deprivasi teknologi, ketergantungan dan kelangkaan asset (Huri,2008:80).

Berdasarkan sebab terjadinya kemiskinan, Kartasasmita (1996) mengklasifikasikan kemiskinan dalam dua jenis yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

1. Kemiskinan kultural; merupakan kemiskinan yang timbul karena masyarakat miskin mempunyai budaya tersendiri (*culture of poverty*). Kemiskinan ini mengacu pada gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Pendapat ini didukung oleh pakar pembangunan seperti Oscar Lewis dan Chambers.

Dilihat dari lingkungannya, kemiskinan dapat merupakan akibat dari lingkungan atau alam yang tidak mendukung, kegagalan dalam mendapatkan sumber daya, dan perkembangan teknologi yang sangat rendah. Kemiskinan ini disebut juga dengan kemiskinan ilmiah, yaitu kemiskinan yang terjadi karena kegagalan individu dan atau lingkungan fisik sebagai objeknya hingga seseorang menjadi sulit dalam melakukan usaha atau mendapatkan pekerjaan. Dilihat dari individunya, kemiskinan terjadi karena kemalasan, kurangnya keterampilan, kurangnya kemampuan intelektual, kelemahan fisik, dan rendahnya respon dalam melihat perubahan disekitarnya (*need of achievement*).

2. Kemiskinan struktural; merupakan pendekatan yang melihat kemiskinan sebagai bagian relatif, dimana terdapat sekelompok masyarakat yang miskin, sementara kelompok lainnya tidak miskin. Hal tersebut terjadi dimungkinkan karena sistem sosial ekonomi yang berlaku memungkinkan pemusatan suatu kekuasaan atau sumber daya dikuasai oleh pihak tertentu, yang menghambat peluang pihak lain untuk ikut mengakses dan menggunakan sarana ekonomi dan fasilitas yang sebenarnya berhak mereka manfaatkan. Atau dapat dikatakan kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Di Indonesia, kemiskinan seperti ini terjadi secara historis sejak zaman kolonialisme melalui berbagai perilaku eksploitasi seperti ketidakadilan dalam tukar menukar komoditas, ketidakadilan dalam pembayaran upah jasa pekerja, dan pengenaan pungutan yang cenderung memberatkan serta cenderung memeras rakyat kecil.



Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan kemiskinan dengan mengukurnya berdasarkan beberapa indikator. Rumah tangga yang dapat digolongkan dalam kategori rumah tangga miskin atau disebut juga dengan rumah tangga / keluarga pra sejahtera adalah :

1. Rumah tangga yang anggota keluarganya tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya.
2. Rumah tangga yang tidak mampu makan dua kali sehari.
3. Rumah tangga yang anggota keluarganya tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja, dan bepergian.
4. Rumah tangga yang bagian terluas dari rumahnya masih berlantai tanah.
5. Rumah tangga yang tak mampu membawa anggota keluarganya ke sarana kesehatan untuk berobat (Sutanto,2008:4).

Dari hasil penelitian mengenai karakteristik rumah tangga miskin pedesaan dan perkotaan di Indonesia, Kartasmita (1996) mengemukakan bahwa penyebab kemiskinan dapat membentuk lingkaran kemiskinan; rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan karena berada dalam kondisi keterisolasian. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan tinggal di pedesaan. Karena pendidikan yang rendah menyebabkan produktifitas rendah sehingga imbalan yang diterima bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan perumahan. Sehingga kebutuhan lainnya seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup layak dan bekerja menjadi terabaikan. Akibatnya, dengan gizi yang buruk dan pendidikan yang rendah rumah tangga miskin akan menciptakan keluarga-keluarga miskin pada generasi berikutnya.



## 7. Kemiskinan Perdesaan

Todaro dalam LPEM-FUI (2003) mengemukakan bahwa orang miskin pada umumnya adalah mereka yang tinggal di daerah perdesaan dan memiliki kegiatan utama di bidang pertanian serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sektor pertanian. Senada dengan ungkapan tersebut, Paul Gleewe dalam LPEM-FUI (2003) juga mengemukakan bahwa sebahagian besar penduduk miskin terdapat di daerah perdesaan dan pekerjaan utama kepala keluarganya adalah di sektor pertanian atau pekerja sendiri (*self employed*).

Jazairy (1992) dalam bukunya yang berjudul *the state of world rural poverty an inquiry into its causes and consequences* mengemukakan kemiskinan perdesaan antara lain disebabkan oleh faktor-faktor : bias kebijakan, proses kelembagaan, dualisme ekonomi, tekanan kependudukan, manajemen sumber daya dan lingkungan, siklus dan proses alamiah, marginalisasi wanita, eksploitasi intermediasi (pemilik tanah, rentenir, dan pengijon), fragmentasi politik internal dan gejolak sosial, dan proses-proses internasional seperti krisis ekonomi global. Lebih lanjut Jazairy (1992) mengungkapkan tingkatan perspektif ukuran kemiskinan rumah tangga perdesaan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Deprivasi material; berupa konsumsi pangan yang tidak memadai, status gizi makanan yang rendah, kesehatan (stamina fisik) dan pendidikan yang buruk, kekurangan sandang dan papan. Biasanya hal ini terjadi pada daerah-daerah yang sanitasinya buruk dan standar higienisnya rendah.

- b. Isolasi; biasanya tercermin pada lokasi geografis terpencil yang memarginalisasi kaum miskin desa. Umumnya mereka tinggal di daerah-daerah terpencil / jauh dari lembaga layanan, kekurangan bobot yang memadai untuk mempengaruhi keputusan politik, kekurangan sarana transportasi dan komunikasi sehingga memutuskan akses informasi dan interaksi terhadap proses politik.
- c. Aleniasi; yang timbul dari isolasi dan hubungan sosial yang eksploratif dan mengandung makna tanpa identitas maupun kontrol. Kaum miskin desa teralienasi dari proses pertumbuhan seperti teknologi baru, perubahan teknologi yang cepat, mereka tidak dapat mengambil manfaat, memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan yang membuat kesenjangan komunikasi terhadap masyarakat umum.
- d. Depedency; berupa ketergantungan dalam hubungan sosial yang tidak setara antara "toke" dan nelayan, majikan dengan buruh, kreditur dan debitur, pembeli dan penjual, tingkat kontrol yang rendah terhadap imbalan jerih payah mereka, atau berwujud pada tingkat ketergantungan terhadap subsidi dan berbagai kredit sebagai sumber pendapatan mereka.
- e. Kekuatan membuat keputusan dan kebebasan memilih; berupa kurangnya kesempatan dalam perwakilan yang bersifat politik, kurangnya partisipasi dalam kelompok dan organisasi formal, dan kurangnya partisipasi dalam keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.
- f. Kepemilikan asset; berupa kecilnya kepemilikan terhadap asset hidup dan fasilitas yang menunjang kegiatan ekonomi seperti : tanah pertanian, kapal motor, jaring, modal, akses di tempat pelelangan ikan, dsb.



- g. Vulnerability; berupa vulnerability terhadap faktor alam, perubahan pasar, dan perubahan faktor demografis, serta perubahan pasar tenaga kerja.
- h. Insecurity; yang merupakan resiko korban kekerasan fisik dan sosial, karena status sosial, kekuatan fisik, kekuatan gender, ras, etnik, dan status linguistik yang rendah.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan pengembangan dari Program PPK (Program Pengembangan Kecamatan), yang selama ini dinilai berhasil dalam pelaksanaannya. Beberapa keberhasilan PPK diantaranya adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta dipandang berhasil dalam menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Mengingat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan baru diluncurkan pada tahun 2007 sehingga implementasiannya pun baru dilaksanakan pada tahun 2008, maka dirasakan penelitian yang berkenaan dengan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) masih jarang dilakukan. Namun demikian, mengingat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan keberlanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan berdasarkan katalog perpustakaan pada

Pascasarjana Universitas Sriwijaya terdapat beberapa penelitian mengenai implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Rica fuspita yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini berusaha membuktikan keeratn hubungan faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan stuktur birokrasi dalam pengimplementasian PPK sekaligus menilai apakah model implementasi kebijakan George C. Edward III mempunyai kecocokan dengan implementasi PPK di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi memiliki pengaruh yang paling dominan dalam proses implementasi PPK di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Penelitian lainnya mengenai implementasi program PPK adalah penelitian yang dilakukan oleh Dodi ariestanto yang berjudul pengaruh pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan serta mengetahui keadaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sekaligus untuk memahami pengaruh pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan melalui pengujian empat aspek pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan yaitu : perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap metode pemberdayaan masyarakat dari Cook dan Macaulay yang disebut dengan ACTORS (*authority,*



*confidence, trust, opportunity, responsibilities, dan support*). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan sudah dilaksanakan dengan baik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir juga sudah tinggi. Dari hasil uji dan analisis data dikemukakan bahwa semakin baik pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan maka pemberdayaan masyarakat pun akan semakin meningkat.

Dari kedua penelitian tersebut di atas, penelitian yang akan dilakukan sangatlah berbeda dengan kedua penelitian di atas. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pengimplementasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) yang secara resmi baru diluncurkan pemerintah pada tahun 2007 yang lalu. Walaupun program ini memiliki nomenklatur yang berbeda dengan kedua penelitian terdahulu, namun program ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menekankan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan program. Oleh karena itu, ketertarikan untuk melakukan penelitian ini sangatlah besar dalam rangka mengetahui bagaimana proses implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan yang diuji berdasarkan model implementasi kebijakan dari Smith sebagai salah satu model implementasi kebijakan yang bersifat *bottom-up*, yang terdiri dari empat variabel yaitu kebijakan yang diidealiskan, kelompok sasaran, implimentasi organisasi dan faktor-faktor lingkungan.

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota pasca pengimplementasian PNPM Mandiri Perdesaan, maka akan dilakukan pengukuran terhadap kondisi

kesejahteraan keluarga masyarakat miskin perdesaan tersebut berdasarkan indikator-indikator keluarga sejahtera I, II, III dan III plus dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan melakukan analisis statistik terhadap data yang diperoleh melalui teknik-teknik analisis statistik dengan bantuan program SPSS serta berusaha memaparkannya secara deskriptif dalam rangka mengetahui bagaimana hubungan dan pengaruh implementasi PNPM Mandiri Perdesaan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **C. Kerangka Pemikiran**

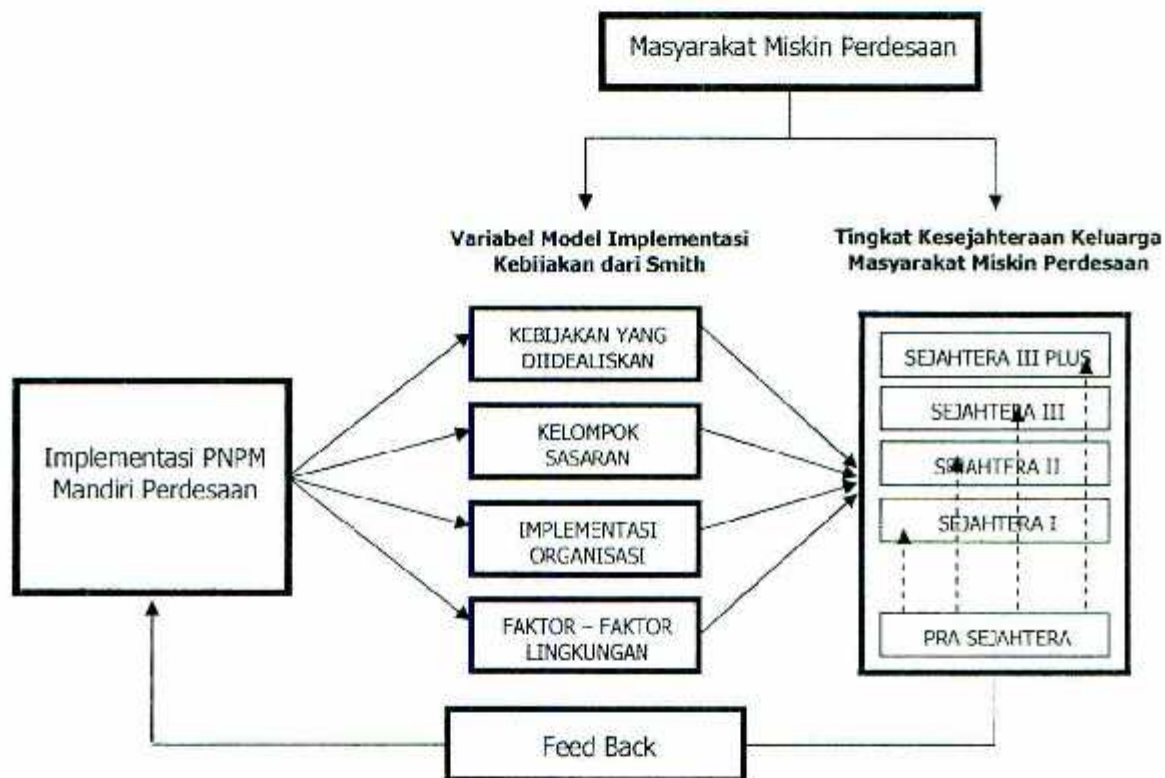
Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan pada hakekatnya merupakan proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan. Wujudnya konkritnya dilakukan melalui pelaksanaan empat jenis kegiatan pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa.

Proses pengimplementasian PNPM Mandiri Perdesaan merupakan suatu bentuk implementasi kebijakan model *bottom-up* karena menekankan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menisyratkan partisipasi masyarakat secara aktif, khususnya pemberdayaan terhadap masyarakat miskin perdesaan sebagai objek / sasaran program.

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan penjujian terhadap implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan model implementasi kebijakan Smith sebagai salah satu model implementasi kebijakan yang bersifat *bottom-up*, serta mengukur tingkat



kesejahteraan keluarga masyarakat miskin perdesaan di kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan indikator ukuran keluarga sejahtera menurut BKKBN sehingga dapat diketahui ada / tidaknya hubungan antara kedua variabel sekaligus mengetahui bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Adapun kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian ini selanjutnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diuraikan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan yang positif antara implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Nazir (2000:99) mengungkapkan "desain penelitian adalah suatu rencana tentang tata cara mengumpulkan dan cara menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian".

Oleh karena Penelitian ini berusaha mengungkapkan tentang pengaruh implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana Keberhasilan dari program ini diukur melalui tercapai / tidaknya tujuan program secara umum yaitu meningkat / tidaknya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, tempat dimana program tersebut diimplementasikan. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengimplementasian program, bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan pasca pengimplementasian program dan menganalisis bagaimana pengaruh implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka sebelumnya penulis perlu membuat desain terhadap penelitian ini agar berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diungkapkan di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian terapan. Sugiyono (2008:6) mengemukakan bahwa penelitian terapan dilakukan dengan tujuan



menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Selanjutnya, mengingat yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang jumlahnya sangat banyak (lebih kurang 79.964 jiwa atau 6.628 keluarga), maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey yang menurut Singarimbun dan Efendi (1995:34) merupakan suatu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan sebagai alat pengumpul data pokok. Selanjutnya, data pokok berbentuk kuantitatif tersebut selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesa dalam penelitian ini melalui instrumen statistik dengan bantuan program *SPSS for windows versi 14*.

Sugiyono (2008:11) mengungkapkan bahwa berdasarkan kedudukan variabel-variabel yang akan diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka penelitian dapat dikelompokkan menjadi penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Dari judul penelitian yang diambil yaitu : Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan variabel bebasnya adalah Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dan variabel terikatnya adalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan, maka penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai penelitian asosiatif / hubungan. Menurut Sugiyono (2008:11), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang dibangun dari suatu



teori dan berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Lebih lanjut mengenai hubungan antara kedua variabel pada penelitian ini, maka dapat dijelaskan bahwa hubungan kedua variabel dalam penelitian ini lebih bersifat hubungan kausal / sebab akibat dimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan metode survey dengan menyebarkan kuesioner sehingga data diperoleh merupakan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau skoring (Sugiyono,2008:14). Selanjutnya untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan, data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis korelasi dan regresi ganda dengan bantuan program *SPSS for window versi 14*. Sugiyono mengungkapkan bahwa analisis regresi dilakukan bila hubungan dua variabel berupa hubungan kausal (sebab akibat) atau fungsional. Untuk menetapkan kedua variabel mempunyai hubungan kausal atau tidak, maka harus didasarkan pada teori atau konsep-konsep tentang kedua variabel tersebut (2008:236).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif asosiatif, yaitu : penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang dibangun dari suatu teori dan berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono,2008:11).



Alasan dan pertimbangan mengapa dipilihnya Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lokasi penelitian implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dapat diungkapkan sebagai berikut :

1. Secara umum Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang berkarakteristik perdesaan, dengan mata pencaharian utama masyarakatnya berasal dari usaha-usaha dibidang pertanian. Hal ini terlihat dari fakta yang mengungkapkan bahwa pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp.1.451.373.780.000,- (34,58 %) dari total PDRB tahun 2007 sebedar Rp.4.196.793.630.000,- (Bappeda,2008:327).
2. Kemiskinan dan kemelaratan masih merupakan masalah yang aktual di Kabupaten Lima Puluh Kota. Fakta ini terlihat jelas dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2007 sebesar 79.964 jiwa (24,40 %) dari 327.655 jiwa penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan sebagaimana yang diungkapkan pada tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Penduduk / KK dengan Penduduk Miskin / KK Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota per Kecamatan Tahun 2007.

Secara umum penelitian ini telah dimulai sejak bulan Januari 2009 dengan melakukan penulisan proposal penelitian, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan seminar proposal, observasi atau pengamatan langsung ke lapangan, seminar hasil penelitian dan diakhiri dengan ujian tesis. Secara keseluruhan diperkirakan penelitian ini akan memakan waktu selama  $\pm$  8 bulan.



## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun,1995:155). Berdasarkan pengertian tersebut dan konteks penelitian yang akan dilakukan, maka populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat miskin perdesaan yang ikut terlibat atau berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam pengimplementasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan data jumlah keluarga miskin / pra sejahtera pada tahun 2007 (tabel 1.3), keluarga miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 6.628 keluarga yang tersebar di 13 kecamatan. Namun mengingat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) pada tahun 2008 hanya diimplementasikan di 11 kecamatan (minus Kec. Payakumbuh dan Gunung Omeh), maka populasi dalam penelitian ini menyusut menjadi 6.170 keluarga miskin.

### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2008:91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki sebuah populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Agar dapat menghasilkan sampel yang sesuai dengan karakteristik populasi, maka sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili (Sugiyono,2008:91). Dari sebelas kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memperoleh dan melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), dimana kesebelas kecamatan tersebut dapat dikategorikan sebagai daerah yang memiliki karakteristik yang sama atau homogen dengan alasan sebagai berikut :

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) adalah program penanggulangan kemiskinan yang khusus dilaksanakan di daerah-daerah yang memiliki karakteristik perdesaan.
2. Mayoritas masyarakat perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki profesi dan mata pencaharian yang sama yaitu sebagai petani sawah dan ladang sebagai sumber mata pencaharian keluarga.

Beranjak dari hal tersebut, untuk menentukan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan metode *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling* dengan memilih secara acak 3 (tiga) dari 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) pada tahun 2008. Menurut Sugiyono (2008:92), *probability sampling* adalah pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan teknik *simple random sampling* merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Tiga kecamatan yang terpilih secara acak adalah :

1. Kecamatan Luak dengan jumlah keluarga (KK) miskin sebanyak 714 keluarga (10,53 %).
2. Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan jumlah keluarga (KK) miskin sebanyak 580 keluarga (10,56 %).
3. Kecamatan Guguk dengan jumlah keluarga (KK) miskin sebanyak 681 keluarga (17,00 %).

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil, penulis menggunakan rumus Slovin dalam Bungin (2006:105) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana : n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

E = Presentase sampling error yang bisa ditoleransi (10 %)

Sehingga diperoleh jumlah sampel dari masing-masing kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Luak dengan,

$$N = 714 \text{ keluarga}$$

$$E = 10 \%$$

$$\text{Maka, } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{714}{1 + 714 \cdot 0,1^2}$$

$$n = 88 \text{ kepala keluarga}$$

Jadi jumlah sampel masyarakat miskin perdesaan dari kecamatan Luak yang akan diteliti sebagai responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 88 kepala keluarga. Mengingat kecamatan Luak terdiri empat nagari yaitu; Nagari Mungo,



Nagari Andaleh, Nagari Sungai Kamuyang dan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dan agar sampel yang diambil dapat mewakili populasi secara representatif, maka dari 88 responden terpilih dibagi lagi menjadi 22 responden per nagari di kecamatan Luak.

2. Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan,

$$N = 580 \text{ keluarga}$$

$$e = 10 \%$$

$$\text{Maka, } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{580}{1 + 580 \cdot 0,1^2}$$

$$n = 85 \text{ kepala keluarga}$$

Jadi jumlah sampel masyarakat miskin perdesaan dari kecamatan Situjuh Limo Nagari yang akan diteliti sebagai responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 85 kepala keluarga. Mengingat kecamatan Situjuh Limo Nagari terdiri lima nagari yaitu; Nagari Situjuh Gadang, Nagari Situjuh Banda Dalam, Nagari Situjuh Batua, Nagari Tungka dan Nagari Situjuh Ladang Laweh dan agar sampel yang diambil dapat mewakili populasi secara representatif, maka dari 85 responden terpilih dibagi lagi menjadi 17 responden per nagari di kecamatan Situjuh Limo Nagari.

3. Kecamatan Guguak dengan,

$$N = 681 \text{ keluarga}$$

$$e = 10 \%$$

$$\text{Maka, } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{681}{1 + 681 \cdot 0,1^2}$$

$$n = 87 \text{ kepala keluarga}$$

Jadi jumlah sampel masyarakat miskin perdesaan dari kecamatan Guguak yang akan diteliti sebagai responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 87 kepala keluarga. Mengingat kecamatan Guguak terdiri lima nagari yaitu; Nagari Kubang, Nagari Simpang Sugiran, Nagari Talang, Nagari Guguak VIII Koto dan Nagari VII Koto Talago dan agar sampel yang diambil dapat mewakili populasi secara representatif, maka dari 87 responden terpilih dibagi lagi menjadi 17 – 18 responden per nagari di kecamatan Guguak.

Berdasarkan perhitungan jumlah responden yang telah dilakukan per kecamatan dimana kecamatan Luak memperoleh 88 responden atau 22 responden per nagarinya, kecamatan Situjuh Limo Nagari memperoleh 85 responden atau 17 responden per nagarinya, dan kecamatan Guguak memperoleh 87 responden atau 17 – 18 responden per nagarinya sehingga jumlah total responden dalam penelitian ini adalah sebanyak **260 responden / kepala keluarga**.

#### **D. Definisi Konsep dan Operasional**

Penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota ini terdiri dari dua variabel, yaitu : satu variabel bebas (*independent*) dan satu variabel terikat (*dependent*). Sebagai variabel bebas-nya (variabel X) adalah "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan)" dan variabel terikat-nya (variabel Y) adalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan.

##### **1. Definisi Konsep**

Definisi konsep mengandung pengertian sebagai suatu definisi yang diberikan untuk variabel tertentu dengan menggunakan variabel lain. Agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, selanjutnya penulis akan memaparkan definisi konsep dari kedua variabel sebagaimana yang diungkapkan diatas sebagai berikut :

- a) Variabel Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan).

Secara garis besarnya, implementasi kebijakan dapat digolongkan kepada tiga kelompok. Pertama, model implementasi kebijakan *top-down* (atas ke bawah). Kedua, model implementasi kebijakan *bottom-up* (bawah ke atas). Ketiga, model implementasi kebijakan campuran (gabungan *top-down* dan *bottom-up*). PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan melalui pendekatan proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan



kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diimplementasikan dengan model *bottom-up*. Hal ini disebabkan karena mulai dari tahap pengusulan dan perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan pemeliharaan, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan murni seutuhnya oleh masyarakat pedesaan dengan memunculkan aspirasi kebutuhan masyarakat dari bawah.

Salah satu model implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan *bottom-up* adalah model implementasi kebijakan publik yang diungkapkan oleh Smith. Smith mengungkapkan bahwa ada empat dimensi yang saling pengaruh dan mempengaruhi dalam pengimplementasian kebijakan yang terdiri dari dimensi kebijakan yang diidealiskan (*idealized policy*), dimensi kelompok sasaran (*target groups*), dimensi implementasi organisasi (*implementing organization*), dan dimensi faktor lingkungan (*environmental factors*). Selanjutnya, pendefinisian keempat dimensi dari implementasi kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dimensi Kebijakan yang Diidealiskan (*Idealized policy*); adalah suatu pola interaksi yang diidealiskan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group* untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO), PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai 10 (sepuluh) prinsip atau nilai dasar yang menjadi nilai-nilai yang diidealisasikan para perumus kebijakan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan di PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip / nilai dasar tersebut merupakan indikator-indikator yang diharapkan para

perumus kebijakan untuk senantiasa diperhatikan dan dipatuhi dalam pengimplementasian PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu : bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, dan berkelanjutan.

- 2) Dimensi Kelompok Sasaran (*Target groups*); yaitu bagian dari *policy stakeholder* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Dalam lingkup implementasi PNPM Mandiri Perdesaan, yang menjadi *target groups* atau sasaran program adalah masyarakat miskin perdesaan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilakunya dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
- 3) Dimensi Implementasi Organisasi (*Implementing organization*); yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan pengertian variabel ini maka dapat dikatakan bahwa variabel *implementing organization* mengandung dua dimensi yaitu pelaksana dan organisasi. Dimensi pelaksana membicarakan bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan oleh para pelaksana di lapangan atau disebut juga dengan implementator, kemudian dimensi organisasi membicarakan bagaimana para implementator tersebut diorganisasikan. Dalam konteks implementasi PNPM Mandiri Perdesaan yang digolongkan kedalam organisasi pelaksana (implementor) adalah para pelaku-pelaku yang melaksanakan kegiatan di tingkat perdesaan



yang terdiri dari delapan kelompok, yaitu : Kepala Desa (Wali Nagari), Badan Permusyawaratan Desa (Badan Permusyawaratan Nagari), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pemantau, Tim Pemelihara, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Jorong, dan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

- 4) Dimensi Faktor-faktor Lingkungan (*Environmental factors*); yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi dalam pengimplementasian kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. Pada penelitian ini unsur-unsur lingkungan yang dijadikan objek penelitian terdiri dari dua bidang, yaitu bidang sosial budaya dan bidang ekonomi politik.

b) Variabel kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggolongkan keluarga sejahtera dalam empat tingkatan sesuai kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan yang selanjutnya akan menjadi dimensi pengukuran kesejahteraan keluarga pada penelitian ini. Selanjutnya, pendefinisian ketiga dimensi dalam pengukuran tingkat kesejahteraan keluarga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan dasar; adalah kebutuhan yang paling mendasar yang harus terpenuhi dalam sebuah keluarga, yaitu kebutuhan terhadap pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan untuk makan dan minum yang dibutuhkan oleh tubuh agar tetap hidup yang tentunya juga memperhatikan kualitasnya seperti menu



4 sehat 5 sempurna. Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan akan pakaian untuk menutup tubuh dan menjaganya dari cuaca panas / dingin, menutupi rasa malu dan bersosialisasi. Kebutuhan papan merupakan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dalam membina sebuah keluarga sekaligus sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Kebutuhan kesehatan merupakan kebutuhan akan fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bila ada anggota keluarga yang menderita sakit.

- 2) Kebutuhan sosial psikologis; adalah kebutuhan yang harus dapat dipenuhi oleh sebuah keluarga sesuai dengan standar-standar yang diisyaratkan para keluarga dilingkungan sekitarnya dan kebutuhan-kebutuhan yang bila dipenuhi akan memberikan kepuasan tersendiri bagi anggota secara psikologis. Kebutuhan sosial psikologis terbagi atas kebutuhan pendidikan, rekreasi, transportasi, dan kebutuhan untuk berinteraksi sosial baik internal maupun eksternal. Sebagaimana standar yang telah ditetapkan pemerintah melalui program wajib belajar (Wajar) sembilan tahun, maka diwajibkan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan tingkat SD dan SLTP sebagai wujud kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap keluarga. Kebutuhan rekreasi merupakan kebutuhan yang akan memberikan kepuasan secara psikologis bagi seluruh anggota keluarga bila dapat dipenuhi dengan baik. Kebutuhan transportasi merupakan kemampuan keluarga untuk memiliki salah satu jenis alat transportasi sesuai jumlah anggota keluarga yang akan memberikan kemudahan bagi anggota keluarga dalam berpergian dan beraktifitas.

3) Kebutuhan pengembangan; adalah kebutuhan yang secara eksplisit tidak wajib dipenuhi, namun untuk mempersiapkan kelangsungan kehidupan keluarga yang lebih bahagia dan sejahtera dimasa datang, maka dirasa perlu bagi setiap keluarga untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun kebutuhan yang termasuk dalam kategori kebutuhan pengembangan keluarga yaitu kebutuhan penyisihan sebahagian penghasilan keluarga untuk ditabung, kebutuhan akan pendidikan khusus bagi anak, dan kebutuhan akan kemudahan akses terhadap informasi.

Untuk mengukur kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota pasca pengimplementasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) pada tahun 2008 melalui ketiga dimensi kesejahteraan keluarga yang diungkapkan BKKBN, maka melalui indikator-indikator yang selanjutnya akan dijabarkan pada pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner penelitian, akan disimpulkan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga dalam empat tingkatan sebagai berikut :

a. Keluarga Sejahtera I; yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya yang ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Masing-masing anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing
2. Makan dua kali sehari atau lebih
3. Memiliki pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian

4. Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
  5. Bila anak sakit dibawa kesarana kesehatan
- b. Keluarga Sejahtera II; yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sosial psikologis, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan pengembangan dengan indikator-indikator sebagai berikut :
1. Anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah secara teratur
  2. Minimal sekali setiap minggu keluarga menyediakan daging / ikan / telur
  3. Setiap anggota keluarga memperoleh satu stel pakaian baru pertahun
  4. Luas lantai rumah minimal 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuninya
  5. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat
  6. Paling kurang anggota keluarga yang berusia diatas 15 tahun telah berpenghasilan tetap
  7. Anggota keluarga yang berumur 10 - 60 tahun dapat baca tulis
  8. Anak usia 5 -15 tahun bersekolah
  9. Bila anak yang hidup berjumlah 2 orang atau lebih, pasangan usia subur memakai alat kontrasepsi
- c. Keluarga Sejahtera III; yaitu Keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, tetapi belum dapat memberi sumbangan yang teratur bagi komunitas atau masyarakat sekitarnya, dengan indikator-indikator sebagai berikut :



1. Memiliki upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama
  2. Mampu menabung
  3. Makan bersama minimal 1 kali setiap hari
  4. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat
  5. Mengadakan rekreasi minimal 1 kali dalam 6 bulan
  6. Dapat memperoleh berita dari media
  7. Anggota keluarga memiliki sarana transportasi sesuai kondisi daerah
- d. Keluarga Sejahtera III Plus; yaitu Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan dalam kegiatan kemasyarakatan dengan indikator sebagai berikut :
1. Secara teratur memberi sumbangan sukarela dalam kegiatan sosial dalam bentuk material
  2. Anggota keluarga menjadi anggota / pengurus organisasi / institusi masyarakat

## 2. Definisi Operasional

Untuk memudahkan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini, maka variabel dikelompokkan berdasarkan matrik variabel, dimensi, beserta indikatornya.

Tabel 3.1  
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Item
1	2	3	4
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan)	Kebijakan yang Diidealiskan	1. Bertumpu pada pembangunan manusia	1
		2. Otonomi / Desentralisasi	2
		3. Berorientasi pada masyarakat miskin	3
		4. Partisipasi	4
		5. Kesetaraan dan keadilan gender	5
		6. Demokratis	6
		7. Transparansi dan akuntabel	7
		8. Prioritas	8
		9. Keberlanjutan	9
	Kelompok Sasaran	10. Motivasi masyarakat terhadap kegiatan	10
		11. Dukungan masyarakat terhadap kegiatan	11
		12. keterlibatan masyarakat dalam kegiatan	12
		13. Swadaya masyarakat pada kegiatan	13
	Implementasi Organisasi	14. Pelaksanaan kegiatan oleh implementor sesuai ketentuan	14
		15. Pemahaman implementor terhadap kegiatan	15
		16. transparansi implementor dalam melaksanakan kegiatan	16
		17. Ketepatan pengorganisasian pelaksana kegiatan	17

	Faktor-faktor Lingkungan	18. Kegiatan mempengaruhi perilaku kehidupan sosial masyarakat lokal 19. Kegiatan mempengaruhi / dipengaruhi eksistensi kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lokal 20. Kegiatan dipengaruhi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu 21. Motif ekonomi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan	18 19 & 20 21 22
kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan	Kebutuhan Dasar	1. Anggota keluarga memiliki agama yang sama 2. Melaksanakan ibadah secara teratur 3. Makan 3 kali dalam sehari 4. Pakaian didalam dan diluar rumah berbeda 5. Lantai rumah bukan dari tanah 6. Bila sakit pergi ke puskesmas	23 24 25 26 27 28
	Kebutuhan Sosial Psikologis	7. Makan daging 1 kali dalam seminggu 8. Membeli pakaian baru 1 kali setahun 9. Kondisi rumah cukup luas untuk seluruh anggota keluarga 10. Semua anggota keluarga bisa baca tulis 11. Semua anak-anak bersekolah 12. Suami istri memakai alat kontrasepsi	29 30 31 32 33 34
	Kebutuhan Pengembangan	13. Mampu menabung 14. Pergi rekreasi 1 kali dalam 6 bulan 15. Memperoleh informasi dari surat kabar / majalah 16. Mempunyai televisi 17. Mempunyai kendaraan pribadi	35 36 37 38 39
	Kebutuhan Plus (Sumbangan)	18. Memberikan sumbangan material secara teratur 19. Menjadi pengurus / anggota organisasi kemasyarakatan	40 41



Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan instrumen penelitian yang berbentuk kuesioner. Adapun format jawaban dari kuisisioner yang berkaitan dengan variabel pertama (implementasi PNPM Mandiri Perdesaan) penulis menggunakan metode skala Likert dengan lima alternatif jawaban dan memberikan skor / nilai pada setiap pilihan jawabannya sebagai berikut :

- 1) Jawaban sangat setuju / selalu / sangat positif (a) diberi skor 5;
- 2) Jawaban setuju / sering / positif (b) diberi skor 4;
- 3) Jawaban ragu-ragu / kadang-kadang / netral (c) diberi skor 3;
- 4) Jawaban tidak setuju / hampir tidak pernah / negatif (d) diberi skor 2;
- 5) Jawaban sangat tidak setuju / tidak pernah / sangat negatif (e) diberi skor 1.

(Sugiyono,2008:108)

Untuk mengetahui skor yang diperoleh, maka selanjutnya akan ditentukan intervalnya melalui penentuan skor terbesar dikurangi skor terendah, kemudian dibagi jumlah kelas. Interval penilaian dalam penilaian adalah 0 sampai 100 dengan lima kategori penilaian, sehingga kriteria penelitian masing-masing indikator dalam distribusi frekuensi menggunakan standar penilaian sebagai berikut :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| a) 81 % - 100 % | = sangat baik   |
| b) 61 % - 80 %  | = baik          |
| c) 41 % - 60 %  | = cukup         |
| d) 21 % - 40 %  | = kurang        |
| e) 0 % - 20 %   | = sangat kurang |

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara studi lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke objek / lokasi yang diteliti.

### **1. Teknik Pengumpulan Data Primer**

- a. Kuesioner; daftar pertanyaan dibagikan kepada responden yang bersifat tertutup dimana setiap pertanyaan sudah disediakan alternatif jawaban, sehingga responden tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan.
- b. Mengamati langsung fenomena yang berhubungan dengan pengimplementasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan kondisi kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan sebelum dan setelah diimplementasikannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di daerah tersebut.

### **2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu dengan cara melihat dan mempelajari berbagai bahan bacaan seperti : buku-buku teoritis, makalah ilmiah, jurnal, dokumen, dan laporan-laporan termasuk berbagai peraturan yang berkaitan dengan variabel penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Untuk memperoleh gambaran karakteristik yang menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti diperlukan analisis statistik deskriptif. Analisis data dilakukan terhadap jawaban responden terhadap setiap butir pernyataan dari setiap variabel yang diteliti.

Setelah dilakukan tabulasi terhadap setiap butir pernyataan pada setiap variabel yang diteliti, maka dilakukan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif diawali dengan melakukan penggambaran terhadap karakteristik para responden berdasarkan kategori-kategori tertentu seperti jenis kelamin, kelompok umur, status perkawinan, jumlah anak, tingkat pendidikan dan kategori dalam program BLT. Selanjutnya analisa statistik deskriptif juga dilakukan dalam menganalisa hasil pilihan jawaban para responden terhadap keempat dimensi dari variabel bebas baik secara keseluruhan ataupun individu per dimensi. lebih lanjut untuk mengetahui kondisi kesejahteraan para responden secara keseluruhan, analisis statistik deskriptif juga dilakukan terhadap hasil pilihan jawaban para responden terhadap 19 indikator ukuran kesejahteraan keluarga dari variabel terikat. Sedangkan untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang kondisi kesejahteraan dan komposisi para responden terhadap empat tingkatan keluarga sejahtera BKKBN, melalui analisis statistik deskriptif terhadap hasil pilihan jawaban para responden dan menggambarkannya melalui diagram persentase untuk menggolongkan kategori penilaian atas hasil pilihan jawaban responden. Selanjutnya atas dasar hal tersebut, para responden



dapat dikelompokkan sesuai kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, sosial dan pembangunan berdasarkan indikator-indikator ukuran tingkatan keluarga sejahtera I, II, III dan III plus, maka akan diperoleh suatu kesimpulan yang dianggap dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota pasca pengimplementasian PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008.

## **2. Uji Persyaratan**

### **a. Uji Validitas Instrumen**

Uji validitas menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya tes tersebut. Jika peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat tes yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian.

Dalam melakukan pengujian terhadap validitas instrumen, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut (Riduwan,2004:11) :

1. Menghitung korelasi setiap butir item dengan rumus product moment sebagai berikut :

$$r_{\text{hitung}} = \frac{n (\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

- Dimana;
- $r_{\text{hitung}}$  = Koefisien korelasi
  - $\sum X_i$  = Jumlah skor item
  - $\sum Y_i$  = Jumlah skor total (seluruh item)
  - $n$  = Jumlah responden

2. Menghitung harga  $t_{\text{hitung}}$  dengan rumus :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

- Dimana;
- $t$  = Nilai  $t_{\text{hitung}}$
  - $r$  = Koefisien korelasi  $r_{\text{hitung}}$
  - $n$  = Jumlah responden

3. Membandingkan harga  $t_{\text{hitung}}$  dengan  $t_{\text{tabel}}$  untuk mengetahui signifikansi bila  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = n - 2$  melalui uji satu pihak.
4. Jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  berarti instrumen penelitian valid, dan Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  berarti instrumen penelitian tidak valid.

## b. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas dapat diartikan sebagai tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (*reliable*). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Kadang-kadang, reliabilitas disebut juga sebagai keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan, dan sebagainya. Namun ide

pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, yang artinya sejauh mana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan pengukuran (*measurement error*).

Tinggi rendahnya tingkat reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Walaupun secara teoritis besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 – 1,00 akan tetapi pada kenyataannya koefisien reliabilitas sebesar 1,00 tidak pernah tercapai dalam pengukuran, karena manusia sebagai subjek pengukuran psikologis memiliki tingkat kekeliruan yang potensial. Disamping itu, walaupun koefisien korelasi dapat bertanda positif (+) atau negatif (-), akan tetapi dalam konteks reliabilitas, koefisien reliabilitas yang besarnya kurang dari nol (0,00) tidak ada artinya karena interpretasi reliabilitas selalu mengacu kepada koefisien reliabilitas yang positif.

Metode yang digunakan dalam menentukan tingkat reliabilitas instrumen alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus Spearman Brown sebagai berikut (Riduwan,2004:117) :

1. Membagi dua jumlah item (awal dan akhir) dan menghitung total skor item awal dan item akhir pertanyaan (sebagai nilai akhir X dan Y).
2. Menghitung korelasi product moment (nilai X dan Y) melalui rumus :

$$r_{hitung} = \frac{n (\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

3. Menghitung reliabilitas seluruh tes dengan rumus spearman brown sebagai berikut :



$$r_{11} = \frac{2 \cdot r_{\text{hitung}}}{1 + r_{\text{hitung}}}$$

4. Mencari  $r_{11}$  pada signifikansi untuk  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = n - 2$
5. Membuat keputusan dengan membandingkan  $r_{11}$  dengan  $r_{\text{tabel}}$ .

Jika  $r_{11} > r_{\text{tabel}}$  berarti alat ukur reliabel

Jika  $r_{11} < r_{\text{tabel}}$  berarti alat ukur tidak reliabel

### c. Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval

Analisis data ini dilakukan pada data dari kuesioner yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi (*regression analysis*). Analisis regresi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Karena metode tersebut mensyaratkan skala pengukuran pada data yang sekurang-kurangnya adalah interval, maka sebelum melakukan analisis regresi perlu dilakukan konversi skala terlebih dahulu. Konversi skala yang dimaksud adalah menaikkan skala ordinal ke skala interval.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menaikkan skala dari ordinal ke interval adalah Metode Susessive Interval (*Methods of Successive Intervals*) adalah sebagai berikut :

- 1) Jawaban kuesioner yang berupa data ordinal dikelompokkan menurut skor jawaban masing-masing item;
- 2) Lakukan perhitungan untuk mendapatkan proporsi jawaban yang terdapat pada setiap kategori untuk masing-masing variabel;

- 3) Hitung proporsi kumulatif seluruh kategori tiap variabel;
- 4) Setelah diperoleh proporsi kumulatif dari seluruh kategori, kemudian dicari nilai batas dari tabel kurva norma baku yang merupakan kurva nilai absis Z;
- 5) Lalu dihitung nilai fungsi probabilitas (pdf) dari fungsi normal baku;
- 6) Setelah diperoleh seluruh nilai batas proporsi kumulatif setiap kategori, kemudian dihitung *Skala Value* (SV) dengan rumus :

$$SV = \frac{(\text{kepadatan batas bawah}) - (\text{kepadatan batas atas})}{(\text{daerah dibawah batas atas} - \text{daerah dibawah batas bawah})}$$

- 7) Kemudian dihitung nilai konversi tiap kategori atau transformasi nilai skala (K) dengan rumus :

$$K = SV + \text{abs}(SV_{\min}) + 1$$

Setelah data diperoleh dalam skala interval, kemudian dilakukan pengujian asumsi normalitas pada masing-masing variabel penelitian.

#### **d. Uji Normalitas Data**

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik uji *Kolmogorov Smirnov*. Pengujian dilakukan pada masing-masing variabel dengan asumsi datanya berdistribusi normal. Hipotesis yang akan dilakukan pengujian adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Data berdistribusi normal

$H_1$  : Data tidak berdistribusi normal

Statistik uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S) dihitung dengan bantuan paket program *SPSS for Window versi 14*. kriteria ujinya adalah terima  $H_0$ , jika nilai K-S lebih kecil dari K-S tabel, atau jika *p-value* lebih besar dari  $\alpha$ .

### **3. Analisis Korelasi dan Regresi Ganda**

Antara analisis korelasi dan regresi mempunyai hubungan yang sangat erat. Sugiyono (2008:236) mengemukakan bahwa analisis korelasi digunakan untuk menemukan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan analisis regresi digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Analisis regresi dilakukan bila hubungan dua variabel merupakan hubungan kausal (sebab akibat) atau fungsional.

Pada umumnya setiap analisis regresi didahului dengan analisis korelasi, tetapi setiap analisis korelasi belum tentu dilanjutkan dengan analisis regresi. Korelasi yang tidak dilanjutkan dengan regresi, adalah korelasi antara dua variabel yang tidak mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) atau hubungan fungsional. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor secara individual. Dampak dari penggunaan analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya nilai dalam variabel dependen dapat dilakukan melalui atau menurunkan nilai variabel independen, atau untuk meningkatkan nilai variabel dependen dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai variabel independen dan sebaliknya. Lebih lanjut Sugiyono (2008:237)



mengemukakan rumus umum untuk persamaan analisis regresi ganda dengan jumlah variabel / subvariabel independen lebih dari satu adalah sebagai berikut :

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Dimana;  $Y'$  = Subyek / nilai dalam variabel dependen yang diprediksikan

$a$  = Harga  $Y'$  bila  $X = 0$  (harga konstan)

$b$  = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila  $b (+)$  maka naik, dan bila  $b (-)$  maka terjadi penurunan

$X$  = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai  $b$  dan  $a$ , maka digunakan dua macam rumus sebagai berikut :

$$b = r \frac{S_y}{S_x}$$

$$a = Y - bX$$

atau dengan rumus;

$$a = \frac{(\sum Y_i) (\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Dimana;  $r$  = Koefisien korelasi product moment antara variabel  $X$  dengan variabel  $Y$

$S_y$  = Simpangan baku variabel  $Y$

$S_x$  = Simpangan baku variabel  $X$

$X$  = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Secara teknis harga b merupakan tangen perbandingan antara panjang garis variabel dependen setelah persamaan regresi ditemukan. Harga b merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasi tinggi, maka harga b juga besar, sebaliknya bila koefisien korelasi rendah maka harga b juga rendah (kecil). Selain itu bila koefisien korelasi negatif maka harga juga negatif, dan sebaliknya bila koefisien korelasi positif maka harga b juga positif.

Sedangkan untuk menghitung nilai koefisien product moment antara variabel X dengan variabel Y sekaligus menghitung persamaan regresinya, menurut Sugiyono (2008:212) dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{ n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2 \} \{ n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2 \}}}$$

- Dimana;  $r_{xy}$  = Koefisien product moment antara variabel X dan variabel Y  
 X = Skor total X (skor yang diperoleh dari seluruh item pada variabel X)  
 Y = Skor total Y (skor yang diperoleh dari seluruh item pada variabel Y)  
 n = Jumlah populasi

Koefisien korelasi product moment dilambangkan dengan r, dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga  $(-1 \leq r \leq +1)$ . Apabila  $r = -1$ , artinya korelasi negatif sempurna, bila  $r = 0$ , artinya tidak ada korelasi dan bila  $r = +1$ , artinya korelasi positif sempurna.

Selanjutnya angka koefisien korelasi product moment tersebut dapat dipergunakan untuk menyatakan ukuran keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pedoman untuk memberikan interpretasi

koefisien korelasi diungkapkan Sugiyono (2008:214) seperti yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
1.	0,70 – keatas	Hubungan positif yang sangat kuat
2.	0,50 – 0,69	Hubungan positif yang kuat
3.	0,30 – 0,49	Hubungan positif yang sedang
4.	0,10 – 0,29	Hubungan positif yang rendah
5.	0,01 – 0,09	Hubungan positif yang tak berarti
6.	0,0	Tidak ada hubungan
7.	(-)0,01 – (-)0,09	Hubungan negatif yang tak berarti
8.	(-)0,10 – (-)0,29	Hubungan negatif yang rendah
9.	(-)0,30 – (-)0,49	Hubungan negatif sedang
10.	(-)0,50 – (-)0,69	Hubungan negatif yang kuat
11.	(-)0,70 – kebawah	Hubungan negatif yang sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2008:214)

Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut :

$$KP = r^2 \cdot 100 \%$$

Dimana; KP = Besarnya koefisien penentu (determinan)

r = Koefisien korelasi product moment





## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah kabupaten di propinsi Sumatera Barat. Ibukota kabupaten ini terletak di Sarilamak. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 Km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 331.674 jiwa (sumber : Lima Puluh Kota Dalam Angka 2007). Kabupaten ini terletak di bagian timur wilayah propinsi Sumatera Barat atau 124 Km dari kota Padang, ibukota propinsi.

Kabupaten ini tergolong daerah paling makmur di Sumatera Barat. Bahkan penduduk di kecamatan Kapur IX disebut-sebut memiliki pendapatan yang setara dengan gaji bulanan para Menteri. Hal ini karena masyarakat Kapur IX memiliki mata pencaharian sebagai penghasil gambir yang langsung diekspor ke Singapura, India, Jepang dan Pakistan. Namun sayangnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota belum mampu menyediakan sarana infrastruktur yang memadai bagi kecamatan ini, seperti sarana telekomunikasi, jalan dan air bersih sehingga potensi kecamatan yang dijuluki negeri "Petro Dollar" ini belum tergarap secara optimal.

Berdasarkan hasil seminar, lokakarya dan penelitian para sejarawan di Luak Limo Puluah, dengan mengungkap berbagai sumber, maka hari jadi Kabupaten Lima Puluh Kota disepakati pada tanggal 13 April 1841. Pada saat itu Muhammad Syafei sebagai Residen I (pertama) untuk Sumatera Tengah mengeluarkan ketetapan yang membagi Sumatera Tengah menjadi delapan luak,

yaitu luak Padang dan sekitarnya, Painan, Kerinci / Indrapura, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Solok / Sawahlunto, dan Pasaman. Untuk kepala luak Lima Puluh Kota diangkatlah seorang pejabat yang bernama Syafiri Gelar St. Pangeran.

Dengan disepakatinya hari jadi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 13 April 1841, maka DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota mengadakan sidang paripurna, dan lahir Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Lima Puluh Kota yang menjadi Perda terakhir pada tahun 2008.

Berbicara tentang kronologis, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui website resminya ([www.limapuluhkota.go.id](http://www.limapuluhkota.go.id)), meyakini kabupaten ini terbentuk pada awal kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 1945 namun hal tersebut masih penuh dengan misteri. Selanjutnya pada tanggal 15 November 1945, Roesad Dt. Parpatiah Baringek diangkat sebagai Residen II (kedua) Sumatera Tengah. Dan pada tanggal 23 Januari 1946 terjadi perubahan dalam kepanongprajaan, dimana sebutan Kepala Luak diganti dengan sebutan Wali Luak. Saat itu diangkatlah Bagindo Moerad sebagai Wali Luak Lima Puluh Kota, dan diangkat pula :

1. Demang Suliki yaitu Arisoen St. Alamsyah dari anggota Komite Nasional Payakumbuh.
2. Demang Payakumbuh yaitu Malik Sidik dari anggota Komite Nasional Bukittinggi.
3. Demang Bangkinang yaitu Sutan Bahroemshah dari wakil Demang Bangkinang.



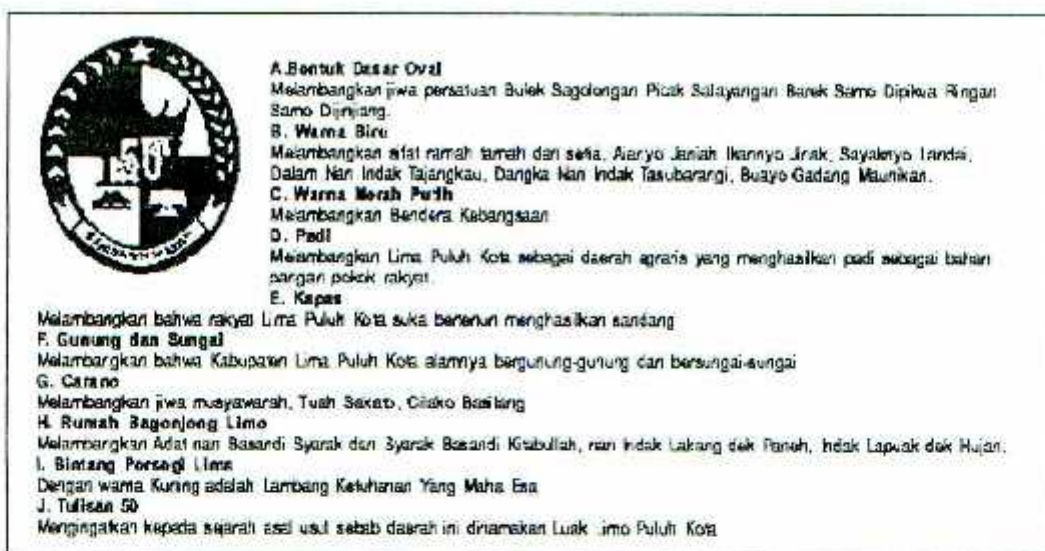
Berdasarkan peraturan komisaris pemerintah pusat di Bukittinggi nomor : 81 / Kom / U tanggal 30 November 1948, Luak Lima Puluh Kota berubah nama menjadi Kabupaten Sinamar dengan wilayah mencakup kewedanan Payakumbuh, Suliki dan Tanah Datar dengan ibukota Payakumbuh. Akan tetapi sebelum pemerintah terbentuk, Belanda melancarkan agresi militernya yang ke-II. Selama Belanda melancarkan agresi, Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh Bupati Militer Arisun St. Alamsyah dan setelah beliau gugur di Situjuh pada tanggal 15 Januari 1946 kedudukan beliau digantikan oleh Bupati Militer Saalah Sutan Mangkuto. Setelah *cease fire* pada tanggal 9 November 1949 dikeluarkanlah Instruksi Gubernur Militer nomor : 10 / GM / S.T / 49 propinsi Sumatera Tengah tentang Pembentukan Kabupaten Berotonomi, seperti yang dimaksudkan oleh UU nomor 22 tahun 1948, dimana untuk Kabupaten Lima Puluh Kota diresmikan pada tanggal 19 November 1949 dengan wilayah kecamatannya adalah Payakumbuh, Luhak, Harau, Guguk, Suliki, Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX.

Selanjutnya di era otonomi yaitu sejak diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota bertambah menjadi 13 kecamatan serta pemerintahan desa yang semula berjumlah 180 desa berubah menjadi pemerintahan nagari yang berjumlah 76 nagari. Beranjak dari kondisi memiriskan dimana tidak ada kepastian, maka diadakan urug rembug dengan sejumlah pakar. Akhirnya Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota menyepakati penetapan hari jadi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 13 April 1841. dan sejak tanggal 13 April 2009 masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

memperingati hari jadinya yang ke 168 dan akan terus diperingati setiap tahunnya.

Sedangkan sejarah asal nama lima puluh kota menurut para tukang kaba, sebutan dalam bahasa Minang kabau bagi para penutur cerita, dalam salah satu tambo cerita historis tentang asal usul dan silsilah nenek moyang orang Minang kabau di Sumatera Barat terdapat sebuah kerajaan Pariangan yang dipimpin oleh Datuak Bandaro Kayo. Ia memiliki saudara seayah bernama Datuak Ketumanggungan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang. Suatu hari, kedua saudara ini bertemu Datuak Bandaryo Kayo guna membicarakan masalah kepadatan penduduk di kerajaan tersebut. Dalam pertemuan itu disepakati untuk memindahkan sebagian penduduk kerajaan ke daerah permukiman baru. Setelah mengetahui daerah-daerah yang akan dijadikan permukiman baru, mulailah pemindahan sebagian penduduk ke tiga arah yakni Utara, Barat, dan Timur. Daerah permukiman baru di sebelah Barat kemudian diberi nama Luhak (daerah) Agam. Daerah sebelah Timur dinamakan Luhak Tanah Datar. Sementara itu, Datuak Sri Maharajo Nan Banego memimpin 50 orang menuju ke arah utara, daerah Payakumbuh. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Luhak Limo Pulau yang dalam perkembangannya menjadi Kabupaten 50 Kota. Untuk mengenang sejarah asal-usul nama kabupaten ini, pada lambang daerahnya kemudian dicantumkan angka 50 sebagaimana gambar berikut :





Gambar 4.1 Lambang dan Arti Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota

## B. Letak Geografis

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara  $0^{\circ} 25' 28,71''$  LU dan  $0^{\circ} 22' 14,52''$  LS serta antara  $100^{\circ} 15' 44,10''$  BT -  $100^{\circ} 50' 47,80''$  BT. Luas daratan mencapai  $3.354,30 \text{ Km}^2$  yang berarti 7,94 persen dari daratan propinsi Sumatera Barat yang luasnya  $42.229,64 \text{ Km}^2$ . Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 kabupaten dan 1 propinsi yaitu : Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Propinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan yaitu : Kec. Payakumbuh, Kec. Akabiluru, Kec. Luak, Kec. Lareh Sago Halaban, Kec. Situjuah Limo Nagari, Kec. Harau, Kec. Guguak, Kec. Mungka, Kec. Suliki, Kec. Bukik Barisan, Kec. Gunung Omeh, Kec. Kapur IX dan Kec. Kec. Pangkalan Koto Baru dengan kecamatan yang terluas adalah Kec. Kapur IX dengan luas  $723,36 \text{ Km}^2$  dan yang terkecil adalah Kec. Luak dengan luas  $61,68 \text{ Km}^2$ . Agar diketahui secara detil masing-masing luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

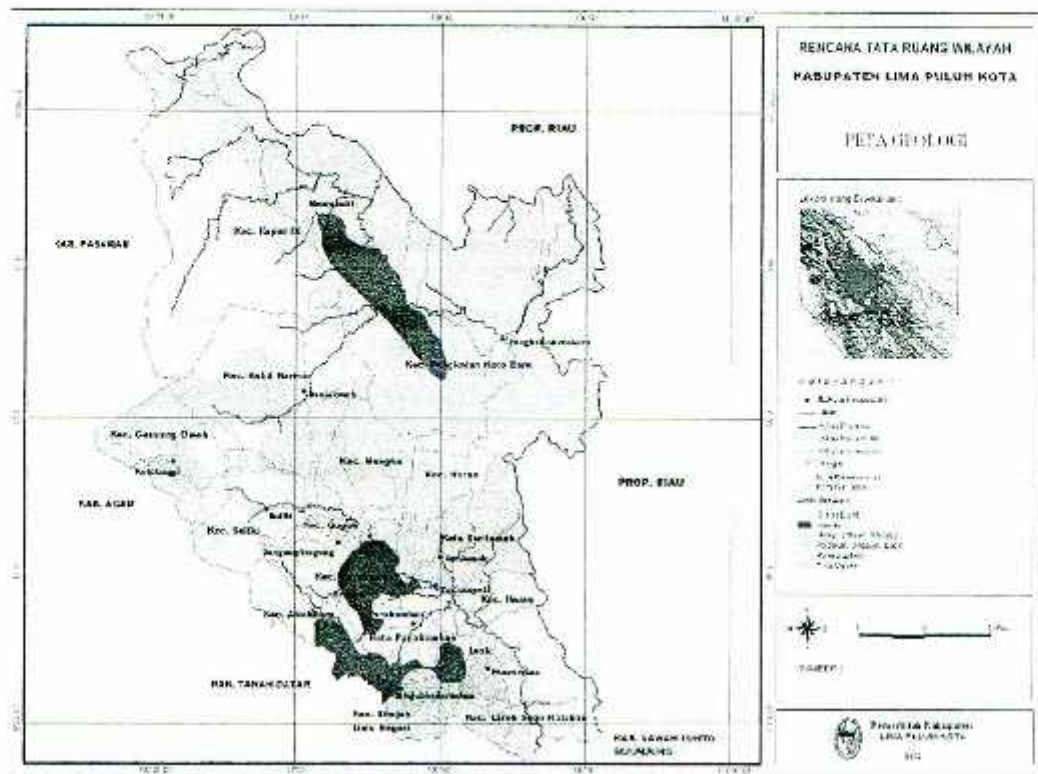


**Tabel 4.1**  
**Luas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota per Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Payakumbuh	99,47	2,97 %
2.	Akabiluru	94,26	2,81 %
3.	Luak	61,68	1,84 %
4.	Lareh Sago Halaban	394,85	11,77 %
5.	Situjuh Limo Nagari	74,18	2,21 %
6.	Harau	416,80	12,43 %
7.	Guguak	106,20	3,17 %
8.	Mungka	83,76	2,50 %
9.	Suliki	136,94	4,08 %
10.	Bukik Barisan	294,20	8,77 %
11.	Gunuang Omeh	156,54	4,67 %
12.	Kapur IX	723,36	21,57 %
13.	Pangkalan Koto Baru	712,06	21,23 %
Luas keseluruhan		3.354,30	100 %

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2007

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 791 meter. Di daerah ini terdapat 3 buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu gunung Sago (2.261 m), gunung Bungsu (1.253 m), gunung Sanggul (1.495 m) serta 13 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan / irigasi. Untuk lebih jelasnya gambaran kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dilihat melalui peta sebagai berikut :



Gambar 4.2 Peta Geologi Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2006

Bila ditinjau dari aspek penggunaan lahan maka sebagian besar wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hutan dengan luas 201.298 atau 60,01%, yang terdiri dari hutan lindung seluas 143.938 Ha, hutan suaka alam 27.060 Ha dan hutan produksi seluas 30.300 Ha. Selibuhnya baru digunakan untuk lahan perkebunan, lahan sawah beririgasi produktif, sawah beririgasi tidak produktif. Secara jelasnya mengenai jenis penggunaan lahan beserta luasnya dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang dapat dilihat melalui tabel luas lahan menurut jenis penggunaan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Luas Lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Penggunaan  
(dalam Hektar / Ha)

No	Jenis Penggunaan Lahan	2005	2006	2007
1.	Hutan lindung	143.938	143.938	143.938
2.	Hutan suaka alam dan wisata	27.060	27.060	27.060
3.	Hutan produksi			
	a. Hutan produksi tetap	6.200	6.200	6.200
	b. Hutan produksi terbatas	8.915	8.915	8.915
	c. Hutan yang dapat dikonversi	15.185	15.185	15.185
4.	Area penggunaan lain			
	I. Lahan basah			
	a. Sawah irigasi produktif	14.090	14.090	14.090
	b. Sawah irigasi tak produktif	6.641	6.641	6.641
	c. Sawah non irigasi	1.555	1.555	1.555
	d. Rawa	221	221	221
	e. Kolam/ tebat/ embung	1.320	1.320	1.320
	f. Waduk/ danau	1.814	1.814	1.814
	II. Lahan kering			
	a. Perkebunan	38.250	38.250	38.250
	b. Pemukiman/ perkarangan	7.690	7.690	7.690
	c. Industri	171	171	171
	d. Pertambangan	395	395	395
	e. Lahan terlantar/ semak belukar	36.648	36.648	36.648
	f. Penggunaan lain	25.337	25.337	25.337
Jumlah / Total		335.430	335.430	335.430

Sumber : BPN Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2007

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki iklim sedang dengan suhu rata-rata 24<sup>0</sup>-28<sup>0</sup> C dan memiliki curah hujan rata-rata 3039,20 mm / tahun dengan jumlah hari hujan mencapai 179 hari pertahun dan penyebaran hujan relatif merata setiap bulan di setiap Kecamatan dan Nagari. Desember merupakan puncak curah hujan, dimana curah hujan mencapai 543,50 mm, dengan jumlah hari hujan mencapai 23 hari. Sedangkan pada bulan Juli curah hujan hanyalah sebesar 24,70 mm yang berlangsung selama 5 (lima) hari.



### **C. Kondisi Demografis**

Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 331.674 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 164.750 jiwa atau 49,67 % dan jumlah penduduk perempuan mencapai 166.924 jiwa atau 50,33 %. Dalam hal ini jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2000 yang berjumlah 312.090 jiwa, terjadi pertambahan penduduk sebesar 19.584 jiwa atau dengan kenaikan rata-rata sekitar 2.797 jiwa pertahun atau dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 2,04 %.

Bila ditinjau dari aspek distribusinya, rata-rata penyebaran penduduk per kecamatan adalah 25.513 jiwa, dan per nagari 4.364 jiwa. Distribusi penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Harau dengan jumlah 42.019 jiwa. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Guguk (33.383 jiwa) dan Kecamatan Lareh Sago Halaban (32.805 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh (12.532 jiwa), kemudian Kecamatan Suliki (14.098 jiwa) dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari (19.397 jiwa).

Pada sisi lain kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 mencapai rata-rata 99 jiwa / km<sup>2</sup>. Rata-rata kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Luak (380 jiwa / km<sup>2</sup>). Sementara itu tingkat kepadatan penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Kapur IX (36 jiwa / km<sup>2</sup>). Adapun kepadatan penduduk per rumah tangga mencapai rata-rata 4 jiwa, dimana dalam hal ini jumlah keseluruhan rumah tangga mencapai 85.212 rumah





13.195 jiwa sedang bersekolah, 36.175 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 13.805 jiwa termasuk kedalam kelompok lainnya.

Selanjutnya dapat diungkapkan perkembangan angka-angka demografi dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut jenis kelamin melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3

perkembangan angka-angka demografi dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut jenis kelamin

No	Angka-angka Demografi	Tahun		
		2005	2006	2007
1.	Angka kematian bayi			
	a. Laki-laki	37,70	39,29	38,44
	b. Perempuan	28,31	29,60	28,91
	c. Jumlah	33,39	34,56	33,79
2.	Angka harapan hidup			
	a. Laki-laki	66,82	66,43	66,64
	b. Perempuan	70,79	70,40	70,61
	c. Jumlah	68,79	68,40	68,61
3.	Angka kematian kasar	7,00	8,63	8,63
4.	Angka kelahiran kasar	20,06	22,52	22,52
5.	Tingkat partisipasi angk. Kerja			
	a. Laki-laki	86,03	84,32	86,43
	b. Perempuan	56,90	44,49	60,06
	c. Jumlah	70,97	64,80	72,63

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2007

#### D. Mata Pencaharian Penduduk

Pada tahun 2006, kondisi wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan luas lahan, sebagian besar dimanfaatkan untuk aktifitas pertanian. Dalam hal ini, hanya 108.491 Ha atau 32,34% lahan yang tidak dimanfaatkan untuk aktifitas pertanian. Sedangkan selebihnya atau 226.939 Ha dimanfaatkan



untuk ekonomi pertanian, yang menyerap hampir 65% tenaga kerja. Pada bagian ini, penggunaan lahan terbesar adalah pada hutan lindung dengan luas mencapai 143.938 Ha, selanjutnya hutan suaka alam 27.060 Ha dan hutan produksi 30.300 Ha. Sementara itu lahan perkebunan mencapai 38.250 Ha dan lahan persawahan mencapai 22.286 Ha. Dari komposisi dan distribusi lahan pertanian ini diyakini Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi sangat besar yang masih dapat dikembangkan dan ditingkatkan di masa datang.

Berdasarkan data statistik tahun 2006 diketahui bahwa terdapat beberapa komoditas andalan sebagai potensi unggulan yang menjadi *leading sector economy* sesuai penggunaan lahan tadi. Produksi padi tahun 2006 sebesar 202.971,01 ton, dengan rata-rata produksi sebesar 4,99 ton / Ha. Dengan jumlah produksi tersebut, maka produksi padi sawah masih dominan, yaitu sebesar 202.924,49 ton sedangkan sisanya adalah padi gogo / ladang. Sedangkan produksi tanaman pangan lainnya yang dikategorikan sebagai potensi unggulan adalah jagung 24.308,71 ton, ubi kayu 16.455,58 ton dan ubi jalar 2.101,68 ton. Sepanjang tahun 2006 ini produksi tanaman hortikultura seperti kacang tanah mencapai 283,16 ton, cabe 3.820,44 ton dan buncis 1.312,60 ton. Pada sub sektor tanaman hortikultura juga terdapat beberapa komoditas lainnya yang merupakan potensi unggulan. Hal ini ditunjukkan oleh produksi manggis yang mencapai 3.887,44 ton, jeruk 5.893,64 ton, durian 5.413,01,50 ton, pisang 6.969,37 ton.

Begitu juga dengan komoditas unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota pada sub sektor perkebunan, yaitu teh dengan produksi mencapai 178,6 ton, pinang 497 ton, tembakau 133,3 ton. Sementara itu karet produksinya mampu mencapai 5.723,0 ton, kelapa 2.609,0 ton dan kulit manis 713,0 ton.

Sebagai potensi unggulan utama pada sub sektor perkebunan ini adalah komoditas gambir. Pada tahun 2006 ini produksi gambir mencapai 9.682,50 ton dengan luas lahan mencapai 13.712 hektar, yang sebagian besar berada di Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Produksi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum mengalami perkembangan cukup bervariasi. Pada tahun 2006 populasi sapi tercatat sebanyak 57.236, kerbau 24.119 ekor, kambing 21.090 ekor dan kuda 258 ekor. Sedangkan pada tenak unggas, populasi ayam ras petelur 3.728.659 ekor, ayam ras pedaging 706.886 ekor, ayam buras 571.282 ekor dan itik 118.564 ekor. Sedangkan produksi telur ayam ras mencapai 24.738.430 butir, telur ayam buras 239.838 butir dan telur itik 560.377 butir. Selanjutnya produksi daging sapi 479.012 kilo dan daging kerbau 70.724 kilo.

Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari budidaya kolam dan budidaya sawah. Produksi ikan budidaya kolam tercatat sebesar 13.950,13 ton dengan luas areal 1.059,33 ha. Produksi terbanyak terdapat di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, yaitu 11.640,11 ton dengan luas areal 116 ha. Untuk ikan budidaya sawah, produksi tahun 2006 sebesar 5.119,88 ton, dengan luas areal 157,27 ha.



Di samping sektor pertanian, sektor lainnya yang memiliki potensi besar adalah sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Banyaknya unit usaha yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Di Lima Puluh Kota tercatat 8.877 unit, yang terdiri dari industri hasil pertanian dan kehutanan, industri mesin, logam dan bahan kimia serta Industri aneka, dengan jumlah tenaga kerja 25.896 orang. Nilai investasi yang ditanamkan pada sektor industri tercatat Rp. 63,729 milyar. dengan nilai produksi sebesar Rp. 360,09 milyar dan bahan baku penolong Rp. 133,91 milyar. Sebagian besar industri ini berupa industri kecil dan rumah tangga dengan spesialisasi kerajinan bordir, makanan ringan, perabot dan sebagainya.

Pada sektor pertambangan sebenarnya cukup besar potensinya tetapi belum tereksplorasi dan tereksplotasi secara optimal. Dari data yang ada diperkirakan potensi batu bara mencapai 12.896,1 ton, emas (7.665,8 ton), timah hitam 1.050.000 ton, kwarsit 1.050.000 ton, tanah liat 202.700 ton dan marmer 909.995,2 ton.

Sesuai dengan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu meningkatkan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan, dalam hal ini adalah usaha berbentuk koperasi. Pada tahun 2006 koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Lima Puluh Kota sebanyak 191 buah dengan anggota sebanyak 38.035 orang.

Untuk mendukung aktifitas perekonomian masyarakat tersebut dibutuhkan infrastruktur ekonomi yang cukup memadai berupa infrastruktur jalan. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2006 tercatat untuk jalan nasional sepanjang 80,90 Km, jalan provinsi sepanjang



122,55 Km dan jalan kabupaten sepanjang 1.104,25 Km. Namun berdasarkan kondisinya masih cukup banyak jalan yang berada dalam kondisi rusak dan rusak berat yang akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktifitas perekonomian masyarakat.

#### **E. Kondisi Kemiskinan**

Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong daerah paling makmur di Sumatera Barat. Bahkan penduduk di Kecamatan Kapur IX disebut-sebut memiliki pendapatan yang setara dengan gaji bulanan para Menteri. Hal ini karena masyarakat Kapur IX memiliki mata pencaharian sebagai penghasil gambir yang langsung diekspor ke Singapura, India, Jepang, dan Pakistan. Sayangnya pemerintah daerah ini tidak bisa menyediakan sarana infrastruktur yang memadai seperti sarana telekomunikasi, jalan, air bersih, sehingga potensi kecamatan yang dijuluki negeri "Petro Dollar" ini tidak tergarap optimal. Luas tanam perkebunan gambir di Kabupaten Limapuluh Kota mencapai 12.495 hektar atau 78 persen dari luas tanam perkebunan gambir se-Sumatera Barat. Pada tahun 2000, dari total produksi gambir Sumatera Barat sebesar 9.071 ton, sekitar 89 persennya merupakan hasil produksi gambir dari kabupaten ini. Di pasaran, harga jual satu kg gambir setara dengan satu dollar Amerika. Jadi naik turunnya harga gambir mengikuti naik turunnya nilai rupiah terhadap dollar.

Kantor berita Antara – Sumbar mengungkapkan bahwa jumlah penduduk kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi salah satu cikal bakal ranah Minang ini pada tahun 1999 sekitar 311.000 orang dengan pendapatan per kapitanya mencapai Rp 4,8 juta, di atas rata-rata pendapatan perkapita

Sumatera Barat yang mencapai Rp 4,5 juta. Dari jumlah penduduk tersebut, pada tahun 1999 terdapat sekitar 70 ribu orang termasuk dalam kelompok umur di bawah 10 tahun. Menurut data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat bulan Juli 2000, di kabupaten ini masih terdapat 273 balita yang menderita gizi buruk dan kurang energi protein / KEP ([www.antarasumbar.com](http://www.antarasumbar.com)).

Jika tidak menyaksikan sendiri keadaan desa-desa di kabupaten ini, sulit mempercayai bahwa di kabupaten penghasil gambir (*Uncaria gambir*) terbesar di Indonesia ini, masih ditemukan balita bergizi buruk dan KEP. Di pelosok Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan umpamanya, masih dijumpai rumah penduduk yang beralaskan tanah dengan dinding kayu. Padahal sejak ditemukannya batu-batu menhir, peninggalan kebudayaan megalitikum, pada tahun 1981 Nagari Mahat masuk dalam salah satu obyek wisata dari 73 obyek wisata yang ditawarkan kabupaten ini. Meskipun hanya berjarak 44 km atau sekitar 1,5 jam perjalanan dari Payakumbuh, daerah ini seakan terisolasi karena tidak dilalui kendaraan umum. Mobil yang digunakan untuk menuju Nagari Maek pun harus menggunakan double gardan, karena selepas jalan beraspal kasar yang hanya sekitar dua km, selebihnya berupa jalan tanah berbatu-batu dan berlubang besar di sana-sini. Yang lebih menyusahkan, jalanan mendaki dengan tikungan-tikungan curam. Bibir jurang yang dalamnya kurang lebih 500 meter di sebelah kiri nyaris tidak tampak karena tertutup ilalang dan pohon-pohon. Tidak ada pengaman atau tanda apa pun di bibir jurang itu sebagai tanda bagi para pengendara mobil untuk berhati-hati.



Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah keluarga menurut tingkat kesejahteraannya dari tahun ke tahun, maka dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Perkembangan Jumlah Keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota  
Menurut Tingkat Kesejahteraan dari Tahun 2003 - 2007

No	Tahun	Tingkat Kesejahteraan					Jumlah
		Pra sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III plus	
1.	2003	1.006	31.863	32.983	17.406	517	83.775
2.	2004	979	32.808	33.420	18.170	455	85.832
3.	2005	979	32.777	33.465	17.726	454	85.401
4.	2006	5.249	23.747	28.320	29.144	1.101	87.561
5.	2007	6.628	21.862	27.045	32.432	1.002	88.969

Sumber : Kantor KBKS Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2007

#### **F. Organisasi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kabupaten Lima Puluh Kota dibagi atas 13 kecamatan yang terdiri dari 76 nagari dan 384 jorong. Dari 13 kecamatan ini, kecamatan Harau yang mempunyai jumlah nagari terbanyak yaitu sebanyak 11 nagari dengan 42 jorong. Sedangkan kecamatan dengan jumlah nagari terkecil adalah kecamatan Gunuang Omeh dengan 3 nagari dan 17 jorong.

Struktur organisasi pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2007 terdiri dari sebuah Sekretariat Daerah yang terdiri dari 10 bagian yaitu : Bagian Umum, Kesra, Tapem, Capil, Hukum, Organisasi, Arsip, Lingkungan Hidup, Pengendalian Program, Perekonomian dan PMD, sebuah sekretariat DPRD, sebuah sekretariat KPUD, 4 buah badan yaitu : Bappeda, BPKD, BKD dan Bawasda, 9 buah dinas yaitu : Dinas PU, Dinas pertanian



Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperindag, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan / Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, 8 buah kantor yaitu : Kantor Perkebunan, Kantor Pariwisata, Kantor Informasi Komunikasi dan Data, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Kantor Kesbang Linmas, Kantor Satpol PP, Kantor Sosial dan Kantor KBKS, 13 buah Kantor Camat dan 76 buah Kantor Wali Nagari.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2007 adalah sebanyak 6.742 orang yang terdiri dari 2.681 orang laki-laki dan 4.061 perempuan. Bila dilihat menurut golongan ruang, maka pegawai golongan (I) tercatat sebanyak 122 orang, golongan (II) sebanyak 1.294 orang, golongan (III) sebanyak 3.822 orang dan golongan (IV) sebanyak 1.504 orang. Bila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka keadaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5

Jumlah PNS Pemda Kab. Lima Puluh Kota Menurut Tingkat Pendidikan

No	Dinas / Instansi	Tingkat Pendidikan								Jumlah / Total
		S2	S1/D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1.	Sekretaris daerah	1	8	1	0	0	0	0	0	10
2.	Sekretariat DPRD	1	5	2	0	0	5	8	1	22
3.	Sekretariat KPU	0	3	0	0	0	4	0	0	7
4.	Bagian :									
	- Umum	0	8	3	0	0	36	2	2	51
	- Kesra	0	7	1	0	0	0	0	0	8
	- Tapem	2	5	0	0	0	5	0	0	12
	- Capil	0	1	2	0	0	7	0	0	10
	- Hukum	1	10	0	0	0	1	0	0	12
	- Organisasi	2	3	2	0	0	3	0	0	10
	- Arsip	0	4	5	0	0	3	0	1	13
	- Lingkungan hidup	2	6	0	0	0	5	0	0	13
	- Pengendalian program	2	3	0	0	0	5	0	0	10
	- Perekonomian & PMD	0	8	0	0	0	1	0	0	9

5.	Dinas :									
	- Pekerjaan umum	0	33	14	0	0	40	5	5	97
	- Pertanian	1	43	18	0	0	61	0	1	124
	- Kesehatan	4	22	15	0	11	17	2	0	71
	- Pendidikan	1	46	3	1	0	39	1	1	92
	- Koperindag	1	24	7	0	0	18	0	3	53
	- Perhubungan	0	14	3	0	0	25	0	0	42
	- Kehutanan	0	23	3	0	0	47	0	0	73
	- Peternakan/perikanan	1	48	19	0	1	54	0	5	128
	- Pertamben	4	11	4	0	0	12	0	0	31
6.	Badan :									
	- Bappeda	6	25	5	0	0	8	1	0	45
	- BPKD	3	26	12	0	0	33	1	0	75
	- BKD	2	26	6	0	0	24	0	0	58
	- Bawasda	2	19	13	0	0	17	0	0	51
7.	Kantor :									
	- Perkebunan	0	18	3	0	11	32	1	0	65
	- Pariwisata	1	10	6	0	0	4	2	0	23
	- IKD	0	12	4	0	0	9	1	0	26
	- PMN	0	9	4	0	0	9	0	0	22
	- Kesbang Linmas	1	3	2	0	0	9	5	0	20
	- Satpol PP	0	7	2	0	0	19	11	0	39
	- Sosial	0	8	2	0	0	15	0	0	25
	- KBKS	0	16	12	0	0	40	0	1	69
8.	Kecamatan :									
	- Payakumbuh	0	3	3	0	0	11	0	0	17
	- Akabiluru	0	4	1	0	0	8	1	0	14
	- Luak	0	2	1	0	0	12	1	0	16
	- Lareh sago halaban	0	3	0	0	0	8	1	0	12
	- Situjuh limo nagari	0	5	1	0	0	6	1	0	13
	- Harau	1	4	2	0	0	12	0	0	19
	- Guguak	0	2	4	0	0	9	1	0	16
	- Mungka	1	2	3	0	0	4	0	0	10
	- Suliki	1	4	0	0	0	8	0	1	14
	- Bukik barisan	1	5	0	0	0	7	2	1	16
	- Gunuang omeh	2	0	1	0	0	6	0	0	9
	- Kapur IX	0	4	1	0	0	8	1	0	14
	- Pangkalan koto baru	1	1	0	0	0	8	0	0	10
9.	Lainnya	12	1.322	592	2.069	195	749	106	101	5.146
	Jumlah / Total	57	1.875	782	2.070	218	1.463	154	123	6.742

Sumber : BKD Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2007

Pada Pemilu tahun 2004 jumlah partai yang ikut tercatat sebanyak 24 partai dengan perolehan suara terbanyak untuk pemilihan anggota DPRD tingkat II adalah Partai Golongan Karya yaitu sebesar 32,40 persen kemudian diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan suara sebesar 16,05 persen.

Untuk pemilihan anggota DPRD tingkat I jumlah suara terbanyak juga diperoleh oleh Partai Golongan Karya sebesar 33,86 persen kemudian diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan sebesar 15,93 persen. Untuk pemilihan anggota DPR suara terbanyak juga diperoleh oleh Partai Golongan Karya yaitu sebesar 33,83 persen diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan suara sebesar 15,94 persen.





## BAB V

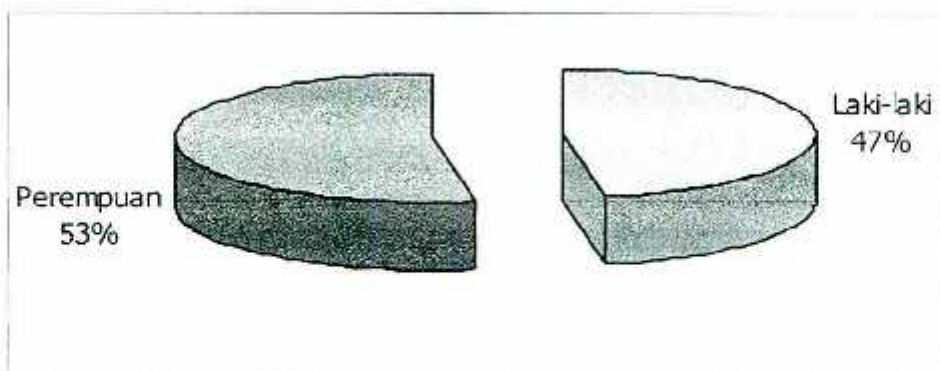
### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Statistik Deskriptif

##### 1. Deskripsi Responden

Dari tiga kecamatan yang menjadi sampel area pada penelitian ini, jumlah responden untuk kecamatan Luak adalah sebanyak 88 responden, kecamatan Situjuh Limo Nagari sebanyak 85 responden, dan kecamatan Guguk sebanyak 87 responden. Berdasarkan data identitas diri para responden, maka dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 123 responden dan yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 137 responden.

Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai persentase komposisi para responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat melalui diagram sebagai berikut :

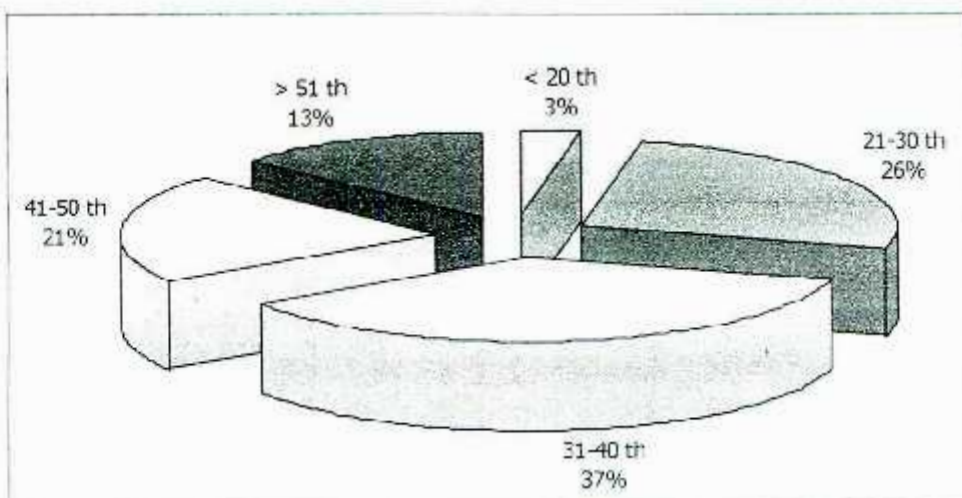


Gambar 5.1 Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
Sumber : Data Primer lampiran 4.1

Selanjutnya berdasarkan klasifikasi kelompok umur, jumlah responden yang berumur dibawah 20 tahun sebanyak 8 orang, 21-30 tahun sebanyak 68

orang, 31-40 tahun sebanyak 96 orang, 41-50 tahun sebanyak 54 orang dan yang berumur diatas 51 tahun sebanyak 34 orang. Bila dilihat per kecamatan, maka jumlah responden tertinggi di kecamatan Luak berada pada kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 28 orang (31,82 %) sedangkan yang terendah berada pada kelompok umur dibawah 20 tahun sebanyak 2 orang (2,27 %). Untuk kecamatan Situjuh Limo Nagari responden terbanyak berada pada kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 34 orang (40 %) dan yang paling sedikit berada pada kelompok umur dibawah 20 tahun sebanyak 3 orang (3,53 %). Untuk kecamatan Guguak kondisi responden berdasarkan kelompok umur relatif sama dengan dua kecamatan sebelumnya, dengan jumlah responden tertinggi sebanyak 34 orang (39,08 %) berada pada kelompok umur 31-40 tahun dan yang terendah berada pada kelompok umur dibawah 20 tahun sebanyak 3 orang (3,45 %).

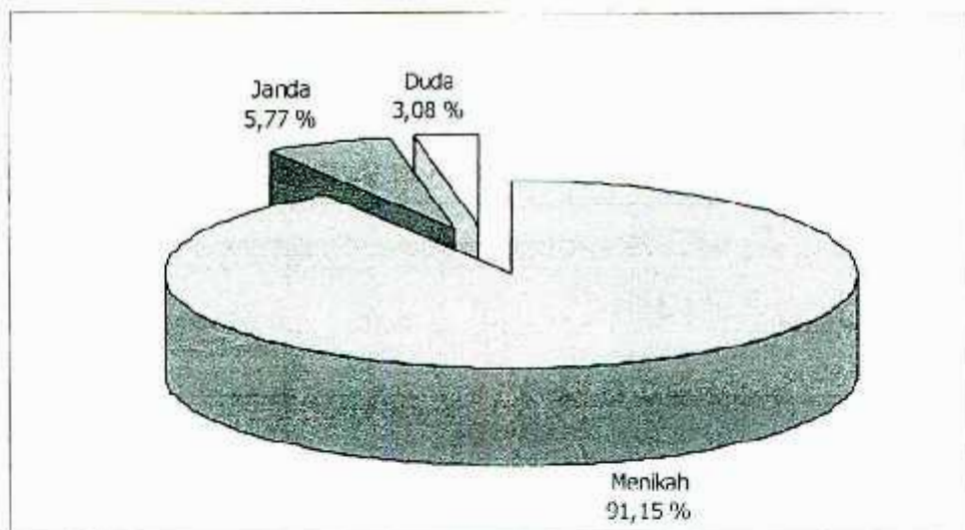
Secara lebih jelas mengenai persentase komposisi ke-260 responden dari masing-masing kelompok umurnya dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut :



Gambar 5.2 Komposisi Responden Berdasarkan Kelompok Umur  
 Sumber : Data Primer Lampiran 4.1



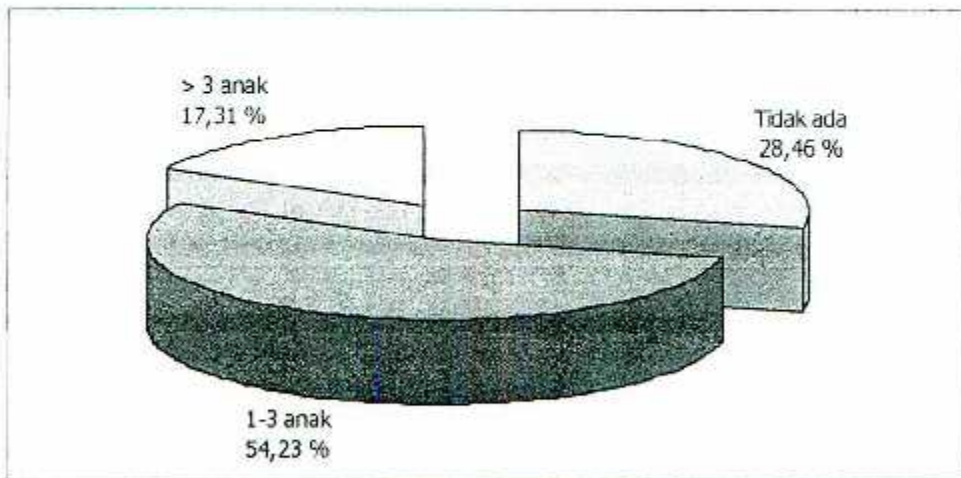
Mengingat salah satu tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan unit analisisnya adalah keluarga, maka dirasa perlu bagi penulis untuk mengetahui status perkawinan para responden berikut jumlah anak yang dimiliki per keluarga. Karena keberagaman data yang diperoleh, penulis mengelompokkan jumlah anak per keluarga menjadi 3 kelompok yaitu : tidak memiliki anak, memiliki 1-3 anak, dan memiliki anak diatas 3 orang. Berdasarkan status perkawinan, mayoritas para responden atau sebanyak 237 orang berstatus telah menikah, sedangkan sisanya berstatus janda / duda sebagaimana tergambar pada diagram dibawah ini.



Gambar 5.3 Komposisi Responden Berdasarkan Status Perkawinan  
Sumber : Data Primer Lampiran 4.2

Selanjutnya berdasarkan data yg diperoleh, rata-rata keluarga yang menjadi responden pada penelitian ini baik di kecamatan Luak, Situjuh Limo Nagari maupun Guguak memiliki anak berkisar antara 1 s/d 3 anak. Dari 260 responden, sebanyak 141 keluarga berada pada kelompok ini. Akan tetapi, jumlah keluarga yang belum memiliki anak pun ternyata cukup besar yaitu sebanyak 74 keluarga dari 260 responden. Untuk lebih jelasnya mengenai

gambaran besaran komposisi bagian dari ketiga kelompok tersebut, dapat dilihat melalui diagram sebagai berikut :



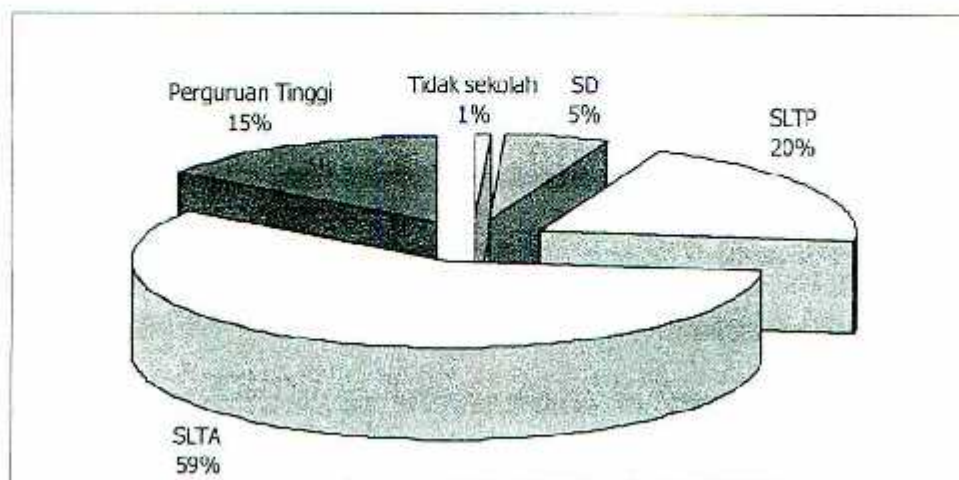
Gambar 5.4 Komposisi Responden Berdasarkan Jumlah Anak  
Sumber : Data Primer Lampiran 4.2

Berdasarkan tingkat pendidikannya, para kepala keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini telah memiliki latar pendidikan yang cukup baik. Dari gambar diagram jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan terlihat bahwa para responden dengan tingkat pendidikan SLTA adalah yang terbanyak atau sebesar 59 persen, kemudian diikuti oleh tingkat pendidikan SLTP sebesar 20 persen, Perguruan Tinggi sebesar 15 persen, SD sebesar 5 persen dan hanya 1 persen saja yang tidak pernah merasakan pendidikan.

Bila dilihat per kecamatan maka dapat diungkapkan bahwa tingkat pendidikan para responden dari kecamatan Luak sebanyak 88 responden adalah sebagai berikut; responden yang memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi sebanyak 9 orang, SLTA 55 orang, SLTP 19 orang, SD 5 orang dan tidak ada responden yang tidak bersekolah. Pada kecamatan Situjuh Limo Nagari dari 85 responden yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi sebanyak 16 orang, SLTA 46 orang, SLTP 17 orang, SD 5 orang dan 1 orang tidak sekolah.



Sedangkan pada kecamatan Guguk dari 87 responden yang memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi sebanyak 15 orang, SLTA 50 orang, SLTP 17 orang, SD 4 orang dan 1 orang responden tidak sekolah.

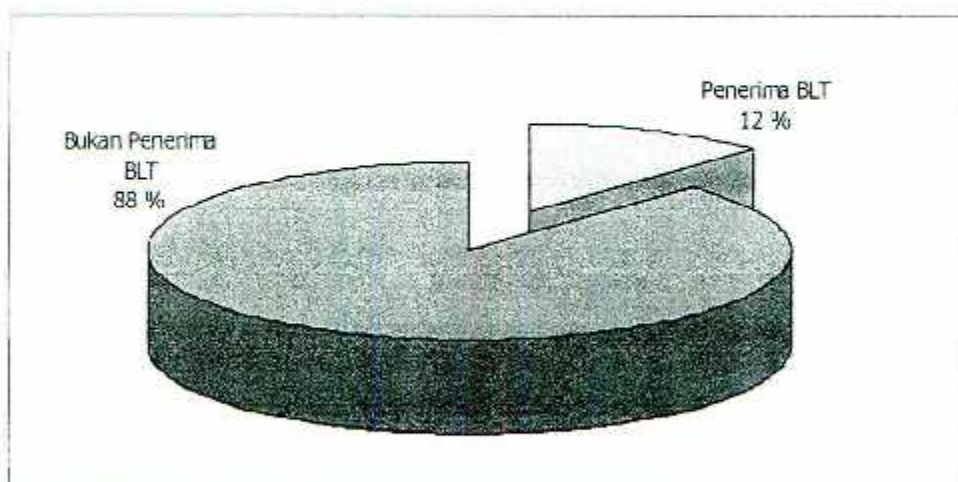


Gambar 5.5 Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Sumber : Data Primer Lampiran 4.3

Selanjutnya identitas terakhir dari para responden yang ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah berdasarkan kategori sebagai penerima program BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau bukan penerima program BLT. Berdasarkan data identitas responden, menunjukkan hasil bahwa dari 260 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini, ternyata sebanyak 228 responden (88 %) bukan sebagai penerima program BLT sebagaimana yang terlihat pada diagram gambar dibawah ini. Selanjutnya secara umum dapat diasumsikan bahwa dari sampel penelitian yang diambil, hanya sebesar 12 persen responden yang diperkirakan termasuk dalam kategori keluarga pra sejahtera. Namun demikian, untuk membuktikan hal tersebut penulis telah melakukan pengujian terhadap para responden berdasarkan indikator-indikator tingkat kesejahteraan dari BKKBN untuk mengetahui sejauh mana tingkat



kesejahteraan para responden pasca pengimplementasian PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 5.6 Komposisi Responden Berdasarkan Kategori Penerima Program BLT  
Sumber : Data Primer Lampiran 4.4

## 2. Analisis Deskriptif Variabel Bebas (Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan)

Variabel implementasi PNPM Mandiri Perdesaan (variabel X) dari penelitian ini terdiri dari empat dimensi, yaitu : dimensi kebijakan yang diidealiskan (*idealized policy*), dimensi kelompok sasaran (*target groups*), dimensi implementasi organisasi (*implementing organization*), dan dimensi faktor-faktor lingkungan (*inveronmental factors*). Masing-masing dimensi tersebut dirinci kembali kepada berbagai indikator sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel operasionalisasi variabel penelitian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 260 orang responden, maka diperoleh gambaran untuk variabel Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan melalui dimensi kebijakan yang diidealiskan (*ideakized policy*) yang diukur melalui sembilan butir pernyataan

dengan lima pilihan jawaban, diperoleh distribusi frekuensi pilihan jawaban dari dimensi kebijakan yang diidealiskan (*ideakized policy*) sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Bebas melalui Dimensi Kebijakan yang Diidealiskan (*ideakized policy*)

No	Indikator	Jumlah Responden	Frekuensi Pilihan Jawaban					Jumlah Skor	Skor Maksimal	Persentase (%)
			A (5)	B (4)	C (3)	D (2)	E (1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pembangunan manusia	260	126	117	15	2	0	1.147	1.300	88,23
2.	Otonomi / Desentralisasi	260	126	120	14	0	0	1.152	1.300	88,62
3.	Berorientasi masy miskin	260	74	126	56	4	0	1.050	1.300	80,77
4.	Partisipasi	260	97	148	15	0	0	1.122	1.300	86,31
5.	Kesetaraan gender	260	108	148	4	0	0	1.144	1.300	88,00
6.	Demokratis	260	132	107	14	5	2	1.142	1.300	87,85
7.	Transparansi / Akuntabel	260	94	117	48	1	0	1.084	1.300	83,38
8.	Prioritas	260	109	126	20	3	2	1.117	1.300	85,92
9.	Keberlanjutan	260	91	138	28	3	0	1.097	1.300	84,38
<b>Jumlah</b>			<b>957</b>	<b>1.147</b>	<b>214</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>10.055</b>	<b>11.700</b>	<b>85,94</b>

Sumber : Data Primer Lampiran 1

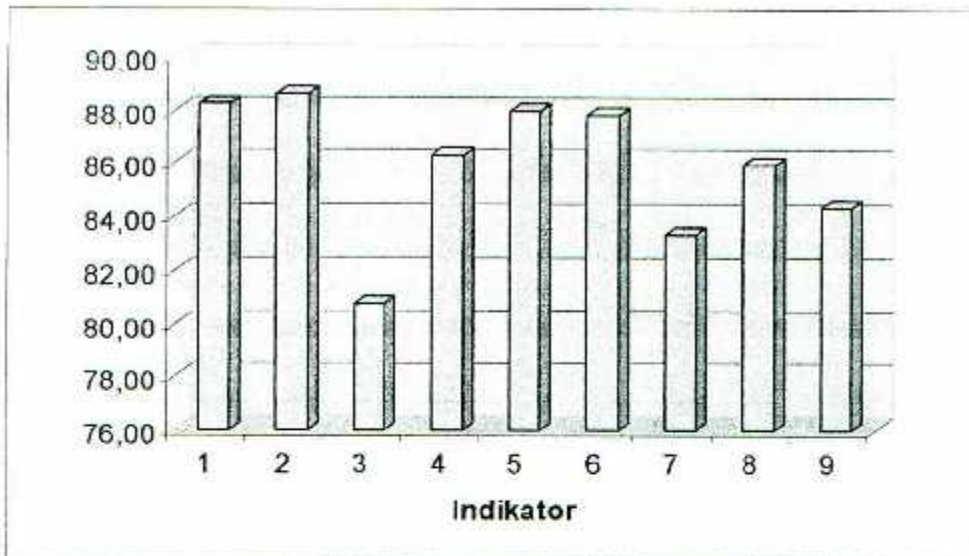
Tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa intensitas jawaban responden tertinggi terhadap dimensi kebijakan yang diidealiskan (*ideakized policy*) diperoleh pada pilihan jawaban B (skor 4) dengan jumlah responden yang memilih jawaban ini sebanyak sebanyak 1.147 kali. Dari kesembilan indikator pada dimensi ini, hampir kesemua indikator menunjukkan tingkat penilaian dengan kategori penilaian "sangat baik". Indikator yang memiliki penilaian tertinggi terdapat pada indikator kedua (otonomi / desentralisasi) melalui pernyataan "masyarakat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut mengelola kegiatan di PNPM Mandiri Perdesaan" dengan memperoleh skor



sebesar 1.152 atau dengan tingkat persentase 88,62 persen dari skor maksimal. Sedangkan skor penilaian terendah pada dimensi kebijakan yang diidealiskan (*idealized policy*) berada pada indikator ketiga (berorientasi kepada masyarakat miskin) dengan pernyataan "kegiatan-kegiatan pada PNPB Mandiri Perdesaan telah mengakomodir kebutuhan dasar masyarakat miskin" dengan perolehan skor sebesar 1.050 atau mencapai 80,77 persen dari skor maksimal. Walaupun indikator ketiga memperoleh skor nilai terendah, namun berdasarkan tingkat interval penilaian, indikator ketiga (berorientasi kepada masyarakat miskin) masih termasuk dalam kategori penilaian yang "baik".

Hasil ini memberikan gambaran bahwa pengimplementasian dimensi pertama yaitu kebijakan yang diidealiskan (*idealized policy*) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya di Kecamatan Luak, Situjuh dan Guguak sebagai sampel area penelitian telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari sembilan indikator pada dimensi kebijakan yang diidealiskan (*idealized policy*), ternyata delapan indikator berada dalam kategori penilaian "sangat baik" dan hanya satu indikator yang berada dalam kategori penilaian "baik". Bila dilihat dari skor penilaian keseluruhan dari kesembilan indikator sebesar 10.055 atau mencapai 85,94 persen dari skor nilai maksimal pada dimensi kebijakan yang diidealiskan, maka dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian dimensi ini memperoleh penilaian "sangat baik". Secara lebih jelas mengenai tinggi rendahnya penilaian para responden terhadap dimensi pertama kebijakan yang diidealiskan (*idealized policy*) dapat diuraikan melalui diagram sebagai berikut :





Gambar 5.7 Persentase Skor Jawaban Responden pada Dimensi Kebijakan yang Diidealiskan  
 Sumber : Data Primer pada Tabel 5.1

Namun demikian, agar pengimplementasian PNPM Mandiri Perdesaan dapat lebih sempurna lagi dimasa yang akan datang, para pelaku kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan lebih dapat mengarahkan masyarakat perdesaan untuk memilih dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat miskin yang akan memberikan manfaat signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup para RTM di perdesaan.

Selanjutnya dimensi kedua dari variabel implementasi PNPM Mandiri Perdesaan adalah dimensi kelompok sasaran (*target groups*) yang terdiri dari empat indikator yang diukur melalui empat pernyataan dengan lima pilihan jawaban yang diajukan kepada 260 orang responden. Keempat indikator dalam dimensi ini adalah indikator motivasi masyarakat terhadap kegiatan, indikator dukungan masyarakat terhadap kegiatan, indikator keterlibatan masyarakat dalam kegiatan, dan indikator swadaya masyarakat dalam kegiatan. Adapun distribusi frekuensi pilihan jawaban dari 260 orang responden terhadap indikator-

indikator pada dimensi kelompok sasaran (*target groups*) dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2  
Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Bebas melalui  
Dimensi Kelompok Sasaran (*target groups*)

No	Indikator	Jumlah Responden	Frekuensi Pilihan Jawaban					Jumlah Skor	Skor Maksimal	Persentase (%)
			A (5)	B (4)	C (3)	D (2)	E (1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Motivasi masyarakat	260	79	160	17	4	0	1.094	1.300	84,15
2.	Dukungan masyarakat	260	128	114	17	1	0	1.149	1.300	88,38
3.	Keterlibatan masyarakat	260	102	127	28	3	0	1.108	1.300	85,23
4.	Swadaya masyarakat	260	84	144	27	5	0	1.087	1.300	83,62
<b>Jumlah</b>			<b>393</b>	<b>545</b>	<b>89</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>4.438</b>	<b>5.200</b>	<b>85,35</b>

Sumber : Data Primer Lampiran 1

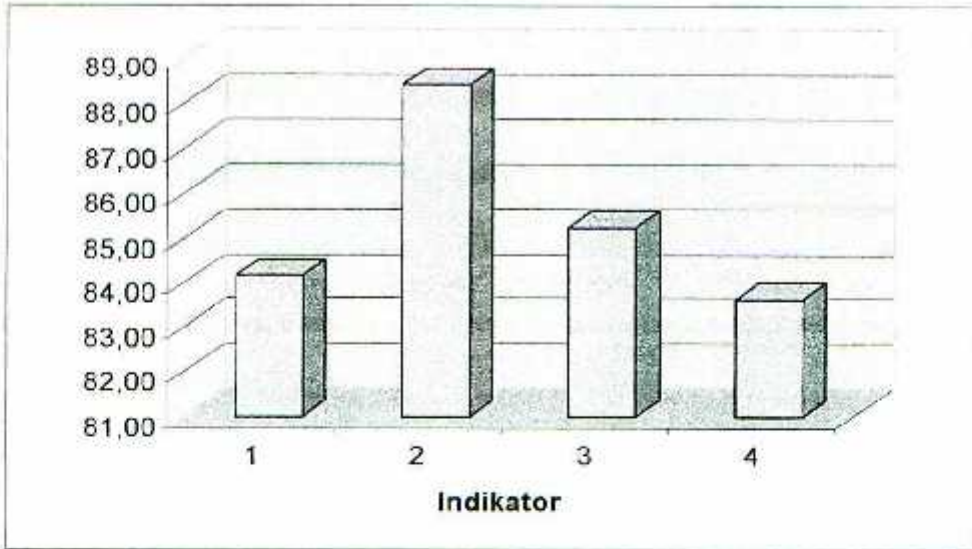
Pada tabel 5.2 diatas terlihat bahwa intensitas jawaban tertinggi para responden terhadap pernyataan-pernyataan pada dimensi kelompok sasaran (*target groups*) berada pada pilihan jawaban B (skor 4) dengan jumlah responden yang memilih jawaban ini sebanyak sebanyak 545 kali. Berdasarkan jumlah skor dan besaran persentase skor yang diperoleh pada keempat indikator, maka dapat diasumsikan bahwa seluruh indikator memperoleh tingkat penilaian dengan kategori "sangat baik". Penilaian tertinggi pada dimensi kelompok sasaran (*target groups*) diperoleh indikator kedua (dukungan masyarakat pada kegiatan) melalui pernyataan "masyarakat sangat mendukung kegiatan-kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan" dengan capaian skor sebesar 1.149 atau mencapai 88,38 persen dari skor maksimal. Sedangkan penilaian terendah pada dimensi kelompok sasaran (*target groups*) berada pada indikator keempat (swadaya masyarakat pada kegiatan) dengan pernyataan "kontribusi / peranan



masyarakat dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan sangat terlihat" dengan skor sebesar 1.087 atau mencapai 83,62 persen dari skor maksimal. Berbicara mengenai swadaya masyarakat perdesaan terhadap keberhasilan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, berdasarkan hasil pengamatan dilapangan maka penulis mengasumsikan bahwa tingkat swadaya masyarakat dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui berbagai partisipasi sumbangan bersifat non materil seperti tenaga, pikiran dan waktu telah cukup baik. Salah satu bentuk sumbangan masyarakat yang mencerminkan baiknya partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah dengan adanya semangat gotong-royong dari kaum ibu-ibu dalam menyediakan makanan ringan disetiap rapat, pertemuan dan pelaksanaan kegiatan walaupun dana untuk hal tersebut tidak tersedia dalam anggaran kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Bentuk partisipasi lain yang diberikan masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan adalah tingginya tingkat kehadiran warga masyarakat dalam memenuhi undangan rapat maupun sosialisasi program PNPM Mandiri Perdesaan.

Secara lebih jelas mengenai tinggi rendahnya penilaian para responden terhadap dimensi kedua kelompok sasaran (*target groups*) dapat diuraikan melalui diagram sebagai berikut :





Gambar 5.8 Persentase Skor Jawaban Responden pada Dimensi Kelompok Sasaran  
 Sumber : Data Primer pada Tabel 5.2

Berdasarkan jumlah skor penilaian keseluruhan indikator dari dimensi kelompok sasaran (*target groups*) sebesar 4.438 atau mencapai 85,35 persen dari skor maksimal, maka hasil tersebut mengasumsikan bahwa pengimplementasian dimensi kelompok sasaran (*target groups*) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya pada sampel area penelitian di Kecamatan Luak, Situjuah dan Guguak telah terlaksana dengan kategori penilaian "sangat baik". Namun demikian, para pelaksana kegiatan (*implementor*) hendaknya terus memompa motivasi masyarakat agar senantiasa berpartisipasi dan melibatkan diri secara aktif pada setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Dimensi ketiga dari variabel implementasi PNPM Mandiri Perdesaan adalah dimensi implementasi organisasi (*implementing organization*) yang terdiri dari empat indikator sebagai berikut : indikator pelaksanaan kegiatan oleh implementor sesuai ketentuan, indikator pemahaman implementor terhadap kegiatan, indikator transparansi implementor dalam melaksanakan kegiatan dan

indikator ketepatan pengorganisasian pelaksana kegiatan. Melalui kuesioner yang disebarakan kepada 260 orang responden di tiga kecamatan, maka indikator-indikator tersebut selanjutnya dinilai melalui empat pernyataan dengan lima pilihan jawaban dengan skor yang berbeda. Adapun distribusi frekuensi pilihan jawaban dari 260 orang responden terhadap indikator-indikator pada dimensi implementasi organisasi (*implementing organization*) dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3  
Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Bebas melalui Dimensi Implementasi Organisasi (*implementing organization*)

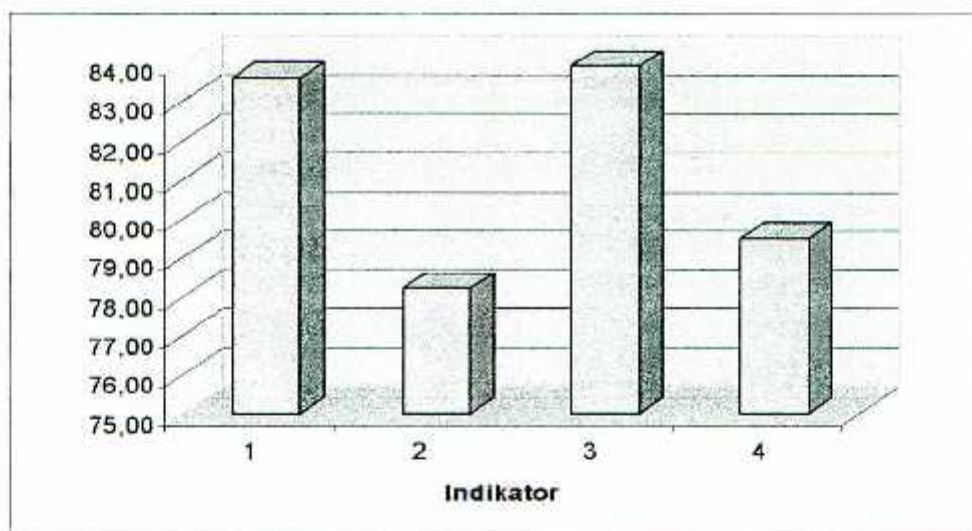
No	Indikator	Jumlah Responden	Frekuensi Pilihan Jawaban					Jumlah Skor	Skor Maksimal	Persentase (%)
			A (5)	B (4)	C (3)	D (2)	E (1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pelaksanaan kegiatan oleh implementor	260	92	131	31	4	2	1.087	1.300	83,62
2.	Pemahaman implementor thd kegiatan	260	59	128	64	9	0	1.017	1.300	78,23
3.	Transparansi implementor	260	92	133	29	6	0	1.091	1.300	83,92
4.	Ketepatan pengorganisasian	260	58	143	54	5	0	1.034	1.300	79,54
<b>Jumlah</b>			<b>301</b>	<b>535</b>	<b>178</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>4.229</b>	<b>5.200</b>	<b>81,33</b>

Sumber : Data Primer Lampiran 1

Tabel 5.3 diatas menunjukkan bahwa pada dimensi implementasi organisasi (*implementing organization*) intensitas pilihan jawaban tertinggi dari para responden berada pada pilihan jawaban B (skor 4) sebanyak 535 kali. Berdasarkan jumlah skor dan persentase yang diperoleh dari masing-masing indikator, dapat diasumsikan bahwa indikator pelaksanaan kegiatan oleh implementor sesuai ketentuan dan indikator transparansi implementor dalam melaksanakan kegiatan memperoleh kategori penilaian "sangat baik" dengan



perolehan skor nilai pada masing-masing indikator sebesar 1.087 dan 1.091, atau mencapai 83,62 dan 83,92 persen dari skor maksimal. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu indikator pemahaman implementor terhadap kegiatan dan indikator ketepatan pengorganisasian pelaksana kegiatan memperoleh kategori penilaian "baik". Skor yang diperoleh kedua indikator tersebut adalah sebesar 1.017 dan 1.034, atau mencapai 78,23 dan 79,54 persen dari skor maksimal. Secara lebih jelas mengenai tinggi rendahnya penilaian para responden terhadap dimensi ketiga implementasi organisasi (*implementing organization*) dapat diuraikan melalui diagram sebagai berikut :



Gambar 5.9 Persentase Skor Jawaban Responden pada Dimensi Implementasi Organisasi

Sumber : Data Primer pada Tabel 5.3

Dibandingkan dua dimensi sebelumnya (dimensi kebijakan yang diidealiskan dan dimensi kelompok sasaran) yang hampir keseluruhan indikatornya memperoleh penilaian "sangat baik" dari para responden, pada dimensi implementasi organisasi (*implementing organization*) sedikit mengalami penurunan. Namun demikian, bila dilihat dari jumlah keseluruhan skor penilaian dari keempat indikator pada dimensi ini sebesar 4.229 atau mencapai 81,33



persen dari skor maksimal, maka dimensi implementasi organisasi (*implementing organization*) masih termasuk dalam kategori penilaian "sangat baik".

Dari keempat indikator pada dimensi implementasi organisasi (*implementing organization*), penilaian tertinggi berada pada indikator transparansi implementor dalam melaksanakan kegiatan melalui pernyataan "para pelaksana kegiatan telah melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan secara transparan terhadap masyarakat". Sedangkan penilaian terendah pada dimensi implementasi organisasi (*implementing organization*) berada pada indikator pemahaman implementor terhadap kegiatan melalui pernyataan "para pelaksana kegiatan telah memahami secara mendalam tentang kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan".

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan para responden tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa masyarakat perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengetahui dan mengikuti proses pengimplementasian kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah mereka dengan sangat baik. Hal tersebut dapat terjadi sebagai akibat adanya transparansi pelaksanaan kegiatan oleh para implementor. Dari hasil pengamatan penulis di lapangan, salah satu bentuk sarana penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai wujud transparansi adalah melalui penempelan informasi pada papan-papan pengumuman PNPM Mandiri Perdesaan yang telah tersedia di setiap jorong, serta keaktifan para kader-kader PNPM Mandiri Perdesaan dalam menyampaikan informasi secara lisan kepada masyarakat pada setiap kesempatan. Perlu penulis gambarkan pula mengenai adanya salah satu kebiasaan masyarakat perdesaan

terutama kaum pria di Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah kebiasaan untuk berkumpul di "lapau" (sejenis warung kopi) untuk saling bertukar informasi dan melepas lelah setelah beraktivitas, sehingga melalui sarana ini para kader PNPM Mandiri Perdesaan dapat menyampaikan berbagai informasi dengan mudah kepada masyarakat tanpa harus mengumpulkan masyarakat terlebih dahulu.

Selanjutnya mengingat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) ini baru diimplementasikan pertama kalinya di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2008, maka kategori penilaian "baik" dari para responden mengenai pemahaman para pelaksana kegiatan (implementor) terhadap kegiatan yang dikelolanya merupakan suatu hasil yang dapat dimaklumi. Seiring dengan perjalanan program ini dari tahun ke tahunnya, diharapkan pemahaman para pelaksana kegiatan terhadap kegiatan-kegiatan yang mereka kelola akan semakin baik sehingga mampu bekerja secara profesional dibidangnya. Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut adalah melalui pemberian pendidikan dan pelatihan secara intensif serta mengikuti berbagai rapat-rapat koordinasi di tingkat kabupaten sehingga pembahasan dan pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi tentunya akan lebih memperkaya dan mempertajam wawasan para pelaksana kegiatan dimasa mendatang dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut. Tujuan akhir yang diharapkan nantinya adalah dengan semakin baiknya pengelolaan kegiatan oleh para pelaksana kegiatan di lapangan, maka diharapkan kualitas dari PNPM Mandiri Perdesaan pun akan semakin baik sehingga dapat memberikan manfaat yang



optimal terhadap masyarakat perdesaan khususnya masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanggulangan kemiskinan.

Dimensi terakhir atau keempat dari variabel implementasi PNPM Mandiri Perdesaan adalah dimensi faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*) yang terbagi atas 4 (empat) indikator yaitu : indikator kegiatan mempengaruhi perilaku kehidupan sosial masyarakat lokal, indikator kegiatan mempengaruhi / dipengaruhi eksistensi kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lokal, indikator kegiatan dipengaruhi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, dan indikator motif ekonomi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Keempat indikator tersebut selanjutnya diukur melalui pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada 260 orang responden dengan lima pilihan jawaban. Sedikit berbeda dengan indikator-indikator pada dimensi sebelumnya, pada dimensi faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*) salah satu indikatornya yaitu indikator Kegiatan mempengaruhi / dipengaruhi eksistensi kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lokal diukur melalui dua pernyataan. Hal ini berarti jumlah pernyataan yang terdapat dalam dimensi faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*) berjumlah lima pernyataan. Adapun distribusi frekuensi pilihan jawaban dan persentase jawaban dari 260 orang responden terhadap pernyataan yang ada pada dimensi faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*) dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 5.4

Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Bebas melalui Dimensi Faktor Lingkungan (*environmental factors*)

No	Indikator	Jumlah Responden	Frekuensi Pilihan Jawaban					Jumlah Skor	Skor Maksimal	Persentase (%)
			A (5)	B (4)	C (3)	D (2)	E (1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kegiatan mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal	260	42	145	48	24	1	983	1.300	75,69
2.	Kegiatan mempengaruhi kebudayaan masyarakat	260	25	105	54	63	13	846	1.300	65,08
3.	Kegiatan mempengaruhi kepercayaan masyarakat	260	41	149	41	21	8	974	1.300	74,92
4.	Kegiatan dipengaruhi kepentingan kelompok	260	64	75	26	76	19	869	1.300	66,85
5.	Motif ekonomi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan	260	67	154	11	25	3	1037	1.300	79,77
<b>Jumlah</b>			<b>239</b>	<b>628</b>	<b>180</b>	<b>209</b>	<b>44</b>	<b>4.709</b>	<b>6.500</b>	<b>72,45</b>

Sumber : Data Primer Lampiran 1

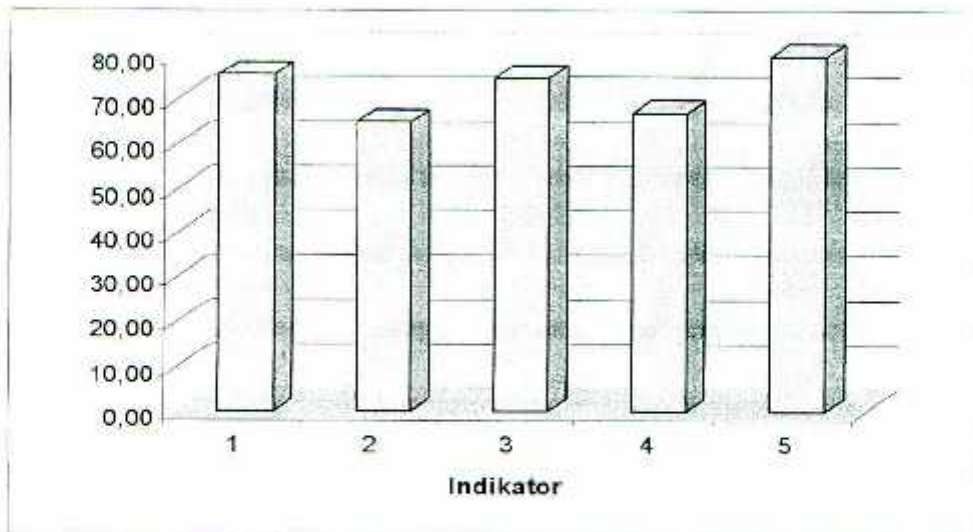
Dari kelima pernyataan yang diajukan kepada 260 orang responden pada dimensi faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*), intensitas pilihan jawaban responden tertinggi berada pada pilihan jawaban B (skor 4), yaitu sebanyak 628 kali. Dari empat indikator dengan lima pernyataan yang diajukan kepada responden, indikator motif ekonomi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan melalui pernyataan "motif ekonomi sangat mempengaruhi keterlibatan masyarakat perdesaan dalam melaksanakan kegiatan PNPB Mandiri Perdesaan" memperoleh skor nilai tertinggi sebesar 983 atau mencapai 75,69 persen dari skor maksimal. Untuk nilai dan tingkat persentase yang diperoleh tersebut,

indikator ini memperoleh tingkat penilaian dalam kategori "baik". Sedangkan indikator yang memperoleh nilai terendah terdapat pada salah satu pernyataan dari indikator kedua yaitu : kegiatan mempengaruhi / dipengaruhi eksistensi kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lokal melalui pernyataan "pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sangat mempengaruhi eksistensi kebudayaan / kebiasaan masyarakat setempat" dengan jumlah skor sebesar 846 atau mencapai 65,08 persen dari skor maksimal. Dengan jumlah nilai dan tingkat persentase tersebut, indikator ini masih tergolong dalam kategori penilaian "baik".

Melalui ungkapan kedua indikator diatas yang memiliki skor penilaian tertinggi dan terendah pada dimensi faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*), diperoleh gambaran bahwa motif ekonomi ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Khususnya dalam kegiatan-kegiatan fisik baik dibidang pembangunan sarana dan prasarana dasar, bidang pendidikan dan bidang kesehatan dengan terbukanya lapangan kerja baru sekaligus memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat miskin perdesaan melalui pemberian upah harian orang kerja (HOK) bagi tenaga kerja RTM baik laki-laki maupun perempuan yang besarnya ditetapkan melalui musyawarah desa. Sedangkan dalam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kelompok SPP, ternyata masih banyak para RTM yang belum memanfaatkan bantuan permodalan tersebut, dengan alasan tingginya keraguan para RTM untuk mampu mengembalikan dana pinjaman modal tersebut tepat waktu. Dalam hali ini penulis melihat belum

terbentuknya usaha-usaha produktif secara berkelompok merupakan salah satu penyebabnya. Minimnya keahlian yang dimiliki para RTM serta sulitnya memperoleh pasar terhadap produk yang dihasilkan akan menyulitkan para RTM dalam merintis sebuah usaha baru secara perorangan. Sedangkan indikator kedua dengan jumlah skor 846 atau hanya mencapai 65,08 persen dari skor maksimal, melalui pernyataan "pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sangat mempengaruhi eksistensi kebudayaan / kebiasaan masyarakat setempat" merupakan indikator yang memperoleh skor terendah dalam dimensi ini. Dan bila dibandingkan dengan pernyataan selanjutnya dalam indikator yang sama yaitu "kebudayaan / kebiasaan masyarakat setempat sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan" justru memperoleh nilai skor penilaian yang lebih tinggi sebesar 974 atau mencapai 74,92 persen dari skor maksimal, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari kedua pernyataan tersebut bahwa kebudayaan / adat istiadat masyarakat setempatlah yang justru cenderung lebih mempengaruhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan. Secara lebih jelas mengenai tinggi rendahnya penilaian para responden terhadap dimensi keempat faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*) dapat diuraikan melalui diagram sebagai berikut :





Gambar 5.10 Persentase Skor Jawaban Responden pada Dimensi Faktor Lingkungan

Sumber : Data Primer pada Tabel 5.4

Dari hasil analisis deskriptif terhadap variabel bebas; implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari empat dimensi yang ada ternyata tiga dimensi telah diimplementasikan dengan kategori penilaian "sangat baik" dan satu variabel diimplementasikan dengan kategori penilaian "baik". Namun demikian, bila dilihat dari skor keseluruhan dari keempat dimensi pada variabel bebas; implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dengan jumlah skor 23.431 atau mencapai 81,93 persen dari skor maksimal dan memperoleh kategori penilaian "sangat baik", maka dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilaksanakan dengan sangat baik.

### 3. Analisis Deskriptif Variabel Terikat (Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan)

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 260 orang responden, maka diperoleh gambaran untuk variabel kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan yang diukur melalui sembilan belas indikator ukuran keluarga sejahtera dari BKKBN dengan lima pilihan jawaban, maka diperoleh distribusi frekuensi pilihan jawaban sebagaimana yang terurai pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.5  
Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Terikat  
Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan

No	Indikator	Frekuensi Pilihan Jawaban					Jumlah Skor	Skor Maksimal	Persentase (%)
		A (5)	B (4)	C (3)	D (2)	E (1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Agama yang sama	233	19	8	0	0	1265	1300	97,31
2.	Beribadah secara teratur	191	40	29	0	0	1202	1300	92,46
3.	Makan 3 kali sehari	189	33	38	0	0	1191	1300	91,62
4.	Pakaian berbeda	137	47	68	2	6	1087	1300	83,62
5.	Lantai rumah bukan tanah	73	46	99	11	31	899	1300	69,15
6.	Sakit ke puskesmas	121	59	80	0	0	1081	1300	83,15
7.	Makan daging 1 kali seminggu	55	45	136	9	15	896	1300	68,92
8.	Pakaian bari 1 kali setahun	107	53	85	6	9	1023	1300	78,69
9.	Rumah cukup luas	7	37	183	31	2	796	1300	61,23
10.	Keluarga bisa baca tulis	211	26	22	1	0	1227	1300	94,38
11.	Anak-anak bersekolah	174	22	48	4	12	1122	1300	86,31
12.	Memakai alat kontrasepsi	102	20	96	8	34	928	1300	71,38
13.	Mampu menabung	42	34	143	11	30	827	1300	63,62
14.	Rekreasi 1 kali dalam 6 bulan	11	14	114	36	85	610	1300	46,92
15.	Berlangganan surat kabar	7	4	63	43	143	469	1300	35,08
16.	Mempunyai televisi	112	83	43	0	22	1043	1300	80,23
17.	Mempunyai kend. Pribadi	10	5	27	44	174	413	1300	31,77
18.	Sumbangan secara teratur	11	17	167	28	37	717	1300	55,15
19.	Pengurus org. masyarakat	8	13	196	18	25	741	1300	57,00
<b>Jumlah</b>		<b>1801</b>	<b>617</b>	<b>1645</b>	<b>252</b>	<b>625</b>	<b>17.537</b>	<b>24.700</b>	<b>71,00</b>

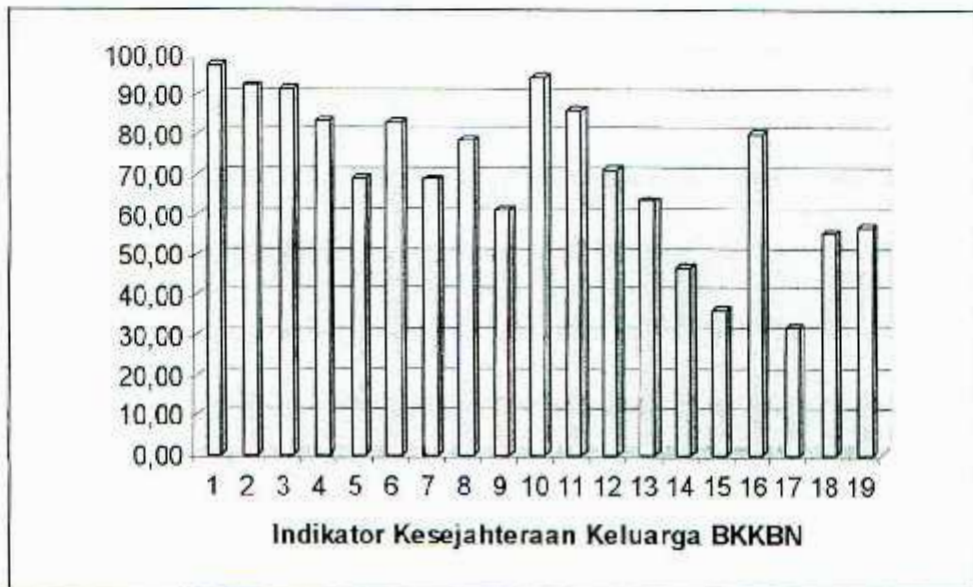
Sumber : Data Primer Lampiran 8



Melalui 19 indikator yang selanjutnya dijabarkan kepada 19 pernyataan yang diajukan kepada 260 orang responden, ternyata intensitas jawaban responden tertinggi berada pada pilihan jawaban A (skor 5), yaitu sebanyak 1.801 kali. Dari kesembilan belas indikator ukuran kesejahteraan keluarga tersebut, indikator yang memperoleh skor jawaban tertinggi diperoleh indikator agama yang sama melalui pernyataan "seluruh anggota keluarga senantiasa menjalankan sariat dari agama yang sama" dengan jumlah skor sebesar 1.265 atau mencapai 97,31 persen dari skor maksimal. Berdasarkan nilai persentase yang diperoleh tersebut, dan mengacu kepada kriteria penilaian dimana skor yang mencapai 0% - 20% memperoleh penilaian sangat kurang, 21% - 40% memperoleh penilaian kurang, 41% - 60% memperoleh penilaian cukup, 61% - 80% memperoleh penilaian baik dan skor yang mencapai 81% - 100% dari skor maksimal memperoleh penilaian sangat baik, maka atas dasar kriteria tersebut indikator ini memperoleh penilaian dengan kategori "sangat baik". Sedangkan skor penilaian terendah berada pada indikator mempunyai kendaraan pribadi melalui pernyataan "dalam bepergian keluarga senantiasa menggunakan mobil pribadi" dengan jumlah skor sebesar 413 atau hanya mencapai 31,77 persen dari skor maksimal sehingga memperoleh penilaian dalam kategori "kurang". Namun demikian berdasarkan jumlah skor keseluruhan yang diperoleh dari kesembilan belas indikator sebesar 17.537 atau mencapai 71,00 persen dari skor maksimal, maka dapat ditarik kesimpulan awal bahwa tingkat kesejahteraan keluarga para responden dalam penelitian telah menunjukkan tingkat kesejahteraan keluarga yang cukup baik.



Untuk melihat gambaran yang lebih jelas terhadap persentase kemampuan para responden dalam memenuhi kesembilan belas indikator ukuran keluarga sejahtera menurut BKKBN, terlihat pada gambar diagram sebagai berikut :



Gambar 5.11 Persentase Penilaian Kemampuan Responden Dalam Memenuhi Indikator kesejahteraan Keluarga Menurut BKKBN  
Sumber : Data Primer pada Tabel 5.5

Sedangkan untuk mengetahui secara lebih spesifik kemampuan para responden dalam memenuhi indikator-indikator ukuran kesejahteraan keluarga dari Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) yang terbagi atas empat tingkatan keluarga sejahtera yaitu; keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus maka perlu dilakukan perhitungan hasil skor atas pilihan jawaban dari para responden per tingkatan tersebut. Selanjutnya bila para responden telah mampu memenuhi indikator 1 – 6 dengan kategori penilaian "baik" atau "sangat baik", maka dapat diasumsikan bahwa responden tersebut telah berada dalam lingkaran keluarga sejahtera I, namun bila responden tersebut hanya mampu memenuhi indikator-

indikator pada keluarga sejahtera I dengan hasil penilaian “cukup” atau “kurang” dan atau “sangat kurang”, maka dapat diasumsikan bahwa responden tersebut masih berada dalam kategori keluarga pra sejahtera. Seterusnya bila para responden mampu memenuhi indikator 7 – 12 dengan “baik atau sangat baik”, maka responden bersangkutan dapat dikategorikan pada keluarga sejahtera II. Dan begitu pula seterusnya dalam pengkategorian keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus, para responden harus mampu memenuhi dengan penilaian “baik atau sangat baik” terhadap indikator 13 – 17 (sejahtera III) dan indikator 18 dan 19 (sejahtera III plus).

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 260 responden untuk mengukur sejauh mana tingkat kesejahteraan para responden berdasarkan enam indikator ukuran keluarga sejahtera I dengan lima pilihan jawaban, maka diperoleh distribusi frekuensi pilihan jawaban sebagaimana yang diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.6  
Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Terikat  
Mengacu Pada Indikator-indikator Keluarga Sejahtera I

No	Indikator	Frekuensi Pilihan Jawaban					Jumlah Skor	Skor Maksimal	Persentase (%)
		A (5)	B (4)	C (3)	D (2)	E (1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Agama yang sama	233	19	8	0	0	1265	1300	97,31
2.	Beribadah secara teratur	191	40	29	0	0	1202	1300	92,46
3.	Makan 3 kali sehari	189	33	38	0	0	1191	1300	91,62
4.	Pakaian berbeda	137	47	68	2	6	1087	1300	83,62
5.	Lantai rumah bukan tanah	73	46	99	11	31	899	1300	69,15
6.	Sakit ke puskesmas	121	59	80	0	0	1081	1300	83,15
<b>Jumlah</b>		<b>944</b>	<b>244</b>	<b>322</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>6725</b>	<b>7800</b>	<b>86,22</b>

Sumber : Data Primer Lampiran 8

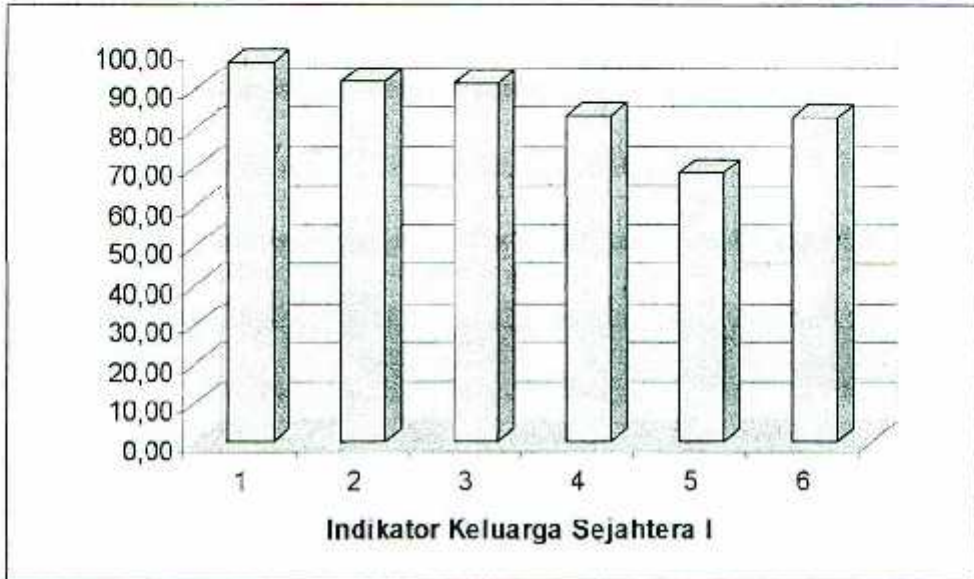


Pada tabel diatas terlihat bahwa intensitas jawaban tertinggi berada pada pilihan jawaban A (skor 5) dengan intensitas responden yang memilih jawaban tersebut sebanyak 944 kali. Berdasarkan skor nilai keseluruhan yang berjumlah 6.725 atau mencapai 86,22 persen dari skor maksimal, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan para responden dalam memenuhi dan melaksanakan indikator-indikator pada tingkatan keluarga sejahtera I telah dapat dipenuhi dengan kategori penilaian "sangat baik". Namun untuk mengetahui secara lebih rinci bagaimana gambaran kemampuan responden dalam memenuhi keenam indikator ukuran tersebut, maka dapat diungkapkan bahwa dari enam indikator yang ada, lima indikator memperoleh penilaian "sangat baik" yaitu; indikator memiliki agama yang sama, dapat beribadah secara teratur, mampu untuk makan tiga kali dalam sehari, memiliki pakaian yang berbeda didalam dan diluar rumah, serta senantiasa berobat ke rumah sakit / puskesmas bila menderita sakit. Sedangkan indikator lantai rumah bukan beralaskan tanah memperoleh jawaban terendah dengan skor 899 atau mencapai 69,16 persen dari skor maksimal, namun masih berada dalam kategori penilaian yang "baik".

Dari hasil penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa para responden telah mampu untuk memenuhi dan melaksanakan indikator-indikator tingkatan keluarga sejahtera I dengan sangat baik, hanya saja pada indikator kelima menunjukkan bahwa rata-rata lantai rumah para responden secara keseluruhan masih ada yang beralaskan tanah. Berdasarkan pengamatan dilapangan, lantai rumah para responden yang masih beralaskan tanah terdapat pada ruangan dapur dan teras depan.



Untuk melihat gambaran kemampuan para responden dalam memenuhi indikator-indikator ukuran keluarga sejahtera I, terlihat pada gambar diagram sebagai berikut :



Gambar 5.12 Persentase Penilaian Kemampuan Responden Dalam Memenuhi Indikator Keluarga Sejahtera I  
Sumber : Data Primer pada Tabel 5.6

Seterusnya dari hasil penyebaran kuesioner kepada 260 responden untuk mengukur sejauh mana tingkat kesejahteraan para responden berdasarkan enam indikator ukuran pada tingkatan keluarga sejahtera II (indikator 7 - 12) dengan lima pilihan jawaban, diperoleh distribusi frekuensi pilihan jawaban sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut :

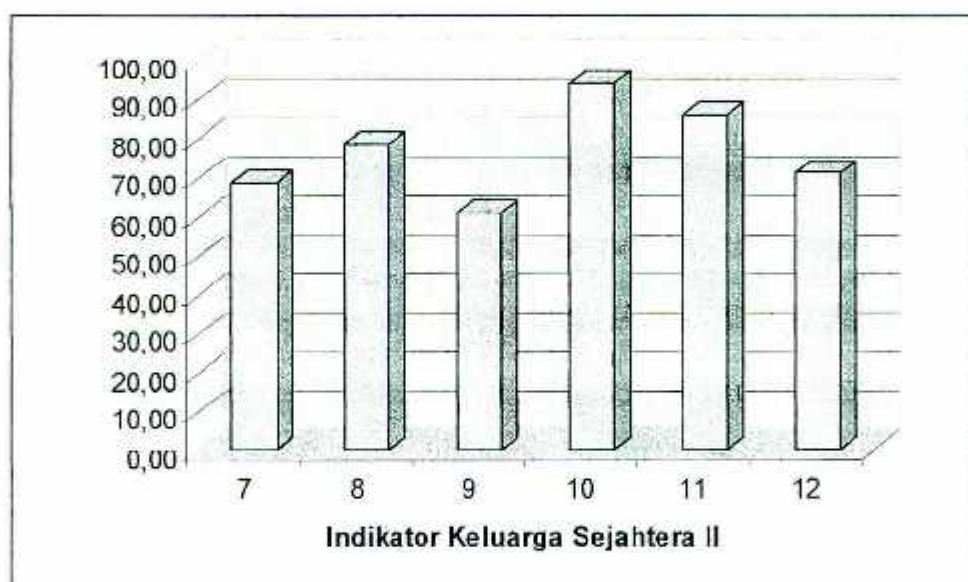
Tabel 5.7  
Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Terikat  
Mengacu Pada Indikator-indikator Keluarga Sejahtera II

No	Indikator	Frekuensi Pilihan Jawaban					Jumlah Skor	Skor Maksimal	Persentase (%)
		A (5)	B (4)	C (3)	D (2)	E (1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Makan daging 1 kali seminggu	55	45	136	9	15	896	1300	68,92
8.	Pakaian bari 1 kali setahun	107	53	85	6	9	1023	1300	78,69
9.	Rumah cukup luas	7	37	183	31	2	796	1300	61,23
10.	Keluarga bisa baca tulis	211	26	22	1	0	1227	1300	94,38
11.	Anak-anak bersekolah	174	22	48	4	12	1122	1300	86,31
12.	Memakai alat kontrasepsi	102	20	96	8	34	928	1300	71,38
<b>Jumlah</b>		<b>656</b>	<b>203</b>	<b>570</b>	<b>59</b>	<b>72</b>	<b>5992</b>	<b>7800</b>	<b>76,82</b>

Sumber : Data Primer Lampiran 8

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa intensitas jawaban responden tertinggi berada pilihan jawaban A (skor 5) sebanyak 656 kali. Bila dilihat dari jumlah skor keseluruhan sebesar 5.992 atau mencapai 76,82 persen dari skor maksimal dengan kategori penilaian "baik", maka dapat diasumsikan bahwa kemampuan para responden untuk memenuhi indikator-indikator pada keluarga sejahtera II dinilai telah memiliki kemampuan yang baik. Namun untuk lebih jelasnya mengenai kemampuan para responden dalam memenuhi indikator-indikator pada tingkatan keluarga sejahtera dapat diuraikan bahwa dari enam indikator yang diajukan, dua indikator yaitu; indikator seluruh anggota keluarga bisa membaca dan menulis dan indikator seluruh anak-anak bersekolah memperoleh prediket penilaian "sangat baik". Hal ini menunjukkan bahwa apresiasi para responden terhadap kebutuhan pendidikan sudah sangat baik. Sedangkan indikator lainnya yaitu; indikator mampu untuk makan daging sekali dalam seminggu, mampu membeli pakaian baru sekali dalam setahun, memiliki rumah yang cukup luas dan memakai alat kontrasepsi berdasarkan skor dan persentase nilai yang diperoleh mendapatkan penilaian dengan kategori "baik".

Dari hasil pilihan jawaban responden tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa para responden telah mampu dan melaksanakan keenam indikator pada tingkatan keluarga sejahtera II dengan baik, namun para responden terlihat lebih mengutamakan kebutuhan pendidikan bagi anggota keluarganya dibandingkan kebutuhan-kebutuhan lain yang terurai pada tingkatan keluarga sejahtera II. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas terhadap penilaian kemampuan para responden dalam memenuhi dan melaksanakan keenam indikator pada tingkatan keluarga sejahtera II, dapat dilihat melalui diagram sebagai berikut :



Gambar 5.13 Persentase Penilaian Kemampuan Responden Dalam Memenuhi Indikator Keluarga Sejahtera II  
 Sumber : Data Primer pada Tabel 5.7

Selanjutnya dari hasil jawaban 260 responden terhadap pernyataan-pernyataan kuesioner yang mengacu pada indikator-indikator tingkat keluarga sejahtera III dengan lima pilihan jawaban, maka diperoleh distribusi frekuensi pilihan jawaban sebagaimana yang diuraikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 5.8

Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Terikat  
Mengacu Pada Indikator-indikator Keluarga Sejahtera III

No	Indikator	Frekuensi Pilihan Jawaban					Jumlah Skor	Skor Maksimal	Persentase (%)
		A (5)	B (4)	C (3)	D (2)	E (1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Mampu menabung	42	34	143	11	30	827	1300	63,62
14.	Rekreasi 1 kali dalam 6 bulan	11	14	114	36	85	610	1300	46,92
15.	Berlangganan surat kabar	/	4	63	43	143	469	1300	36,08
16.	Mempunyai televisi	112	83	43	0	22	1043	1300	80,23
17.	Mempunyai kend. Pribadi	10	5	27	44	174	413	1300	31,77
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>140</b>	<b>390</b>	<b>134</b>	<b>454</b>	<b>3362</b>	<b>6500</b>	<b>51,72</b>

Sumber : Data Primer Lampiran 8

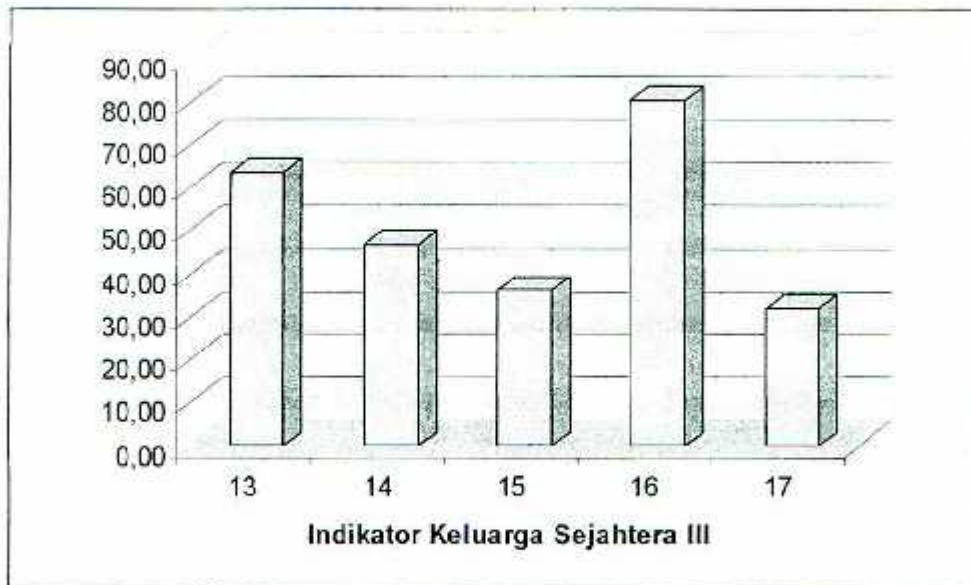
Mengacu kepada data yang diungkapkan pada tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan bahwa pilihan jawaban E (skor 1) merupakan pilihan jawaban yang paling intens dipilih para responden yaitu sebanyak 454 kali. Skor secara keseluruhan yang diperoleh para responden terhadap indikator-indikator tingkat keluarga sejahtera III mencapai 3.362 atau mencapai 51,72 persen dari skor maksimal sehingga memperoleh kategori penilaian "cukup". Oleh karena itu, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik sesuai standar-standar yang diungkapkan pada tingkatan keluarga sejahtera III.

Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai gambaran kesejahteraan keluarga para responden berdasarkan pernyataan-pernyataan yang mengacu pada indikator 13 – 17, maka dapat diungkapkan bahwa dari lima indikator yang terdapat pada tingkatan keluarga sejahtera III, indikator mampu menyisihkan penghasilan untuk menabung dan indikator mempunyai televisi memperoleh penilaian "baik" dengan skor masing-masingnya mencapai 827 dan 1.043 atau mencapai 63,62 persen dan 80,23 persen dari skor maksimal. Dari hasil penilaian tersebut, indikator mempunyai televisi memperoleh skor tertinggi dari lima

indikator lainnya sehingga dapat diasumsikan bahwa kebutuhan untuk memiliki televisi pada keluarga responden yang juga mewakili keadaan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya merupakan suatu kebutuhan yang dianggap penting untuk dipenuhi, karena melalui pesawat televisi setiap keluarga akan senantiasa memperoleh berbagai informasi sekaligus menjadi sarana hiburan bagi seluruh anggota keluarga. Sedangkan perolehan penilaian tiga indikator lainnya yaitu; indikator rekreasi sekali dalam enam bulan memperoleh penilaian "cukup" dengan perolehan skor sebesar 610 atau mencapai 46,92 persen dari skor maksimal. Indikator berlangganan surat kabar secara rutin dan indikator memiliki kendaraan pribadi memperoleh penilaian "kurang" dengan perolehan skor masing-masingnya sebesar 469 dan 413 atau mencapai 36,08 persen dan 31,77 persen dari skor maksimal. Oleh karena itu, dari hasil skor penilaian ketiga indikator tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan keluarga para responden belum termasuk dalam kategori tingkatan keluarga sejahtera III karena terdapat tiga indikator yang secara nyata belum mampu dipenuhi para responden dengan baik.

Dari hasil pendeskripsian di atas, selanjutnya dapat digambarkan kemampuan para responden dalam memenuhi kelima indikator pada tingkatan keluarga sejahtera III sebagai berikut :





Gambar 5.14 Persentase Penilaian Kemampuan Responden Dalam Memenuhi Indikator Keluarga Sejahtera III  
Sumber : Data Primer pada Tabel 5.8

Tingkatan teratas dalam ukuran kesejahteraan keluarga dari BKKBN adalah keluarga sejahtera III plus. Dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 260 responden dalam penelitian ini terhadap dua indikator tingkatan keluarga sejahtera III plus dengan lima pilihan jawaban, diperoleh distribusi frekuensi pilihan jawaban sebagaimana yang diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.9  
Distribusi Frekuensi Pilihan Jawaban Responden Pada Variabel Terikat Mengacu Pada Indikator-indikator Keluarga Sejahtera III Plus

No	Indikator	Frekuensi Pilihan Jawaban					Jumlah Skor	Skor Maksimal	Persentase (%)
		A (5)	B (4)	C (3)	D (2)	E (1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Sumbangan secara teratur	11	17	167	28	37	717	1300	55,15
19.	Pengurus org. masyarakat	8	13	196	18	25	741	1300	57,00
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>30</b>	<b>363</b>	<b>46</b>	<b>62</b>	<b>1458</b>	<b>2600</b>	<b>56,08</b>

Sumber : Data Primer Lampiran 8

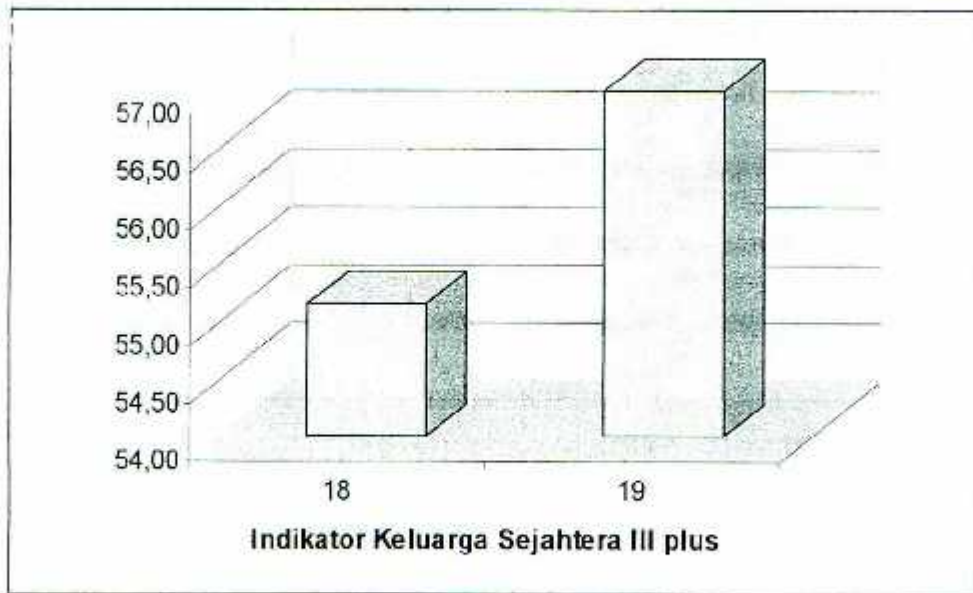
Berdasarkan data yang diungkapkan pada tabel di atas, terlihat bahwa pilihan jawaban C (skor 3) merupakan pilihan jawaban yang paling intens dipilih para responden sebanyak 363 kali. Skor secara keseluruhan yang diperoleh para



responden terhadap indikator-indikator tingkat keluarga sejahtera III plus mencapai 1.458 atau mencapai 56,08 persen dari skor maksimal sehingga memperoleh kategori penilaian "cukup". Oleh karena itu, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik sesuai standar-standar yang diungkapkan pada tingkatan keluarga sejahtera III plus.

Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai gambaran kesejahteraan keluarga para responden berdasarkan pernyataan-pernyataan yang mengacu pada indikator 18 dan 19, maka dapat diungkapkan bahwa berdasarkan hasil pilihan jawaban responden kedua indikator tersebut memperoleh penilaian dalam kategori "cukup" dengan capaian skor masing-masingnya sebesar 717 dan 741 atau mencapai 55,15 persen dan 57,00 persen dari skor maksimal. Oleh karena itu, dari hasil skor penilaian kedua indikator tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan keluarga para responden belum termasuk dalam kategori tingkatan keluarga sejahtera III plus karena terdapat indikator-indikator yang terkandung di dalamnya secara nyata belum mampu dipenuhi para responden dengan baik.

Dari hasil pendeskripsian di atas, selanjutnya dapat digambarkan kemampuan para responden dalam memenuhi kelima indikator pada tingkatan keluarga sejahtera III sebagai berikut :



Gambar 5.15 Persentase Penilaian Kemampuan Responden Dalam Memenuhi Indikator Keluarga Sejahtera III plus  
Sumber : Data Primer pada Tabel 5.9

#### **4. Analisis Deskriptif Terhadap Komposisi Responden per Kecamatan Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Keluarga**

Berdasarkan analisis secara deskriptif terhadap variabel kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan sebagaimana telah diungkapkan dalam uraian sebelumnya, maka selanjutnya melalui analisis secara deskriptif akan diungkapkan komposisi pembagian responden berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarganya per kecamatan. Dari 260 responden yang tersebar di tiga kecamatan yang menjadi sampel pada penelitian ini, dimana kecamatan Luak terdiri dari 88 responden, kecamatan Situjuh Limo Nagari terdiri dari 85 responden dan kecamatan Guguk terdiri dari 87 responden menunjukkan bahwa rata-rata mayoritas tingkat kesejahteraan keluarga para responden berada pada tingkatan keluarga sejahtera II. Namun demikian, karena dirasa perlu untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai komposisi tingkatan kesejahteraan keluarga

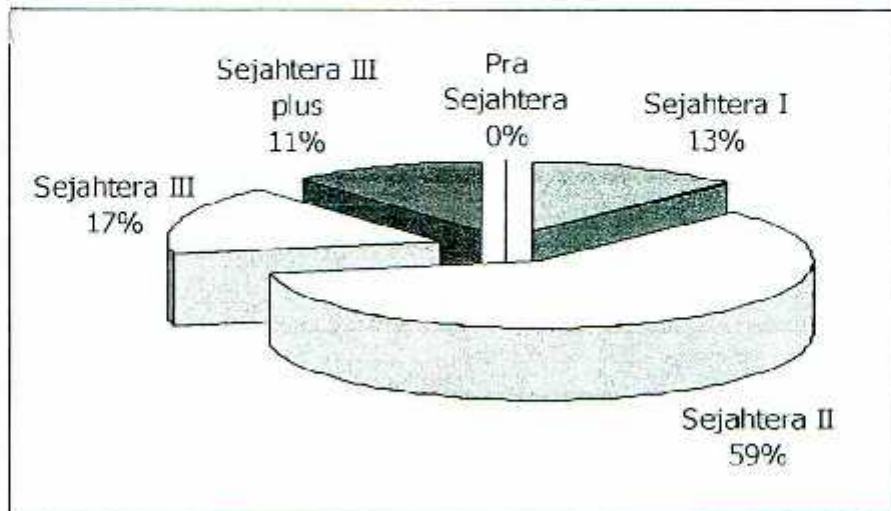
responden disetiap kecamatan menurut kategori keluarga sejahtera I, II, III dan III plus pasca diimplementasikannya program PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka melalui analisis statistik secara deskriptif akan diupayakan untuk mengungkapkannya.

Dari 27 jorong di empat nagari pada kecamatan Luak, melalui program PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 enam jorong memperoleh kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar dengan total alokasi dana sebesar Rp.1.342.611.500, tiga jorong memperoleh kegiatan bidang pendidikan dengan alokasi dana sebesar Rp.604.701.700, satu jorong memperoleh kegiatan bidang kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp.191.760.800, dan 23 jorong memperoleh kegiatan SPP dengan alokasi dana sebesar Rp.711.600.000. berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa terdapat beberapa jorong yang memperoleh dua kegiatan sekaligus berupa pembangunan fisik dibidang sarana prasarana, pendidikan atau kesehatan dan juga memperoleh kegiatan SPP.

Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian berupa rekapitulasi tingkat kesejahteraan keluarga responden (lampiran 8), maka dapat digambarkan bahwa tingkat kesejahteraan para responden di kecamatan Luak mayoritas telah berada pada tingkatan keluarga sejahtera II. Dari 88 keluarga responden yang diukur, sebanyak 52 keluarga (59 persen) tergolong keluarga sejahtera II, 15 keluarga (17 persen) tergolong keluarga sejahtera III, 11 keluarga (13 persen) tergolong keluarga sejahtera I, 10 keluarga (11 persen) tergolong keluarga sejahtera III plus dan tidak terdapat responden yang berada pada tingkatan keluarga pra sejahtera. Secara lebih jelas gambaran komposisi pembagian para responden di kecamatan Luak berdasarkan tingkat



kesejahteraan keluarga menurut BKKBN, dapat dilihat melalui diagram sebagai berikut :

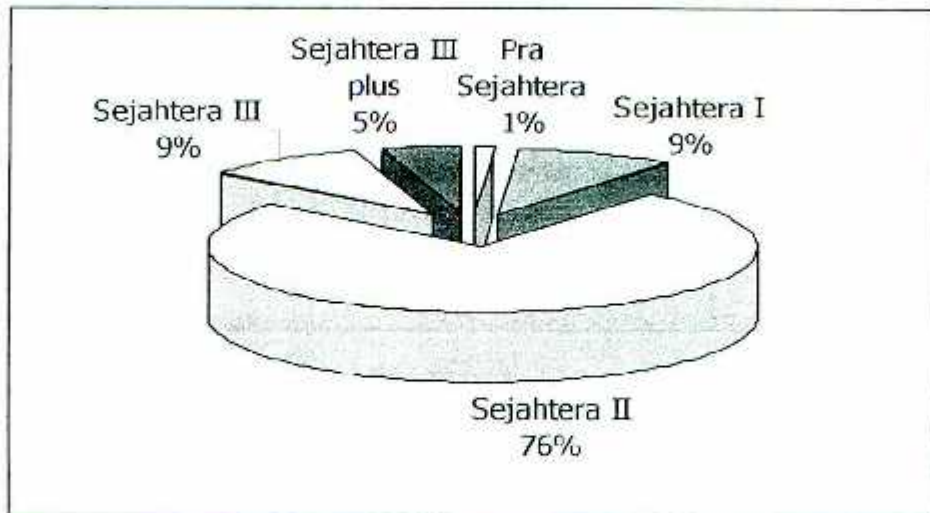


Gambar 5.16 Komposisi Responden di Kecamatan Luak Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Keluarga  
Sumber : Data Primer pada Lampiran 8

Sedangkan untuk kecamatan Situjuh Limo Nagari yang terdiri dari lima nagari dengan 17 jorong, berdasarkan data yang diperoleh terdapat sembilan jorong yang memperoleh kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar dengan total alokasi dana sebesar Rp.2.462.105.600 dan delapan jorong memperoleh kegiatan SPP dengan alokasi dana sebesar Rp.387.900.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 di kecamatan Situjuh Limo Nagari tidak terdapat kegiatan pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, mengapa hanya kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar pada tahun 2008 di kecamatan ini sedangkan kegiatan dibidang pendidikan dan kesehatan tidak tersentuh sama sekali, maka hasil pengungkapan yang diperoleh dari para responden menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut murni hasil

usulan kebutuhan masyarakat yang diungkapkan melalui proses musyawarah yang telah dimulai dari tingkat jorong.

Selanjutnya berdasarkan pengolahan data hasil penelitian berupa rekapitulasi tingkat kesejahteraan keluarga responden (lampiran 8), maka dapat digambarkan bahwa tingkat kesejahteraan para responden di kecamatan Situjuh Limo Nagari mayoritas memiliki kemiripan dengan tingkat kesejahteraan keluarga responden di kecamatan Luak. Dari 85 responden di kecamatan ini, 64 keluarga responden atau mencapai 76 persen tergolong berada pada tingkatan keluarga sejahtera II, diikuti tingkat keluarga sejahtera III dan sejahtera I yang memperoleh komposisi sama dimana masing-masing tingkatan keluarga tersebut terdiri dari 8 keluarga responden atau mencapai 9 persen dari total responden keseluruhan. Sedangkan sisanya, 4 keluarga responden tergolong dalam tingkatan keluarga sejahtera III plus atau mencapai 5 persen dari jumlah responden di kecamatan ini, dan terdapat seorang responden yang dikategorikan berada pada tingkat keluarga pra sejahtera. Melalui diagram berikut diungkapkan gambaran secara lebih jelas mengenai komposisi pembagian responden di kecamatan Situjuh Limo Nagari berdasarkan tingkatan kesejahteraan keluarganya pasca pengimplementasian PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008.



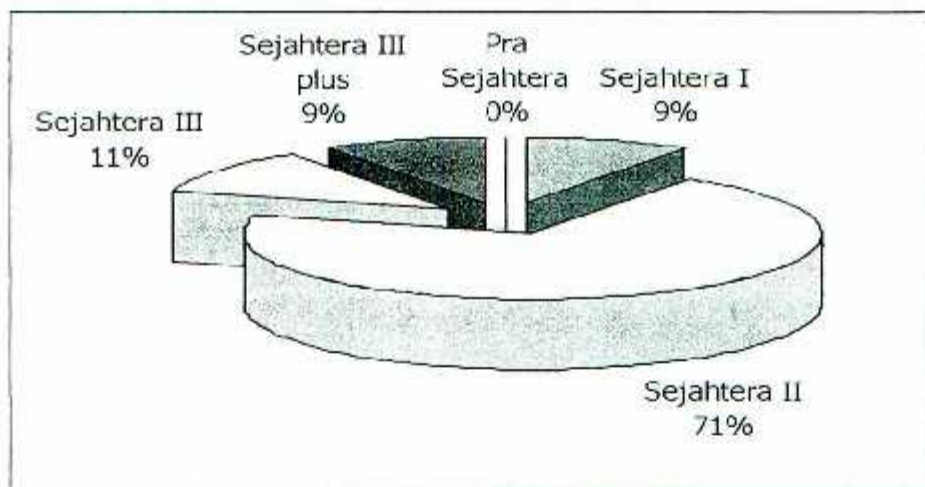
Gambar 5.17 Komposisi Responden di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Keluarga  
Sumber : Data Primer pada Lampiran 8

Pengimplementasian PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Guguak terlihat memiliki kemiripan dengan pengimplementasian PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Luak. Berdasarkan data yang diperoleh pada kecamatan Guguak yang terdiri dari lima nagari dan terbagi atas 24 jorong, terdapat tujuh jorong yang memperoleh kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar dengan total alokasi dana sebesar Rp.2.137.500.000, serta tidak terdapat kegiatan dibidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk kegiatan SPP dilaksanakan pada 22 jorong dengan total alokasi dana sebesar Rp.712.500.000. Padahal berdasarkan tujuan pembangunan millenium (MDGs) mengungkapkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan tidak semata-mata hanya dengan meningkatkan pendapatan keluarga miskin, namun juga diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan dan derajat kesehatan seluruh anggota keluarga miskin.

Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian berupa rekapitulasi tingkat kesejahteraan keluarga responden (lampiran 8), dari 87 keluarga yang menjadi responden di kecamatan Guguak terdapat 61 keluarga responden atau mencapai



71 persen dari jumlah total responden kecamatan Guguak berada pada tingkatan keluarga sejahtera II dan 10 keluarga responden atau mencapai 11 persen dikategorikan tergolong keluarga sejahtera III. Selanjutnya terdapat kesamaan jumlah pada tingkatan keluarga sejahtera I dan sejahtera III plus dimana masing-masingnya berjumlah 8 keluarga responden atau masing-masing tingkatan tersebut mencapai nilai 9 persen dari jumlah responden kecamatan. Selanjutnya berdasarkan hasil pengolahan data, tidak terdapat responden yang dikategorikan berada pada tingkat keluarga pra sejahtera sebagaimana diungkapkan melalui diagram sebagai berikut :



Gambar 5.18 Komposisi Responden di Kecamatan Guguak Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Sumber : Data Primer pada Lampiran 8

## B. Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian

### 1. Pengujian Validitas Instrumen Penelitian

Uji validitas instrumen dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid yaitu terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen penelitian yang valid berarti alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang

seharusnya diukur. Selanjutnya untuk menguji kevalidan instrumen penelitian ini, maka dilakukan perhitungan manual uji validitas dari *pearson* sebagai berikut :

Berdasarkan data pada tabel perhitungan validitas product moment (lampiran 5.1), diperoleh:

n	=	260
$\Sigma X$	=	1147
$\Sigma Y$	=	10055
$\Sigma X^2$	=	5165
$\Sigma Y^2$	=	392741
$\Sigma XY$	=	44747

Maka koefisien validitas untuk item no.1 dapat dihitung sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

$$r = \frac{260(44747) - (1147 \times 10055)}{\sqrt{\{260(1147) - (5165)^2\} \{260(392741) - (10055)^2\}}}$$

$$r = 0,609$$

Setelah diketahui koefisien korelasinya maka untuk menghitung nilai  $t_{hitung}$  maka dilakukan dengan cara sebagai berikut :

dengan rumus  $t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$

maka didapat nilai  $t_{hitung} = 0,609 \sqrt{\frac{260-2}{1-0,609^2}} = 12,34$

dikarenakan nilai  $t_{hitung}$  pada item no.1 ( $t = 12,34$ ) atau lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  (1,969) maka item pertanyaan no.1 dinyatakan valid. Sedangkan terhadap hasil uji validitas instrumen penelitian lainnya dapat dilihat melalui tabel 5.12 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian.

## 2. Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pengujian reliabilitas instrumen penelitian ini dilakukan melalui perhitungan manual uji reliabilitas internal, dimana instrumen diuji dengan menganalisis butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu, yang dalam hal ini dengan menggunakan teknik belah dua (*split half*) skor ganjil dan genap. Adapun proses pengujian reliabilitas instrumen penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data pada tabel perhitungan reliabilitas split half (lampiran 5.2), maka diperoleh :

n	=	260
$\Sigma X$	=	11524
$\Sigma Y$	=	11907
$\Sigma X^2$	=	516328
$\Sigma Y^2$	=	550501
$\Sigma XY$	=	531883

untuk mencari koefisien reliabilitas *Split-Half* terlebih dahulu dicari korelasinya dengan cara sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$
$$r = \frac{260(531883) - (11524 \times 11907)}{\sqrt{\{260(516328) - (11524)^2\} \{260(550501) - (11907)^2\}}}$$
$$r = 0,768$$

Lalu untuk menentukan nilai koefisien reliabilitas *Split-Half* dengan perhitungan sebagai berikut:



$$\begin{aligned} \text{Reliabilitas} &= \frac{2 \times rb}{1 + rb} \\ &= \frac{2 \times 0,768}{1 + 0,768} \\ &= 0,869 \end{aligned}$$

Dikarenakan nilai koefisien korelasi reliabilitas pada variabel X bernilai 0,869 atau lebih besar dari nilai r tabel 0,138 maka variabel X dinyatakan reliabel.

Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 5.10  
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Item Pertanyaan	Koefisien Validitas	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Kesimpulan	Koefisien Reliabilitas	r <sub>tabel</sub>	Kesimpulan	
X1	1	0.609	12.34	1.969	Valid	0.869	0.138	Reliabel
	2	0.641	13.41	1.969	Valid			
	3	0.665	14.31	1.969	Valid			
	4	0.631	13.06	1.969	Valid			
	5	0.564	10.98	1.969	Valid			
	6	0.650	13.75	1.969	Valid			
	7	0.688	15.21	1.969	Valid			
	8	0.735	17.39	1.969	Valid			
	9	0.629	12.99	1.969	Valid			
X2	10	0.746	18.01	1.969	Valid			
	11	0.762	18.91	1.969	Valid			
	12	0.739	17.63	1.969	Valid			
	13	0.788	20.54	1.969	Valid			
X3	14	0.833	24.21	1.969	Valid			
	15	0.843	25.15	1.969	Valid			
	16	0.738	17.55	1.969	Valid			
	17	0.808	22.00	1.969	Valid			
X4	18	0.525	9.90	1.969	Valid			
	19	0.776	19.76	1.969	Valid			
	20	0.673	14.62	1.969	Valid			
	21	0.671	14.54	1.969	Valid			
	22	0.662	14.19	1.969	Valid			

Item Pertanyaan	Koefisien Validitas	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Kesimpulan	Koefisien Reliabilitas	r <sub>tabel</sub>	Kesimpulan	
Y	23	0.125	2.02	1.969	Valid	0.847	0.138	Reliabel
	24	0.334	5.69	1.969	Valid			
	25	0.549	10.55	1.969	Valid			
	26	0.595	11.83	1.969	Valid			
	27	0.666	14.32	1.969	Valid			
	28	0.480	8.80	1.969	Valid			
	29	0.694	15.49	1.969	Valid			
	30	0.695	15.52	1.969	Valid			
	31	0.532	10.09	1.969	Valid			
	32	0.423	7.49	1.969	Valid			
	33	0.417	7.38	1.969	Valid			
	34	0.210	3.45	1.969	Valid			
	35	0.645	13.57	1.969	Valid			
	36	0.680	14.91	1.969	Valid			
	37	0.652	13.82	1.969	Valid			
	38	0.617	12.60	1.969	Valid			
	39	0.614	12.48	1.969	Valid			
	40	0.280	4.69	1.969	Valid			
41	0.463	8.39	1.969	Valid				

## C. Data Hasil Penelitian

### 1. Transformasi Data Ordinal menjadi Data Interval

Proses transformasi data ordinal menjadi data interval dilakukan dengan metode MSI (*Method of Successive Interval*). Transformasi data tersebut dilakukan terhadap masing-masing item pernyataan. Adapun langkah-langkah pentransformasian data ordinal ke data interval dengan metode konversi MSI adalah sebagai berikut:

1. Nilai ordinal yang muncul adalah 1, 2, 3, 4 dan 5, selanjutnya disimpan pada kolom kategori.
2. Hitung frekuensi muncul masing-masing kategori, selanjutnya disimpan pada kolom Frekuensi (Frek).

3. Hitung proporsi tiap frekuensi.

$$\text{Prop (2)} = 2/260 = 0,008$$

$$\text{Prop (3)} = 15/260 = 0,058$$

$$\text{Prop (4)} = 117/260 = 0,450$$

$$\text{Prop (5)} = 126/260 = 0,485$$

4. Hitung proporsi kumulatif.

$$\text{Untuk kategori (2)} = 0,008$$

$$\text{Untuk kategori (3)} = 0,008 + 0,058 = 0,065$$

$$\text{Untuk kategori (4)} = 0,065 + 0,450 = 0,515$$

$$\text{Untuk kategori (5)} = 0,515 + 0,485 = 1,000$$

5. Menentukan nilai Z. Dicari dari tabel distribusi normal standar dengan nilai peluang pada kolom proporsi kumulatif.

$$\text{Nilai Z untuk } p = 0,008 \rightarrow Z = -2,423$$

$$\text{Nilai Z untuk } p = 0,065 \rightarrow Z = -1,511$$

$$\text{Nilai Z untuk } p = 0,515 \rightarrow Z = 0,039$$

6. Menghitung nilai fungsi densitas untuk masing-masing nilai Z

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

$$\text{untuk } z = -2,423 \rightarrow f(-2,753) = \frac{1}{\sqrt{2(3,14)}} e^{-\frac{1}{2}(-2,753)^2} = 0,021$$

$$\text{untuk } z = -1,511 \rightarrow f(-1,511) = \frac{1}{\sqrt{2(3,14)}} e^{-\frac{1}{2}(-1,511)^2} = 0,127$$

$$\text{untuk } z = 0,039 \rightarrow f(0,039) = \frac{1}{\sqrt{2(3,14)}} e^{-\frac{1}{2}(0,039)^2} = 0,399$$



7. Menghitung nilai *Scale Value* (SV) untuk tiap kategori.

$$SV = \frac{(\text{kepadatan batas bawah}) - (\text{kepadatan batas atas})}{(\text{daerah dibawah batas atas} - \text{daerah dibawah batas bawah})}$$

$$SV (2) = \frac{0,000 - 0,021}{0,008 - 0,000} = -2,753$$

$$SV (3) = \frac{0,021 - 0,127}{0,065 - 0,008} = -1,841$$

$$SV (4) = \frac{0,127 - 0,399}{0,515 - 0,065} = -0,603$$

$$SV (5) = \frac{0,399 - 0,000}{1,000 - 0,515} = 0,823$$

8. Menghitung nilai transformasi interval dengan rumus:

$$K = SV + [1 + \text{abs}(SV_{\min})]$$

$$\text{abs}(SV_{\min}) = 2,753$$

$$K (2) = -2,753 + [1 + 2,753] = 1,000$$

$$K (3) = -1,841 + [1 + 2,753] = 1,912$$

$$K (4) = -0,603 + [1 + 2,753] = 3,150$$

$$K (5) = 0,823 + [1 + 2,753] = 4,576$$

Hasil perhitungan di atas kemudian disajikan sebagaimana yang diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 5.11

Proses Transformasi Data Orsinal menjadi Data Interval dengan Metode MSI

Col	Category	Freq	Prop	Cum	Density	Z	NS	Interval
1	2	2	0.008	0.008	0.021	-2.423	-2.753	1.000
	3	15	0.058	0.065	0.127	-1.511	-1.841	1.912
	4	117	0.450	0.515	0.399	0.039	-0.603	3.150
	5	126	0.485	1.000			0.823	4.576

Sumber : Data Primer Lampiran 3

Sedangkan untuk mengetahui keseluruhan transformasi data ordinal menjadi data interval dengan menggunakan metode MSI (*Method of Successive Interval*) dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.

## 2. Pengujian Normalitas Data Penelitian

Pengujian yang dilakukan dalam hal ini adalah variabel *dependent* saja atau dalam penelitian ini adalah variabel (Y) kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan. Dengan menggunakan program SPSS, diperoleh output seperti berikut:

Tabel 5.12  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Y
N		260
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	53,0318
	Std. Deviation	8,41634
Most Extreme Differences	Absolute	,053
	Positive	,053
	Negative	-,053
Kolmogorov-Smirnov Z		,850
Asymp. Sig. (2-tailed)		,465

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai asymp.sig. adalah 0,465. Ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, karena nilai asymp.sig. mencapai nilai 0,465 yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ .

## D. Analisis dan Pembahasan

### 1. Analisis Korelasi Ganda

Analisis korelasi ganda ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara variabel bebas; Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dengan variabel terikat; Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara bersamaan, berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi yang diungkapkan Sugiyono (2008:214) pada Tabel 3.2.

Hasil analisis korelasi ganda antara variabel bebas (implementasi PNPM Mandiri Perdesaan) dengan variabel terikat (Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.133 <sup>a</sup>	.018	.002	8.40639

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

Dari hasil analisis di atas maka didapat koefisien korelasi sebesar 0,133 yang termasuk ke dalam korelasi yang sangat rendah dan berada pada interval 0,000 - 0,199. Korelasi yang terjadi adalah *korelasi positif yang sangat rendah*, yang berarti bahwa *derajat kekuatan hubungan antara variabel bebas; Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dengan variabel terikat; Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan **hubungan yang positif namun dalam kategori sangat rendah.***



## 2. Analisis Regresi Ganda

Analisis regresi dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh antara variabel bebas; implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) terhadap variabel terikat; kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS, maka diperoleh tabel dan persamaan hubungan regresi ganda sebagai berikut:

Tabel 5.14  
Koefisien Regresi

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	53.840	3.928		13.705	.000
	X1	.174	.166	.105	1.043	.298
	X2	-.384	.252	-.121	-1.522	.129
	X3	.170	.250	.059	.679	.498
	X4	-.184	.176	-.068	-1.044	.298

a. Dependent Variable: Y

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Dimana: Y = Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota (variabel terikat)

$b_0$  = Bilangan konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4$  = Koefisien arah regresi

$X_1$  = Kebijakan yang Diidealiskan (variabel bebas)

$X_2$  = Kelompok Sasaran (variabel bebas)

$X_3$  = Implementasi Organisasi (variabel bebas)

$X_4$  = Faktor-faktor Lingkungan (variabel bebas)

$b_0, b_1, b_2, b_3, b_4$  = koefisien regresi

Dari Tabel 5.16 di atas diketahui nilai  $b_0 = 53,840$ ,  $b_1 = 0,174$ ,  $b_2 = -0,384$ ,  $b_3 = 0,170$ ,  $b_4 = -0,184$ . Dengan demikian, diperoleh persamaan regresi ganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 53,840 + 0,174 X_1 - 0,384 X_2 + 0,170 X_3 - 0,184 X_4$$

Arti dari persamaan di atas adalah:

$b_0 = 53,840$  : Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota bernilai positif 53,840 artinya Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dijadikan sampel dipengaruhi oleh keempat variabel tersebut. *(maksudnya dilihat lg)*

$b_1 = 0,174$  : Setiap peningkatan Kebijakan yang Diidealiskan sebesar 1 satuan dan variabel lainnya konstan, maka Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota akan meningkat sebesar 0,174 satuan.

$b_2 = -0,384$  : Setiap peningkatan Kelompok Sasaran sebesar 1 satuan dan variabel lainnya konstan, maka Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota akan menurun sebesar 0,384 satuan.

$b_3 = 0,170$  : Setiap peningkatan Implementasi Organisasi sebesar 1 satuan dan variabel lainnya konstan, maka Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota akan meningkat sebesar 0,170 satuan.

$b_4 = -0,184$  : Setiap peningkatan Faktor-faktor Lingkungan sebesar 1 satuan dan variabel lainnya konstan, maka Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota akan menurun sebesar 0,184 satuan.

Berdasarkan hasil analisis di atas, terlihat bahwa dari keempat subvariabel implemtasi PNPM Mandiri Perdesaaan ternyata subvariabel pertama; kebijakan yang diidealiskan dan subvariabel ketiga; implementasi organisasi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan variabel kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,174 dan 0,170 satuan. Sedangkan subvariabel kedua; kelompok sasaran dan subvariabel keempat; faktor-faktor lingkungan ternyata malah memberikan pengaruh negatif terhadap variabel kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan. Sebagaimana yang diungkapkan arti persamaan di atas, bahwa setiap peningkatan kelompok sasaran dan faktor-faktor lingkungan sebesar 1 satuan dan subvariabel lainnya konstan, justru menurunkan kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,384 dan 0,184 satuan.

### **3. Uji Hipotesis Secara Bersama-sama**

Untuk mengetahui apakah variabel Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) mempunyai pengaruh terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan, maka kita akan mengujinya dengan penggunaan statistik Uji F. Dalam pengujian hipotesis ini



akan digunakan uji signifikan dengan taraf 5% (Sumber : Sugiono,2004:190), dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : b_1, b_2, b_3, b_4 = 0$ , berarti implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) tidak memiliki pengaruh atau hubungan positif maupun negatif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

$H_1 : b_1, b_2, b_3, b_4 \neq 0$ , berarti implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) memiliki pengaruh hubungan positif maupun negatif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Melalui hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program SPSS *for window versi 14*, maka diperoleh hasil sebagaimana yang diuraikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5.15  
Koefisien Regresi Uji F

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	325.004	4	81.501	1.153	.332 <sup>a</sup>
	Residual	18020.192	255	70.667		
	Total	18346.196	259			

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable:  $\checkmark$

dari hasil analisis program SPSS di atas diperoleh skor  $F_{hitung}$  sebesar 1,153 yang berarti lebih kecil dari  $F_{tabel}$  2,407, sehingga sebagaimana ketentuan di atas maka disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dari hasil uji hipotesis secara bersama-sama tersebut, dapat diartikan bahwa *antara Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota*. Tingkat signifikan yang diperoleh adalah 0,332 lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$ . hal ini dapat diartikan bahwa lebih kurang 95 persen berdasarkan hasil uji hipotesis secara bersama-sama, kita dapat mempercayai bahwa keempat subvariabel / dimensi dari variabel implementasi PNPM Mandiri Perdesaan pada penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **4. Uji Hipotesis Secara Individu**

Setelah dilakukan pengujian hipotesis secara bersama-sama dari keempat subvariabel implementasi PNPM Mandiri Perdesaan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar kedua variabel.

Selanjutnya melalui uji hipotesis secara individu terhadap masing-masing subvariabel, bertujuan untuk mengetahui secara lebih rinci apakah keempat dimensi dalam variabel bebas; implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan)

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat; kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara individu dengan menggunakan statistik uji t dalam penganalisaannya. Dengan melihat tingkat signifikan koefisien regresi yang ada pada tabel SPSS dibawah ini, bila diperoleh skor tingkat signifikansi yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka selanjutnya dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel.

Tabel 5.16  
Koefisien Regresi Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	53.840	3.928		13.705	.000
	X1	.174	.166	.105	1.043	.298
	X2	-.384	.252	-.121	-1.522	.129
	X3	.170	.250	.059	.679	.498
	X4	-.184	.175	-.068	-1.044	.298

a. Dependent Variable: Y

Kriteria Pengujiannya adalah :

$t_{hitung} > t_{tabel} / (-) t_{hitung} < (-) t_{tabel}$  maka hipotesis  $H_0$  ditolak  
 $t_{hitung} < t_{tabel} / (-) t_{hitung} > (-) t_{tabel}$  maka hipotesis  $H_0$  diterima  
 atau  
 Koefisien signifikansi  $< \alpha = 0,05$  maka hipotesis  $H_0$  ditolak  
 Koefisien signifikansi  $> \alpha = 0,05$  maka hipotesis  $H_0$  diterima

- ☞ Untuk dimensi pertama dari variabel bebas diperoleh  $t_{hitung} = 1,043 < t_{tabel} = 1,969$  atau koefisien signifikansi  $= 0,298 > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi pertama dari variabel bebas; kebijakan yang diidealiskan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat; kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.



- ☉ Untuk dimensi kedua dari variabel bebas diperoleh  $t_{hitung} = -1,522 < t_{tabel} = 1,969$  atau koefisien signifikansi  $= 0,129 > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi kedua dari variabel bebas; kelompok sasaran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat; kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- ☉ Untuk dimensi ketiga dari variabel bebas diperoleh  $t_{hitung} = 0,679 < t_{tabel} = 1,969$  atau koefisien signifikansi  $= 0,498 > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi ketiga dari variabel bebas; implementasi organisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat; kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- ☉ Untuk dimensi keempat dari variabel bebas diperoleh  $t_{hitung} = -1,044 < t_{tabel} = 1,969$  atau koefisien signifikansi  $= 0,298 > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi keempat dari variabel bebas; faktor-faktor lingkungan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat; kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari hasil pengujian hipotesis secara individu di atas, maka dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95 persen bahwa dimensi pertama (Kebijakan yang Diidealiskan), dimensi kedua (Kelompok Sasaran), dimensi ketiga (Implementasi Organisasi) dan dimensi keempat (Faktor-faktor Lingkungan) dari variabel bebas; implementasi PNP Mandiri Perdesaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat; kesejahteraan

masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota karena nilai  $t_{hitung}$  keempat dimensi tersebut lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  atau nilai koefisien signifikansi keempat dimensi lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$ .

### 5. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh / peranan variabel bebas; implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) terhadap variabel terikat; kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka digunakan analisis koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = (r_{xy})^2 \times 100\%$$

Dimana: KD = koefisien determinasi  
 $(r_{xy})^2$  = koefisien korelasi berganda

Tabel 5.17  
 Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.133 <sup>a</sup>	.018	.002	8.40639

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

$$KD = (0,133)^2 \times 100\% = 1,8 \%$$

Dari hasil analisis di atas terlihat bahwa variabel bebas; implementasi PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat; kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 1,8 persen, sedangkan sisanya sebesar 98,2 persen kesejahteraan

masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang diabaikan penulis.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar peranan dari masing-masing dimensi dari variabel implementasi PNPM Mandiri Perdesaan (kebijakan yang diidealiskan, kelompok sasaran, implementasi organisasi, dan faktor-faktor lingkungan) terhadap variabel kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka melalui pengujian per dimensi berdasarkan nilai koefisien beta dan zero order pada table dibawah ini diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Koefisien Regresi per Dimensi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Betas			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	53.840	3.928		13.705	.000			
	X1	.174	.166	.105	1.043	.298	.050	.065	.060
	X2	-.394	.252	-.121	-1.522	.129	-.044	-.066	-.094
	X3	.170	.250	.059	.679	.498	.063	.042	.042
	X4	-.184	.176	-.068	-1.044	.298	-.35*	-.065	-.065

a. Dependent Variable: Y

1. Dimensi pertama =  $0,105 \times 0,050 = 0,005 = 0,5 \%$
2. Dimensi kedua =  $-0,121 \times -0,044 = 0,005 = 0,5 \%$
3. Dimensi ketiga =  $0,059 \times 0,063 = 0,004 = 0,4 \%$
4. Dimensi keempat =  $-0,068 \times -0,051 = 0,003 = 0,3 \%$

Dari hasil uji individu di atas diketahui bahwa dimensi dari variabel implementasi PNPM Mandiri Perdesaan yang paling dominan mempengaruhi variabel kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dimensi pertama (Kebijakan yang Diidealiskan) dan dimensi kedua (Kelompok Sasaran), yakni dengan nilai masing-masing sebesar 0,5 persen.



## 6. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang telah dikemukakan, dari keempat dimensi dari variabel Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) apabila dibandingkan dengan tingkat signifikan sebesar 5 % ( $\alpha = 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi PNPM Mandiri Perdesaan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Begitu pula dilihat dari hasil uji hipotesis secara individu terhadap keempat dimensi dari variabel Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dengan menggunakan uji t, semua dimensi dari variabel bebas memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$ , artinya  $H_0$  diterima sedangkan  $H_1$  ditolak, yang berarti keempat dimensi dari variabel bebas secara individu ternyata juga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Sedangkan hasil pengujian hipotesis secara bersama dengan menggunakan uji F terhadap variabel Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  yang diperoleh lebih kecil dari  $F_{tabel}$ , artinya variabel Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) secara bersama-sama juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari uraian kesimpulan di atas yang mengungkapkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) terhadap variabel kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, padahal melalui visi dan tujuan program yang telah diungkapkan, tersirat dengan jelas bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat miskin yang berdomisili di wilayah perdesaan perlu mendapatkan sebuah penjelasan yang konkrit. Ada beberapa faktor yang dapat diasumsikan mengapa antara kedua variabel masih belum terdapat hubungan pengaruh secara signifikan. Pertama; Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan sebuah program yang baru diluncurkan serta baru pertama kali diimplementasikan pada tahun 2008 dan direncanakan akan terus berlangsung sampai tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diungkapkan salah satu penyebab mengapa PNPM Mandiri Perdesaan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tujuan yang ingin dicapainya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah karena program ini baru diimplementasikan selama satu tahun dari 17 tahun jangka waktu rencana pengimplementasian program. Sebagai perbandingan terhadap hal tersebut, salah satu program yang sejenis dengan PNPM Mandiri Perdesaan namun telah lebih dulu diimplementasikan adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program tersebut telah diluncurkan semenjak Indonesia mengalami krisis multi dimensi dan perubahan politik pada tahun 1998 hingga 2006. Dalam kurun



waktu 8 tahun, program PPK diimplementasikan dalam dua fase yaitu; PPK I (1998–2002) dan PPK II (2003–2006). Setelah delapan tahun kurun waktu pengimplementasian PPK, barulah Pemerintah Indonesia melalui Ditjen PMD selaku pengelola program berani mengungkapkan bahwa program PPK adalah program terbesar yang dianggap berhasil dalam menanggulangi kemiskinan dalam artian terbesar dalam cakupan wilayah, terbesar dalam serapan dana, dan terbesar dalam jumlah penerima manfaat (sumber : [www.ppk.or.id](http://www.ppk.or.id)).

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh mengenai alokasi pembiayaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2008 (terlampir) dan hasil observasi lapangan, ditemukan fakta bahwa pada kecamatan Situjuh Limo Nagari dan kecamatan Guguak pada tahun 2008 hanya melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu; kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP). Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar merupakan kegiatan / proyek fisik berupa pembukaan, perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan. Sedangkan dua kegiatan lainnya yaitu; kegiatan peningkatan layanan bidang pendidikan dan kegiatan peningkatan layanan bidang kesehatan sama sekali tidak ada pada tahun 2008. Bila mengacu kepada pedoman umum dan petunjuk teknis operasional kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, yang menisyaratkan empat jenis kegiatan dalam pengimplementasian program maka dapat disimpulkan bahwa dua kecamatan tersebut belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang digariskan para pembuat kebijakan. Walaupun pembangunan jalan dan jembatan yang dibiayai melalui dana PNPM Mandiri Perdesaan pada kedua kecamatan tersebut memang merupakan hasil usulan



masyarakat pedesaan melalui proses musyawarah dari tingkat jorong sehingga merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat pedesaan secara keseluruhan, namun bila dilihat dari tujuan program PNPM Mandiri Pedesaan itu sendiri, penulis memandang kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar berupa pembangunan jalan dan jembatan tersebut belum mewakili kebutuhan hakiki dari masyarakat miskin pedesaan tapi baru mewakili kebutuhan masyarakat pedesaan secara umum. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Lipsky bahwa dalam pengimplementasian kebijakan yang bersifat *bottom-up* sangat menekankan bagaimana "birokrasi garis terdepan" (*street level bureaucrats*) menyusun strategi dalam memecahkan masalah (1980:73), sehingga para implementor program yang juga merupakan masyarakat pedesaan memperoleh kebebasan dalam mengimplementasikan program PNPM Mandiri Pedesaan sesuai kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Dengan adanya keleluasaan para "birokrasi garis terdepan" tersebut, justru menjadi sebuah peluang kelemahan dalam model implementasi kebijakan *bottom-up* karena dapat mengaburkan tujuan dan indikator-indikator program yang telah dirumuskan para pembuat kebijakan.

Lebih lanjut Smith mengungkapkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan publik maka interaksi diantara variabel dapat mengakibatkan ketidaksesuaian yang berujung pada ketegangan dan tekanan. Ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan tersebut akan menimbulkan pola-pola interaksi yaitu pola-pola yang tidak tetap yang berkaitan dengan tujuan dari suatu kebijakan (Tachjan,2008:38). Berdasarkan ungkapan tersebut dan mengingat program PNPM Mandiri Pedesaan ini masih baru, penulis memandang

pentingnya peranan suatu bentuk tindakan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan dalam rangka mengembalikan tujuan-tujuan program kedalam koridor yang diharapkan para perumus kebijakan, yang salah satunya adalah melalui berbagai penelitian yang dilakukan terhadap program tersebut.

Faktor kedua yang diasumsikan sebagai penyebab tidak adanya pengaruh yang signifikan antara implementasi PNPM Mandiri Perdesaan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diungkapkan dalam analisis, yaitu disebabkan karena keterlibatan kelompok masyarakat miskin sebagai "birokrasi garis terdepan" dalam pengimplementasian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan belum terlihat dengan jelas. Beberapa fakta yang penulis temui dari hasil observasi lapangan, yaitu para implementor / pelaku-pelaku kegiatan masih mendefinisikan makna "pemberdayaan RTM" dengan artian mengikutsertakan RTM dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, belum sampai menjangkau tahapan dimana para RTM ikut berperan aktif dalam mengelola program atau bahkan memiliki porsi khusus dalam menentukan arah kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibiayai melalui dana PNPM Mandiri Perdesaan. Karena berdasarkan data jumlah keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut tingkat kesejahteraan BKKBN tahun 2007 (tabel 1.4), perbandingan antara jumlah keluarga miskin dengan keluarga sejahtera ternyata cukup jauh yaitu 7,44 % berbanding 92,56 %. Fakta yang ditunjukkan di atas tentunya belum sejalan dengan makna pemberdayaan yang diungkapkan oleh Bryant dan White yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai penumbuhan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada "si miskin" (Miftahusyain,2008:85).



Selanjutnya dari hasil analisis korelasi ganda didapat nilai korelasi yang sangat rendah sebesar 0,133 antara variabel bebas; implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan variabel terikat; kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan. berdasarkan tabel interpretasi tingkat koefisien korelasi, maka nilai korelasi tersebut (0,133) berada di antara 0,000 - 0,199 yang termasuk dalam kategori korelasi positif yang sangat rendah. Sedangkan dilihat dari koefisien determinasi menunjukkan adanya pengaruh sebesar 1,8 persen yang artinya adalah kontribusi pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota hanya sebesar 1,8 persen sedangkan sisanya sebesar 98,2 persen merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain yang diabaikan penulis.

Dari hasil kesimpulan di atas yang mengungkapkan masih kecilnya kontribusi pengaruh yang diberikan PNPM Mandiri Perdesaan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan, sedangkan dilain pihak justru faktor-faktor lain yang terabaikanlah yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan. Salah satu faktor yang diduga menyebabkan rendahnya kontribusi pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan adalah karena terdapatnya program-program lain yang bertujuan sama (penanggulangan kemiskinan) diimplementasikan pada saat yang bersamaan seperti Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi



Wilayah (PISEW). Keempat program tersebut memiliki tujuan yang sama dengan program PNPM Mandiri Perdesaan karena PNPM Mandiri Perdesaan, P2KP, P2DTK, PUAP dan PISEW merupakan penjabaran dari PNPM Mandiri namun memiliki sasaran yang lebih spesifik. Selain itu, adanya kemungkinan suatu daerah memperoleh lebih dari satu pengimplementasian program tentulah sangat dimungkinkan karena sebagaimana halnya program PNPM Mandiri Perdesaan, keempat program lainnya juga dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia yang begitu kompleks, dimungkinkan merupakan dasar pemikiran mengapa Pemerintah Indonesia meluncurkan lima program berbeda yang tergabung dalam PNPM Mandiri. Hal ini senada dengan pendapat Weis yang mengungkapkan bahwa "kadang-kadang program itu hanya berkenaan dengan salah satu aspek dari suatu masalah yang kompleks" (Hambali,2007:21) dan didukung pula melalui pendapat Gibson et al yang mengemukakan bahwa "tidak ada program yang dapat menyelesaikan semua sasaran yang diinginkan, tetapi paling tidak suatu program mampu menjadi petunjuk arah kemana sasaran kegiatan ditetapkan dan bagaimana mencapai sasaran untuk kepentingan implementasi program tersebut" (1996:173).



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan yang positif antara implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dengan kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun tergolong dalam kategori hubungan yang sangat rendah.
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota baik secara keseluruhan maupun per dimensi kebijakan yang diidealiskan, dimensi kelompok sasaran, dimensi implementasi organisasi, dan dimensi faktor lingkungan.

Salah satu fakta yang ditemui di lapangan yang menyebabkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta didukung oleh data alokasi pembiayaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2008 (terlampir), ditemukan bahwa pada kecamatan Situjuh Limo Nagari dan kecamatan Guquak pada tahun 2008 hanya melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu; kegiatan



pembangunan sarana prasarana dasar dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dari empat jenis kegiatan yang diisyaratkan para perumus kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar merupakan kegiatan / proyek fisik berupa pembukaan, perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan, sedangkan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) merupakan kegiatan bantuan permodalan yang dikelola secara berkelompok dengan seluruh anggotanya adalah perempuan. Dua kegiatan lainnya yaitu; kegiatan peningkatan layanan bidang pendidikan dan kegiatan peningkatan layanan bidang kesehatan sama sekali tidak ada pada tahun 2008.

Bila mengacu kepada pedoman umum dan petunjuk teknis operasional kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, yang menisyaratkan empat jenis kegiatan dalam pengimplementasian program maka dapat disimpulkan bahwa dua kecamatan tersebut belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang digariskan para pembuat kebijakan, walaupun hal tersebut merupakan hasil usulan masyarakat perdesaan melalui proses musyawarah dari tingkat jorong yang mencerminkan kebutuhan masyarakat perdesaan secara keseluruhan. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Lipsky bahwa dalam pengimplementasian kebijakan yang bersifat *bottom-up* sangat menekankan bagaimana "birokrasi garis terdepan" (*street level bureaucrats*) menyusun strategi dalam memecahkan masalah (1980:73), sehingga para implementator program yang juga merupakan masyarakat perdesaan memperoleh kebebasan dalam mengimplementasikan program PNPM Mandiri Perdesaan sesuai kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Dengan adanya keleluasaan

para "birokrasi garis terdepan" tersebut, justru menjadi sebuah peluang kelemahan dalam model implementasi kebijakan *bottom-up* karena dapat mengaburkan tujuan dan indikator-indikator program yang telah dirumuskan para pembuat kebijakan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) selaku perumus kebijakan dan pengelola program ditingkat teratas, disarankan kiranya dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rumusan pengorganisasian para pelaku-pelaku program karena masih terdapatnya beberapa kategori pelaku terutama ditingkat terendah (desa dan kecamatan) belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya dilihat dari sisi komposisi pembagian tugas dan tanggung jawab para pelaku kegiatan terhadap insentif yang diterima, juga terlihat belum seimbang sehingga diharapkan mendapatkan peninjauan ulang. Selanjutnya dapat pula disarankan agar mekanisme pencairan dana dapat dilakukan pada awal tahun anggaran dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam merangsang geliat perekonomian lokal dimana program PNPM Mandiri Perdesaan diimplementasikan.



2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pembina program di tingkat kabupaten disarankan senantiasa dapat mengayomi masyarakat perdesaan melalui pengarahan dan penyuluhan agar memanfaatkan program PNPM Mandiri Perdesaan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian khususnya bagi masyarakat miskin perdesaan. Selain itu disarankan pula kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengarahkan program-program pembangunannya sejalan dengan program PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Bagi fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan disarankan kiranya dapat lebih mensosialisasikan program kepada masyarakat dengan lebih intensif sehingga masyarakat dapat lebih memahami tujuan akhir dari program PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu disarankan pula kiranya para fasilitator dapat memunculkan dan melemparkan ide-ide kegiatan baru kepada masyarakat yang dianggap mampu akan meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan kemandirian dikalangan keluarga miskin perdesaan.
4. Selanjutnya untuk memperkaya hasanah keilmuan dan mempertajam penelitian ini terutama dalam hal pengujian teori dan model implementasi kebijakan yang bersifat *bottom-up*, maka disarankan penelitian yang sama dapat dilakukan untuk beberapa tahun berikutnya dengan menggunakan alat ukur yang sama karena telah teruji kevalidan dan reliabilitasnya. Seandainya memungkinkan, disarankan penelitian ini dapat dilakukan setiap tahunnya sehingga dapat dilihat pada tahun keberapa implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan)



baru bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung
- Arikunto, Suharismi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2006, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Bryant C., dan Louisise, G. White, 1987, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta
- Cheema, G. Shabbir dan Rodinelli Denis A., 1983, *Decentralization and Development, Policy Implementation in Development Countries*, Sage Publications Inc, Beverly Hills California
- Friedman, John, 1992, *Empowerment the Politics of Alternative Development*, Blackwell Publisher, Cambridge
- Gibson, Ivancevich dan Donelly, 1996, *Organisasi : Perilaku, Struktur, dan Proses* (Alih Bahasa : Drs. Djarkasih, MPA), PT. Gelora Akara Pratama, Jakarta
- Huri, Daman, dkk, 2008, *Demokrasi dan Kemiskinan*, PLACIDS, KID dan Averroes Press, Malang
- Islamy, M.I., 1984, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Jazairy, Idris, dkk, 1992, *The State of World Rural Poverty an Inquiry Into Its Causes and Consequences*, New York University Press, New York
- Jones, C.O., 1977, *An Introduction to the Study of Public Policy*, Duxbury Press, Massachusetts

- Kartasasmitha, G., 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta
- Lester, James P., and Joseph Stewart Jr., 2000, *Public Policy : An Evolutionary Approach*, Wadsworth, Belmont
- LPEM-FUI, 2003, *Kemiskinan, Bahan Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah*, LPEM-FUI, Jakarta
- Mas'ood, Mochtar, 2003, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mazmanian, Daniel A. And Paul Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, Foresman and Company, USA
- Nazir, Moh, 2000, *Metodologi Penelitian*, Ghalia, Jakarta
- Nugroho, D. Riant, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana, Jakarta,
- Putra, Fadillah, 2003, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, CV. Alfabeta, Bandung
- Sen, Amartya, 2002, *Development as Freedom*, Random House, New York
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta
- Sitepu, Nirwana S.K., 1994, *Analisis Regresi dan Korelasi*, UPT–Jurusan Statistika FMIPA–Unpad, Bandung
- Strahm, H. Rudolf, 1995, *Kemiskinan Dunia Ketiga, Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, CIDES, Jakarta



- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung
- Susanto, Tri Agus, 2008, *Bahan Kuliah Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, Unsri, Palembang
- Syahyuti, 2006, *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Tachjan H., 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), Bandung
- Taifur, Werry Darta, 2005, *Tinjauan Teoritis Terhadap Kebijakan Pertumbuhan Yang Berpihak Kepada Penduduk Miskin, Makalah Presentasi Pada Seminar Keberpihakan Pertumbuhan Ekonomi Kepada Kelompok Miskin*, Unand, Padang
- Tjiptoherijanto, Prijono, 2002, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul, 2005, *Analisis Kebijaksanaan dari Analisis ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Widodo, Joko, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang

**Website :**

[www.antara-sumbar.com](http://www.antara-sumbar.com)

[www.limapuluhkota.go.id](http://www.limapuluhkota.go.id)

[www.pnpm-mandiri.org](http://www.pnpm-mandiri.org)

[www.ppk.or.id](http://www.ppk.or.id)

## LAMPIRAN 1 : Kuesioner Penelitian

Kepada : Yth. Bapak/Ibu/Saudara Warga masyarakat

(1) Kecamatan Luak

(2) Kecamatan Situjuah Limo Nagari

(3) Kecamatan Guguak

di -

**Tempat**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian saya yang berjudul **Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota**, maka saya akan menyebarkan kuesioner ini untuk memperoleh data yang saya butuhkan.

Penelitian yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengimplementasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM mandiri Perdesaan) di Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya dikecamatan dimana Bapak/Ibu/Saudara bertempat tinggal.

Untuk memenuhi maksud tersebut, maka selanjutnya terlampir dibelakang ini 38 buah pernyataan dan pertanyaan yang akan Bapak/Ibu/Saudara jawab. Berdasarkan kode etik penellitian, saya akan memegang kerahasiaan dari jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan. Oleh karena itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat memilih salah satu pilihan jawaban dengan memberikan tanda (X) pada jawaban yang diyakini paling mewakili perasaan dan keadaan Bapak/Ibu/Saudara sekalian.

Demikian yang dapat saya sampaikan, atas bantuan dan kesediannya untuk mengisi kuesioner ini saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat saya,

**Nuzul Firman**

Nim. 20082011035

# KUESIONER

## Identitas Responden

Nama : .....

Umur : ..... tahun

Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan (\*)

Status : Menikah / Janda / Duda (\*)

Pendidikan : Tidak sekolah / SD / SMP / SMA / Perguruan tinggi (\*)

BLT : Penerima BLT / Bukan Penerima BLT (\*)

Jumlah anak : ..... orang

Alamat : Jorong.....Nagari.....  
Kecamatan.....

(\*) coret yang tidak perlu

## Variabel : Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan

### Dimensi : Kebijakan yang Diidealiskan

Sebelum Saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, perlu Saudara ketahui bahwa yang dimaksud dengan **kegiatan** dalam pertanyaan ini adalah :

1. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti : pembangunan jalan dan jembatan
2. Kegiatan peningkatan pelayanan bidang kesehatan seperti : pembangunan / perbaikan puskesmas
3. Kegiatan peningkatan pelayanan bidang pendidikan seperti : pembangunan / perbaikan sekolah
4. Kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP)

Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudara untuk memilih salah satu jawaban yang paling Saudara yakini mewakili jawaban dari pertanyaan yang diuraikan.

1. Menurut saudara, kegiatan-kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan telah memberikan dampak langsung terhadap pembangunan manusia  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
2. Menurut saudara, masyarakat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut mengelola kegiatan di PNPM Mandiri Perdesaan  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
3. Menurut saudara, kegiatan-kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan telah mengakomodir kebutuhan dasar masyarakat miskin  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju



4. Menurut saudara, masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam mengelola kegiatan di PNPM Mandiri Perdesaan  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
5. Menurut saudara, kaum perempuan telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan di PNPM Mandiri Perdesaan  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
6. Menurut saudara, kegiatan-kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan merupakan murni hasil usulan masyarakat  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
7. Menurut saudara, pengelolaan kegiatan di PNPM Mandiri Perdesaan sudah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
8. Menurut saudara, kegiatan-kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan telah diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
9. Menurut saudara, setelah kegiatan-kegiatan di PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan, masyarakat tetap dapat meneruskannya / mengelolanya secara berkelanjutan  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju

**Dimensi : Kelompok Sasaran**

Sebelum Saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, perlu Saudara ketahui bahwa yang dimaksud dengan **masyarakat** dalam pertanyaan ini adalah masyarakat perdesaan, khususnya para masyarakat miskin perdesaan

Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudara untuk memilih salah satu jawaban yang paling Saudara yakini mewakili jawaban dari pertanyaan yang diuraikan.

10. Menurut saudara, masyarakat memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
11. Menurut saudara masyarakat sangat mendukung kegiatan-kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
12. Menurut saudara masyarakat sangat terlibat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju

13. Menurut saudara, kontribusi / peranan masyarakat dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan sangat terlihat
- A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju

#### **Dimensi : Implementasi Organisasi**

Sebelum Saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, perlu Saudara ketahui bahwa yang dimaksud dengan **pelaksana kegiatan** dalam pertanyaan-pertanyaan berikut adalah kelompok pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat perdesaan yang dibentuk melalui musyawarah desa sosialisasi, seperti : Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pemantau, Tim Pemelihara, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Jorong.

Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudara untuk memilih salah satu jawaban yang paling Saudara yakini mewakili jawaban dari pertanyaan yang diuraikan.

14. Menurut saudara, para pelaksana kegiatan telah melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai aturan dan ketentuan yang digariskan
- A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
15. Menurut saudara, para pelaksana kegiatan telah memahami secara mendalam tentang kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan
- A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
16. Menurut saudara, para pelaksana kegiatan telah melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan secara transparan terhadap masyarakat
- A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
17. Menurut saudara, pengorganisasian para pelaksana kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan telah sangat sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibutuhkan dalam mengelola kegiatan
- A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju

#### **Dimensi : Faktor-faktor Lingkungan**

Sebelum Saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, perlu Saudara ketahui bahwa yang dimaksud dengan :

1. Kehidupan sosial adalah perilaku-perilaku yang biasa dilaksanakan masyarakat setempat
2. Kebudayaan setempat adalah budaya / kebiasaan dalam adat istiadat minang kabau
3. motif ekonomi adalah keinginan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik

Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudara untuk memilih salah satu jawaban yang paling Saudara yakini mewakili jawaban dari pertanyaan yang diuraikan.

18. Menurut saudara, pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sangat mempengaruhi pola perilaku kehidupan sosial masyarakat di desa
- A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju



19. Menurut saudara, pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sangat mempengaruhi eksistensi kebudayaan / kebiasaan masyarakat setempat  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
20. Menurut saudara, kebudayaan / kebiasaan masyarakat setempat sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
21. Menurut saudara, pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sangat dipengaruhi untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju
22. Menurut saudara, motif ekonomi sangat mempengaruhi keterlibatan masyarakat perdesaan dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan  
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju E. Sangat tidak setuju

**Variabel : Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan**

**Dimensi : Ukuran tingkat keluarga sejahtera menurut BKKBN**

Sebelum Saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, perlu Saudara ketahui bahwa yang dimaksud dengan anggota keluarga adalah : Ayah, Ibu, dan Anak

Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudara untuk memilih salah satu jawaban yang paling Saudara yakini mewakili jawaban dari pertanyaan yang diuraikan.

23. Seluruh anggota keluarga Saudara senantiasa menjalankan sariat dari agama yang sama  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah
24. Seluruh anggota keluarga Saudara senantiasa dapat melaksanakan ibadah secara teratur  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah
25. Seluruh anggota keluarga Saudara senantiasa dapat makan 3 kali dalam sehari  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah
26. Seluruh anggota keluarga Saudara senantiasa menggunakan pakaian yang berbeda dalam beraktivitas didalam dan diluar rumah  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah
27. Apakah seluruh lantai ruangan dirumah Saudara sudah disemen atau dikeramik ?  
A. Sudah B. Hampir C. Sebahagian D. Hampir tidak E. Tidak ada  
keseluruhan keseluruhan ada



28. Bila ada anggota keluarga yang sakit, apakah Saudara senantiasa membawanya berobat ke puskesmas atau rumah sakit ?  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah
29. Keluarga Saudara senantiasa dapat mengkonsumsi daging 1 kali dalam seminggu ?  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah
30. Seluruh anggota keluarga Saudara senantiasa memperoleh pakaian baru minimal 1 kali dalam setahun ?  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah
31. Apakah kondisi rumah Saudara cukup luas untuk seluruh anggota keluarga ?  
A. Sangat luas B. Luas C. Cukup D. Sempit E. Sangat sempit
32. Seluruh anggota keluarga Saudara bisa membaca dan menulis (tidak termasuk anak yang belum bersekolah / dibawah umur 6 tahun kebawah)  
A. Semua bisa B. Hampir C. Sebahagian D. Hampir tidak E. Tidak ada yang  
semua bisa saja Ada yang bisa bisa
33. Apakah seluruh anak-anak Saudara yang berumur 6 tahun keatas bersekolah ?  
A. Semuanya B. Hampir semua C. Sebahagian D. Hampir tidak ada E. Tidak ada
34. Apakah Saudara atau pasangan Saudara menggunakan alat kontrasepsi (ber-KB) ?  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah
35. Apakah Saudara senantiasa dapat menyisihkan penghasilan keluarga untuk menabung secara rutin ?  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah
36. Apakah keluarga Saudara senantiasa menjadwalkan pergi berekreasi / bertamasya 1 kali dalam 6 bulan ?  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah
37. Apakah keluarga Saudara senantiasa berlangganan surat kabar / majalah secara rutin ?  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah
38. Apakah seluruh anggota keluarga Saudara senantiasa menonton televisi di rumah ?  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah
39. Dalam berpergian, apakah Saudara dan anggota keluarga senantiasa menggunakan mobil pribadi ?  
A. Selalu B. Sering C. Kadang-kadang D. Hampir tidak pernah E. Tidak pernah

40. Apakah keluarga Saudara senantiasa secara rutin memberikan sumbangan material kepada lembaga sosial / kegiatan sosial ?
- A. Selalu    B. Sering    C. Kadang-kadang    D. Hampir tidak pernah    E. Tidak pernah
41. Adakah anggota keluarga Saudara yang senantiasa terlibat secara aktif dalam kepengurusan / keanggotaan organisasi kemasyarakatan ?
- A. Semuanya    B. Hampir semua    C. Sebahagian    D. Hampir tidak ada    E. Tidak ada



















LAMPIRAN 3

**TRANSFORMASI DATA ORDINAL MENJADI DATA INTERVAL  
DENGAN MENGGUNAKAN METODE MSI (METHOD OF SUCCESSIVE INTERVAL)**

Col	Category	Freq	Prop	Cum	Density	Z	Scale
1	2	2	0,008	0,008	0,021	-2,423	1,000
	3	15	0,058	0,065	0,127	-1,511	1,912
	4	117	0,450	0,515	0,399	0,039	3,150
	5	126	0,485	1,000	0,000		4,576
2	3	14	0,054	0,054	0,109	-1,609	1,000
	4	120	0,462	0,515	0,399	0,039	2,405
	5	126	0,485	1,000	0,000		3,854
3	2	4	0,015	0,015	0,039	-2,160	1,000
	3	56	0,215	0,231	0,304	-0,736	2,283
	4	126	0,485	0,715	0,339	0,569	3,443
	5	74	0,285	1,000	0,000		4,708
4	3	15	0,058	0,058	0,116	-1,574	1,000
	4	148	0,569	0,627	0,379	0,324	2,540
	5	97	0,373	1,000	0,000		4,017
5	3	4	0,015	0,015	0,039	-2,160	1,000
	4	148	0,569	0,585	0,390	0,214	2,899
	5	108	0,415	1,000	0,000		4,454
6	1	2	0,008	0,008	0,021	-2,423	1,000
	2	5	0,019	0,027	0,062	-1,928	1,621
	3	14	0,054	0,081	0,150	-1,400	2,127
	4	107	0,412	0,492	0,399	-0,019	3,148
	5	132	0,508	1,000	0,000		4,539
7	2	1	0,004	0,004	0,011	-2,665	1,000
	3	48	0,185	0,188	0,270	-0,884	2,573
	4	117	0,450	0,638	0,375	0,354	3,741
	5	94	0,362	1,000	0,000		5,010
8	1	2	0,008	0,008	0,021	-2,423	1,000
	2	3	0,012	0,019	0,047	-2,070	1,529
	3	20	0,077	0,096	0,171	-1,304	2,145
	4	126	0,485	0,581	0,391	0,204	3,298
	5	109	0,419	1,000	0,000		4,685
9	2	3	0,012	0,012	0,030	-2,272	1,000
	3	28	0,108	0,119	0,199	-1,179	2,048
	4	138	0,531	0,650	0,370	0,385	3,294
	5	91	0,350	1,000	0,000		4,675
10	2	4	0,015	0,015	0,039	-2,160	1,000
	3	17	0,065	0,081	0,150	-1,400	1,817
	4	160	0,615	0,696	0,350	0,513	3,191
	5	79	0,304	1,000	0,000		4,667
11	2	1	0,004	0,004	0,011	-2,665	1,000
	3	17	0,065	0,069	0,133	-1,482	2,113
	4	114	0,438	0,508	0,399	0,019	3,368
	5	128	0,492	1,000	0,000		4,784
12	2	3	0,012	0,012	0,030	-2,272	1,000
	3	28	0,108	0,119	0,199	-1,179	2,048
	4	127	0,488	0,608	0,384	0,273	3,237
	5	102	0,392	1,000	0,000		4,596
13	2	5	0,019	0,019	0,047	-2,070	1,000



Col	Category	Freq	Prop	Cum	Density	Z	Scale
	3	27	0,104	0,123	0,204	-1,160	1,925
	4	144	0,554	0,677	0,359	0,459	3,155
	5	84	0,323	1,000	0,000		4,547
14	1	2	0,008	0,008	0,021	-2,423	1,000
	2	4	0,015	0,023	0,055	-1,994	1,578
	3	31	0,119	0,142	0,225	-1,070	2,324
	4	131	0,504	0,646	0,372	0,375	3,462
	5	92	0,354	1,000	0,000		4,804
15	2	9	0,035	0,035	0,077	-1,817	1,000
	3	64	0,246	0,281	0,337	-0,581	2,154
	4	128	0,492	0,773	0,301	0,749	3,285
	5	59	0,227	1,000	0,000		4,540
16	2	6	0,023	0,023	0,055	-1,994	1,000
	3	29	0,117	0,135	0,217	-1,105	1,915
	4	133	0,512	0,646	0,372	0,375	3,065
	5	92	0,354	1,000	0,000		4,419
17	2	5	0,019	0,019	0,047	-2,070	1,000
	3	54	0,208	0,227	0,301	-0,749	2,210
	4	143	0,550	0,777	0,298	0,762	3,441
	5	58	0,223	1,000	0,000		4,773
18	1	1	0,004	0,004	0,011	-2,665	1,000
	2	24	0,092	0,096	0,171	-1,304	2,250
	3	48	0,185	0,281	0,337	-0,581	3,072
	4	145	0,558	0,838	0,245	0,988	4,139
	5	42	0,162	1,000	0,000		5,490
19	1	13	0,050	0,050	0,103	-1,645	1,000
	2	63	0,242	0,292	0,344	-0,547	2,070
	3	54	0,208	0,500	0,399	0,000	2,796
	4	105	0,404	0,904	0,171	1,304	3,628
	5	25	0,096	1,000	0,000		4,836
20	1	8	0,031	0,031	0,069	-1,870	1,000
	2	21	0,081	0,112	0,190	-1,218	1,767
	3	41	0,158	0,269	0,330	-0,615	2,369
	4	149	0,573	0,842	0,241	1,004	3,414
	5	41	0,158	1,000	0,000	8,161	4,787
21	1	19	0,073	0,073	0,139	-1,453	1,000
	2	76	0,292	0,365	0,376	-0,344	2,087
	3	26	0,100	0,465	0,397	-0,087	2,685
	4	75	0,288	0,754	0,315	0,687	3,184
	5	64	0,246	1,000	0,000		4,179
22	1	3	0,012	0,012	0,030	-2,272	1,000
	2	25	0,096	0,108	0,185	-1,239	2,004
	3	11	0,042	0,150	0,233	-1,036	2,483
	4	154	0,592	0,742	0,323	0,650	3,465
	5	67	0,258	1,000	0,000		4,869
23	3	8	0,031	0,031	0,069	-1,870	1,000
	4	19	0,073	0,104	0,180	-1,260	1,741
	5	233	0,896	1,000	0,000		3,460
24	3	29	0,112	0,112	0,190	-1,218	1,000
	4	40	0,154	0,265	0,328	-0,627	1,807
	5	191	0,735	1,000	0,000		3,149
25	3	38	0,146	0,146	0,229	-1,053	1,000
	4	33	0,127	0,273	0,333	-0,604	1,753



Col	Category	Freq	Prop	Cum	Density	Z	Scale
	5	189	0,727	1,000	0,000		3,025
26	1	6	0,023	0,023	0,055	-1,994	1,000
	2	2	0,008	0,031	0,069	-1,870	1,439
	3	68	0,262	0,292	0,344	-0,547	2,320
	4	47	0,181	0,473	0,398	-0,068	3,067
	5	137	0,527	1,000	0,000		4,123
27	1	31	0,119	0,119	0,199	-1,179	1,000
	2	11	0,042	0,162	0,245	-0,988	1,590
	3	99	0,381	0,542	0,397	0,106	2,271
	4	46	0,177	0,719	0,337	0,581	3,007
	5	73	0,281	1,000	0,000		3,871
28	3	80	0,308	0,308	0,352	-0,502	1,000
	4	59	0,227	0,535	0,397	0,087	1,941
	5	121	0,465	1,000	0,000		2,997
29	1	15	0,058	0,058	0,116	-1,574	1,000
	2	9	0,035	0,092	0,165	-1,327	1,559
	3	136	0,523	0,615	0,382	0,293	2,588
	4	45	0,173	0,788	0,289	0,801	3,538
	5	55	0,212	1,000	0,000		4,370
30	1	9	0,035	0,035	0,077	-1,817	1,000
	2	6	0,023	0,058	0,116	-1,574	1,525
	3	85	0,327	0,385	0,382	-0,293	2,397
	4	53	0,204	0,588	0,389	0,224	3,178
	5	107	0,412	1,000	0,000		4,158
31	1	2	0,008	0,008	0,021	-2,423	1,000
	2	31	0,119	0,127	0,208	-1,141	2,186
	3	183	0,704	0,831	0,252	0,957	3,690
	4	37	0,142	0,973	0,062	1,928	5,089
	5	7	0,027	1,000	0,000		6,063
32	2	1	0,004	0,004	0,011	-2,665	1,000
	3	22	0,085	0,088	0,160	-1,350	2,214
	4	26	0,100	0,188	0,270	-0,884	2,877
	5	211	0,812	1,000	0,000		4,307
33	1	12	0,046	0,046	0,097	-1,683	1,000
	2	4	0,015	0,062	0,122	-1,542	1,486
	3	48	0,185	0,246	0,315	-0,687	2,047
	4	22	0,085	0,331	0,362	-0,438	2,537
	5	174	0,669	1,000	0,000		3,638
34	1	34	0,131	0,131	0,212	-1,123	1,000
	2	8	0,031	0,162	0,245	-0,988	1,570
	3	96	0,369	0,531	0,398	0,077	2,210
	4	20	0,077	0,608	0,384	0,273	2,799
	5	102	0,392	1,000	0,000		3,604
35	1	30	0,115	0,115	0,195	-1,198	1,000
	2	11	0,042	0,158	0,241	-1,004	1,588
	3	143	0,550	0,708	0,344	0,547	2,500
	4	34	0,131	0,838	0,245	0,988	3,441
	5	42	0,162	1,000	0,000		4,202
36	1	85	0,327	0,327	0,361	-0,448	1,000
	2	36	0,138	0,465	0,397	-0,087	1,839
	3	114	0,438	0,904	0,171	1,304	2,621
	4	14	0,054	0,958	0,090	1,725	3,595
	5	11	0,042	1,000	0,000		4,235



Col	Category	Freq	Prop	Cum	Density	Z	Scale
37	1	143	0,550	0,550	0,396	0,126	1,000
	2	43	0,165	0,715	0,339	0,569	2,061
	3	63	0,242	0,958	0,090	1,725	2,748
	4	4	0,015	0,973	0,062	1,928	3,540
	5	7	0,027	1,000	0,000		4,029
38	1	22	0,085	0,085	0,155	-1,375	1,000
	3	43	0,165	0,250	0,318	-0,674	1,849
	4	83	0,319	0,569	0,393	0,174	2,597
	5	112	0,431	1,000	0,000		3,745
39	1	174	0,669	0,669	0,362	0,438	1,000
	2	44	0,169	0,838	0,245	0,988	2,237
	3	27	0,104	0,942	0,116	1,574	2,787
	4	5	0,019	0,962	0,083	1,769	3,208
	5	10	0,038	1,000	0,000	8,161	3,712
40	1	18	0,069	0,069	0,133	-1,482	1,000
	2	6	0,023	0,092	0,165	-1,327	1,522
	3	148	0,569	0,662	0,366	0,417	2,571
	4	61	0,235	0,896	0,180	1,260	3,713
	5	27	0,104	1,000	0,000	8,161	4,660
41	1	21	0,081	0,081	0,150	-1,400	1,000
	2	3	0,012	0,092	0,165	-1,327	1,491
	3	194	0,746	0,838	0,245	0,988	2,748
	4	29	0,112	0,950	0,103	1,645	4,124
	5	13	0,050	1,000	0,000		4,917











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483																	







## Lampiran 5.1

## TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS PRODUCT MOMENT

No Responden	Item 1 (X)	Skor Total (Y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1	5	37	25	1369	185
2	5	45	25	2025	225
3	5	44	25	1936	220
4	5	41	25	1681	205
5	5	41	25	1681	205
6	5	38	25	1444	190
7	5	39	25	1521	195
8	5	44	25	1936	220
9	4	36	16	1296	144
10	5	37	25	1369	185
11	5	40	25	1600	200
12	4	33	16	1089	132
13	5	41	25	1681	205
14	5	45	25	2025	225
15	5	38	25	1444	190
16	4	40	16	1600	160
17	5	45	25	2025	225
18	4	40	16	1600	160
19	5	41	25	1681	205
20	5	39	25	1521	195
21	5	45	25	2025	225
22	4	38	16	1444	152
23	5	41	25	1681	205
24	5	36	25	1296	180
25	5	43	25	1849	215
26	4	36	16	1296	144
27	4	36	16	1296	144
28	5	42	25	1764	210
29	3	33	9	1089	99
30	4	34	16	1156	136
31	5	45	25	2025	225
32	4	42	16	1764	168
33	5	39	25	1521	195
34	5	40	25	1600	200
35	5	38	25	1444	190
36	4	41	16	1681	164
37	4	41	16	1681	164
38	4	37	16	1369	148
39	5	45	25	2025	225
40	5	45	25	2025	225
41	5	42	25	1764	210
42	4	41	16	1681	164
43	5	43	25	1849	215
44	5	42	25	1764	210
45	5	45	25	2025	225
46	4	36	16	1296	144
47	4	40	16	1600	160
48	5	39	25	1521	195
49	5	44	25	1936	220
50	5	39	25	1521	195

No Responden	Item 1 (X)	Skor Total (Y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
51	5	40	25	1600	200
52	5	43	25	1849	215
53	4	37	16	1369	148
54	4	36	16	1296	144
55	4	40	16	1600	160
56	4	36	16	1296	144
57	4	37	16	1369	148
58	3	36	9	1296	108
59	5	45	25	2025	225
60	4	37	16	1369	148
61	5	38	25	1444	190
62	3	34	9	1156	102
63	4	34	16	1156	136
64	4	40	16	1600	160
65	5	39	25	1521	195
66	4	37	16	1369	148
67	4	35	16	1225	140
68	4	39	16	1521	156
69	5	45	25	2025	225
70	4	39	16	1521	156
71	5	38	25	1444	190
72	5	45	25	2025	225
73	4	37	16	1369	148
74	5	42	25	1764	210
75	3	32	9	1024	96
76	4	37	16	1369	148
77	4	38	16	1444	152
78	4	39	16	1521	156
79	4	39	16	1521	156
80	4	37	16	1369	148
81	4	36	16	1296	144
82	4	43	16	1849	172
83	4	40	16	1600	160
84	4	34	16	1156	136
85	4	38	16	1444	152
86	4	33	16	1089	132
87	3	35	9	1225	105
88	3	32	9	1024	96
89	5	37	25	1369	185
90	5	36	25	1296	180
91	4	32	16	1024	128
92	4	37	16	1369	148
93	5	45	25	2025	225
94	4	36	16	1296	144
95	4	41	16	1681	164
96	4	37	16	1369	148
97	5	43	25	1849	215
98	5	37	25	1369	185
99	4	36	16	1296	144
100	5	40	25	1600	200
101	5	45	25	2025	225
102	4	33	16	1089	132
103	5	40	25	1600	200
104	5	40	25	1600	200



No Responden	Item 1 (X)	Skor Total (Y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
105	4	32	16	1024	128
106	4	36	16	1296	144
107	5	43	25	1849	215
108	4	25	16	625	100
109	4	39	16	1521	156
110	2	34	4	1156	68
111	5	42	25	1764	210
112	4	40	16	1600	160
113	4	35	16	1225	140
114	4	39	16	1521	156
115	5	43	25	1849	215
116	5	44	25	1936	220
117	5	41	25	1681	205
118	5	32	25	1024	160
119	5	32	25	1024	160
120	4	41	16	1681	164
121	4	35	16	1225	140
122	4	40	16	1600	160
123	4	36	16	1296	144
124	4	32	16	1024	128
125	3	36	9	1296	108
126	5	45	25	2025	225
127	5	33	25	1089	165
128	5	39	25	1521	195
129	4	36	16	1296	144
130	4	33	16	1089	132
131	5	41	25	1681	205
132	4	36	16	1296	144
133	5	41	25	1681	205
134	5	40	25	1600	200
135	5	43	25	1849	215
136	5	43	25	1849	215
137	4	37	16	1369	148
138	4	37	16	1369	148
139	4	34	16	1156	136
140	4	39	16	1521	156
141	4	43	16	1849	172
142	4	40	16	1600	160
143	4	34	16	1156	136
144	4	38	16	1444	152
145	4	33	16	1089	132
146	3	35	9	1225	105
147	3	32	9	1024	96
148	5	37	25	1369	185
149	5	36	25	1296	180
150	4	32	16	1024	128
151	4	37	16	1369	148
152	5	45	25	2025	225
153	5	40	25	1600	200
154	5	45	25	2025	225
155	4	33	16	1089	132
156	5	40	25	1600	200
157	5	40	25	1600	200
158	4	32	16	1024	128

No Responden	Item 1 (X)	Skor Total (Y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
159	4	36	16	1296	144
160	5	43	25	1849	215
161	4	25	16	625	100
162	4	39	16	1521	156
163	2	34	4	1156	68
164	5	42	25	1764	210
165	4	40	16	1500	160
166	4	35	16	1225	140
167	4	39	16	1521	156
168	5	43	25	1849	215
169	4	41	16	1681	164
170	5	43	25	1849	215
171	5	42	25	1764	210
172	5	45	25	2025	225
173	4	36	16	1296	144
174	4	40	16	1500	160
175	5	39	25	1521	195
176	5	44	25	1936	220
177	5	39	25	1521	195
178	5	40	25	1600	200
179	5	43	25	1849	215
180	4	37	15	1369	148
181	4	36	15	1296	144
182	4	40	15	1600	160
183	4	36	15	1296	144
184	4	37	15	1369	148
185	3	36	9	1296	108
186	5	44	25	1936	220
187	5	37	25	1369	185
188	5	45	25	2025	225
189	5	44	25	1936	220
190	5	41	25	1681	205
191	5	41	25	1681	205
192	5	38	25	1444	190
193	5	39	25	1521	195
194	5	44	25	1936	220
195	4	36	15	1296	144
196	5	37	25	1369	185
197	5	40	25	1600	200
198	4	33	16	1089	132
199	5	41	25	1681	205
200	5	45	25	2025	225
201	5	38	25	1444	190
202	5	41	25	1681	205
203	5	40	25	1600	200
204	5	43	25	1849	215
205	5	43	25	1849	215
206	4	37	16	1369	148
207	4	37	16	1369	148
208	4	34	16	1156	136
209	4	39	16	1521	156
210	4	43	16	1849	172
211	4	40	16	1600	160
212	4	34	16	1156	136



No Responden	Item 1 (X)	Skor Total (Y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
213	4	38	16	1444	152
214	4	33	16	1089	132
215	3	35	9	1225	105
216	3	32	9	1024	96
217	5	37	25	1369	185
218	5	36	25	1296	180
219	4	32	16	1024	128
220	4	37	16	1369	148
221	5	45	25	2025	225
222	5	40	25	1500	200
223	5	45	25	2025	225
224	4	33	16	1089	132
225	5	40	25	1500	200
226	5	37	25	1369	185
227	5	40	25	1500	200
228	4	33	16	1089	132
229	5	41	25	1681	205
230	5	45	25	2025	225
231	5	38	25	1444	190
232	5	41	25	1681	205
233	5	40	25	1600	200
234	5	43	25	1849	215
235	5	43	25	1849	215
236	4	37	16	1369	148
237	4	37	16	1369	148
238	4	34	16	1156	136
239	4	39	16	1521	156
240	4	43	16	1849	172
241	4	40	16	1600	160
242	4	34	16	1156	136
243	4	38	16	1444	152
244	4	33	16	1089	132
245	3	35	9	1225	105
246	3	32	9	1024	96
247	5	37	25	1369	185
248	5	44	25	1936	220
249	5	39	25	1521	195
250	5	40	25	1600	200
251	5	43	25	1849	215
252	4	37	16	1369	148
253	4	36	16	1296	144
254	4	40	16	1600	160
255	4	36	16	1296	144
256	4	37	16	1369	148
257	3	36	9	1296	108
258	5	44	25	1936	220
259	5	37	25	1369	185
260	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>1142</b>	<b>10011</b>	<b>5140</b>	<b>390805</b>	<b>44527</b>

## Lampiran 5.2

TABEL PERHITUNGAN RELIABILITAS SPLIT HALF

No Responden	Skor Item Ganjil (X)	Skor Item Genap (Y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1	42	45	1764	2025	1890
2	52	53	2704	2809	2756
3	55	54	3025	2916	2970
4	46	47	2116	2209	2162
5	47	49	2209	2401	2303
6	42	49	1764	2401	2058
7	45	44	2025	1936	1980
8	51	54	2601	2916	2754
9	41	44	1681	1936	1804
10	47	43	2209	1849	2021
11	45	45	2025	2025	2025
12	39	38	1521	1444	1482
13	41	45	1681	2025	1845
14	51	52	2601	2704	2652
15	40	44	1600	1936	1760
16	42	46	1764	2116	1932
17	49	54	2401	2916	2646
18	45	46	2025	2116	2070
19	47	49	2209	2401	2303
20	40	46	1600	2116	1840
21	54	53	2916	2809	2862
22	48	48	2304	2304	2304
23	45	44	2025	1936	1980
24	40	42	1600	1764	1680
25	47	52	2209	2704	2444
26	45	44	2025	1936	1980
27	45	44	2025	1936	1980
28	48	47	2304	2209	2256
29	37	42	1369	1764	1554
30	38	41	1444	1681	1558
31	53	55	2809	3025	2915
32	48	48	2304	2304	2304
33	44	45	1936	2025	1980
34	45	46	2025	2116	2070
35	47	45	2209	2025	2115
36	46	46	2116	2116	2116
37	49	49	2401	2401	2401
38	45	48	2025	2304	2160
39	55	55	3025	3025	3025
40	55	55	3025	3025	3025
41	47	48	2209	2304	2256
42	46	48	2116	2304	2208
43	48	48	2304	2304	2304
44	45	50	2025	2500	2250
45	52	52	2704	2704	2704
46	45	45	2025	2025	2025
47	45	43	2025	1849	1935
48	46	45	2116	2025	2070
49	44	49	1936	2401	2156
50	40	45	1600	2025	1800



No Responden	Skor Item Ganjil (X)	Skor Item Genap (Y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
51	49	48	2401	2304	2352
52	48	50	2304	2500	2400
53	40	44	1600	1936	1760
54	44	40	1936	1600	1760
55	41	49	1681	2401	2009
56	44	40	1936	1600	1760
57	42	46	1764	2116	1932
58	41	46	1681	2116	1886
59	48	49	2304	2401	2352
60	44	44	1936	1936	1936
61	46	44	2116	1936	2024
62	42	44	1764	1936	1848
63	41	38	1681	1444	1558
64	43	43	1849	1849	1849
65	45	44	2025	1936	1980
66	40	44	1600	1936	1760
67	41	41	1681	1681	1681
68	45	48	2025	2304	2160
69	54	54	2916	2916	2916
70	45	48	2025	2304	2160
71	39	40	1521	1600	1560
72	53	53	2809	2809	2809
73	38	37	1444	1369	1406
74	50	48	2500	2304	2400
75	37	38	1369	1444	1406
76	43	44	1849	1936	1892
77	45	46	2025	2116	2070
78	45	45	2025	2025	2025
79	46	45	2116	2025	2070
80	43	43	1849	1849	1849
81	44	44	1936	1936	1936
82	47	51	2209	2601	2397
83	45	47	2025	2209	2115
84	37	40	1369	1600	1480
85	42	44	1764	1936	1848
86	39	43	1521	1849	1677
87	36	46	1296	2116	1656
88	34	39	1156	1521	1326
89	42	44	1764	1936	1848
90	42	42	1764	1764	1764
91	44	39	1936	1521	1716
92	44	49	1936	2401	2156
93	47	46	2209	2116	2162
94	41	47	1681	2209	1927
95	45	47	2025	2209	2115
96	45	42	2025	1764	1890
97	51	55	2601	3025	2805
98	41	42	1936	1764	1848
99	42	43	1764	1849	1806
100	45	43	2025	1849	1935
101	55	55	3025	3025	3025
102	42	39	1764	1521	1638
103	50	48	2500	2304	2400
104	42	49	1764	2401	2058

No Responden	Skor Item Ganjil (X)	Skor Item Genap (Y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
105	36	37	1296	1369	1332
106	43	42	1849	1764	1806
107	51	47	2601	2209	2397
108	40	32	1600	1024	1280
109	44	48	1936	2304	2112
110	39	42	1521	1764	1638
111	53	49	2809	2401	2597
112	45	48	2025	2304	2160
113	41	44	1681	1936	1804
114	45	48	2025	2304	2160
115	48	51	2304	2601	2448
116	49	54	2401	2916	2646
117	48	47	2304	2209	2256
118	37	39	1369	1521	1443
119	37	37	1369	1369	1369
120	46	50	2116	2500	2300
121	39	42	1521	1764	1638
122	47	50	2209	2500	2350
123	40	41	1600	1681	1640
124	40	38	1600	1444	1520
125	38	45	1444	2025	1710
126	53	53	2809	2809	2809
127	42	42	1764	1764	1764
128	47	46	2209	2116	2162
129	39	38	1521	1444	1482
130	38	38	1444	1444	1444
131	43	51	1849	2601	2193
132	44	44	1936	1936	1936
133	50	50	2500	2500	2500
134	44	46	1936	2116	2024
135	54	54	2916	2916	2916
136	45	51	2025	2601	2295
137	44	44	1936	1936	1936
138	44	41	1936	1936	1936
139	40	45	1600	2025	1800
140	40	43	1600	1849	1720
141	47	51	2209	2601	2397
142	45	47	2025	2209	2115
143	37	40	1369	1600	1480
144	42	44	1764	1936	1848
145	39	43	1521	1849	1677
146	36	46	1296	2116	1656
147	34	39	1156	1521	1326
148	42	44	1764	1936	1848
149	42	42	1764	1764	1764
150	44	39	1936	1521	1716
151	44	49	1936	2401	2156
152	47	46	2209	2116	2162
153	45	43	2025	1849	1935
154	55	55	3025	3025	3025
155	42	39	1764	1521	1638
156	50	48	2500	2304	2400
157	42	49	1764	2401	2058
158	36	37	1296	1369	1332



No Responden	Skor Item Ganjil (X)	Skor Item Genap (Y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
159	43	42	1849	1764	1806
160	51	47	2601	2209	2397
161	40	32	1600	1024	1280
162	44	48	1936	2304	2112
163	39	42	1521	1764	1638
164	53	49	2809	2401	2597
165	45	48	2025	2304	2160
166	41	44	1681	1936	1804
167	45	48	2025	2304	2160
168	48	51	2304	2601	2448
169	46	48	2116	2304	2208
170	48	48	2304	2304	2304
171	45	50	2025	2500	2250
172	52	52	2704	2704	2704
173	45	45	2025	2025	2025
174	45	43	2025	1849	1935
175	46	45	2116	2025	2070
176	44	49	1936	2401	2156
177	40	45	1600	2025	1800
178	49	48	2401	2304	2352
179	48	50	2304	2500	2400
180	40	44	1600	1936	1760
181	44	40	1936	1600	1760
182	41	49	1681	2401	2009
183	44	40	1936	1600	1760
184	42	46	1764	2116	1932
185	41	46	1681	2116	1886
186	50	51	2500	2601	2550
187	42	45	1764	2025	1890
188	52	53	2704	2809	2756
189	55	54	3025	2916	2970
190	46	47	2116	2209	2162
191	47	49	2209	2401	2303
192	42	49	1764	2401	2058
193	45	44	2025	1936	1980
194	51	54	2601	2916	2754
195	41	44	1681	1936	1804
196	47	43	2209	1849	2021
197	45	45	2025	2025	2025
198	39	38	1521	1444	1482
199	41	45	1681	2025	1845
200	51	52	2601	2704	2652
201	40	44	1600	1936	1760
202	50	50	2500	2500	2500
203	44	46	1936	2116	2024
204	54	54	2916	2916	2916
205	45	51	2025	2601	2295
206	44	44	1936	1936	1936
207	44	44	1936	1936	1936
208	40	45	1600	2025	1800
209	40	43	1600	1849	1720
210	47	51	2209	2601	2397
211	45	47	2025	2209	2115
212	37	40	1369	1600	1480

No Responden	Skor Item Ganjil (X)	Skor Item Genap (Y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
213	42	44	1764	1936	1848
214	39	43	1521	1849	1677
215	36	46	1296	2116	1656
216	34	39	1156	1521	1326
217	42	44	1764	1936	1848
218	42	42	1764	1764	1764
219	44	39	1936	1521	1716
220	44	49	1936	2401	2156
221	47	46	2209	2116	2162
222	45	43	2025	1849	1935
223	55	55	3025	3025	3025
224	42	39	1764	1521	1638
225	50	48	2500	2304	2400
226	47	43	2209	1849	2021
227	45	45	2025	2025	2025
228	39	38	1521	1444	1482
229	41	45	1681	2025	1845
230	51	52	2601	2704	2652
231	40	44	1600	1936	1760
232	50	50	2500	2500	2500
233	44	46	1936	2116	2024
234	54	54	2916	2916	2916
235	45	51	2025	2601	2295
236	44	44	1936	1936	1936
237	44	44	1936	1936	1936
238	40	45	1600	2025	1800
239	40	43	1600	1849	1720
240	47	51	2209	2601	2397
241	45	47	2025	2209	2115
242	37	40	1369	1600	1480
243	42	44	1764	1936	1848
244	39	43	1521	1849	1677
245	36	46	1296	2116	1656
246	34	39	1156	1521	1326
247	42	44	1764	1936	1848
248	44	49	1936	2401	2156
249	40	45	1600	2025	1800
250	49	48	2401	2304	2352
251	48	50	2304	2500	2400
252	40	44	1600	1936	1760
253	44	40	1936	1600	1760
254	41	49	1681	2401	2009
255	44	40	1936	1600	1760
256	42	46	1764	2116	1932
257	41	46	1681	2116	1886
258	50	51	2500	2601	2550
259	42	45	1764	2025	1890
260	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>11474</b>	<b>11856</b>	<b>513828</b>	<b>547900</b>	<b>529333</b>



**LAMPIRAN 6.1**  
**REKAPITULASI DATA IDENTITAS RESPONDEN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN**

No	Kecamatan	Responden	Kelompok umur						Jenis kelamin	
			20 kebawah	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 keatas	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Luak	88 Persentase	2 2,27	21 23,86	28 31,82	23 26,14	14 15,91	44 50,00	44 50,00	
2	Situjuh Limo Nagari	85 Persentase	3 3,53	25 29,41	34 40,00	17 20,00	6 7,06	40 47,06	45 52,94	
3	Guguak	87 Persentase	3 3,45	22 25,29	34 39,08	14 16,09	14 16,09	39 44,83	48 55,17	
<b>Jumlah keseluruhan</b>			<b>260</b>	<b>8</b>	<b>68</b>	<b>96</b>	<b>54</b>	<b>34</b>	<b>123</b>	<b>137</b>
			<b>Persentase</b>	<b>3,08</b>	<b>26,15</b>	<b>36,92</b>	<b>20,77</b>	<b>13,08</b>	<b>47,31</b>	<b>52,69</b>

**LAMPIRAN 6.2**  
**REKAPITULASI DATA IDENTITAS RESPONDEN BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN DAN JUMLAH ANAK**

No	Kecamatan	Responden	Status Perkawinan				Jumlah anak	
			Menikah	Janda	Duda	Tidak ada	1 s/d 3	Lebih dari 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Luak	88 Persentase	79 89,77	6 6,82	3 3,41	29 32,95	43 48,86	16 18,18
2	Situjuah Limo Nagari	85 Persentase	78 91,76	4 4,71	3 3,53	22 25,88	50 58,82	13 15,29
3	Guguak	87 Persentase	80 91,95	5 5,75	2 2,30	23 26,44	48 55,17	16 18,39
<b>Jumlah keseluruhan</b>			<b>237</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>141</b>	<b>45</b>
<b>Persentase</b>			<b>91,15</b>	<b>5,77</b>	<b>3,08</b>	<b>28,46</b>	<b>54,23</b>	<b>17,31</b>



**LAMPIRAN 6.3**  
**REKAPITULASI DATA IDENTITAS RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Kecamatan	Responden	Pendidikan				
			Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Luak	88 Persentase	0	5 5,68	19 21,59	55 62,50	9 10,23
2	Situjuah Limo Nagari	85 Persentase	1 1,18	5 5,88	17 20,00	46 54,12	16 18,82
3	Guguak	87 Persentase	1 1,15	4 4,60	17 19,54	50 57,47	15 17,24
<b>Jumlah keseluruhan</b>			<b>2</b>	<b>14</b>	<b>53</b>	<b>151</b>	<b>40</b>
<b>Persentase</b>			<b>0,77</b>	<b>5,38</b>	<b>20,38</b>	<b>58,08</b>	<b>15,38</b>

**LAMPIRAN 6.4**  
**REKAPITULASI DATA IDENTITAS RESPONDEN BERDASARKAN KATEGORI BLT**

No	Kecamatan	Responden	Bantuan langsung tunai / BLT	
			Penerima	Bkn Penerima
1	2	3	4	5
1	Luak	88 Persentase	14 15,91	74 84,09
2	Situjuah Limo Nagari	85 Persentase	7 8,24	78 91,76
3	Guguak	87 Persentase	11 12,64	76 87,36
<b>Jumlah keseluruhan</b>		<b>260</b>	<b>32</b>	<b>228</b>
		<b>Persentase</b>	<b>12,31</b>	<b>87,69</b>



Lampiran 7 :

**OUTPUT PROGRAM SPSS ANALISIS KORELASI  
DAN REGRESI GANDA**

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4, X3, X2, X1		Enter

- a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Y

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.133 <sup>a</sup>	.018	.002	8.40639

- a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	326.004	4	81.501	1.153	.332 <sup>a</sup>
	Residual	18020.192	255	70.667		
	Total	18346.196	259			

- a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1  
b. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>b</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero order	Partial	Part
1	(Constant)	53.840	3.928		13.705	.000			
	X1	.174	.166	.105	1.043	.298	.050	.065	.065
	X2	-.384	.252	-.121	-1.522	.129	-.044	-.095	-.094
	X3	.170	.250	.059	.679	.490	.063	.042	.042
	X4	-.184	.176	-.068	-1.044	.298	-.051	-.065	-.065

- a. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	53.840	3.928		13.705	.000
	X1	.174	.166	.105	1.043	.298
	X2	-.384	.252	-.121	-1.522	.129
	X3	.170	.250	.059	.679	.498
	X4	-.184	.176	-.068	-1.044	.298

- a. Dependent Variable: Y















156	5	5	4	3	3	3	3	26	67	58	3	2	3	3	5	5	3	21	70	B	3	1	4	1	10	40	2	2	4	40	Sep 23 II
159	5	5	4	3	3	3	3	20	67	58	3	2	3	3	5	5	3	22	73	B	3	1	4	1	7	28	2	2	4	40	Sep 23 II
160	5	5	4	3	3	3	3	10	100	50	4	5	3	3	3	3	4	4	80	B	3	2	5	2	15	50	2	4	5	50	Sep 23 II
161	5	5	4	3	3	3	3	18	63	50	4	4	3	3	3	3	4	4	80	B	3	2	3	3	13	52	2	3	5	50	Sep 23 II
162	5	5	4	3	3	3	3	20	100	50	5	2	4	3	3	3	3	3	97	B	3	2	5	2	16	72	3	3	5	60	Sep 23 II
163	5	5	4	3	3	3	3	30	100	100	5	3	3	3	3	3	3	28	93	B	3	3	5	5	25	120	5	5	10	120	Sep 23 III
164	5	5	4	3	3	3	3	14	60	60	5	4	3	3	3	3	4	21	60	B	3	2	4	2	12	48	2	4	6	60	Sep 23 II
165	5	5	4	3	3	3	3	28	93	93	5	3	3	3	3	3	3	22	73	B	3	2	4	1	14	56	3	3	6	60	Sep 23 II
166	5	5	4	3	3	3	3	25	63	63	5	3	3	3	3	3	3	25	83	B	3	1	3	1	11	44	3	3	4	40	Sep 23 II
167	5	5	4	3	3	3	3	24	77	77	3	5	4	3	3	3	3	23	77	B	3	1	3	3	11	44	3	3	4	40	Sep 23 II
168	5	5	4	3	3	3	3	18	73	73	3	3	3	3	3	3	3	27	90	B	3	2	3	3	13	52	3	3	4	40	Sep 23 II
169	5	5	4	3	3	3	3	22	73	73	3	3	3	3	3	3	3	18	60	C	3	1	3	3	13	52	3	3	4	40	Sep 23 I
170	5	5	4	3	3	3	3	26	80	80	3	3	3	3	3	3	3	18	60	C	3	2	3	3	13	46	3	3	4	50	Sep 23 I
171	5	5	4	3	3	3	3	30	100	100	3	3	3	3	3	3	3	28	63	B	3	3	3	3	21	84	3	3	4	50	Sep 23 I
172	5	5	4	3	3	3	3	26	87	87	3	3	3	3	3	3	3	21	70	B	3	3	3	3	13	46	3	3	4	40	Sep 23 I
173	5	5	4	3	3	3	3	21	70	70	3	3	3	3	3	3	3	15	50	C	3	2	3	3	13	46	3	3	4	40	Sep 23 I







243	3	3	4	3	5	3	4	28	93	59	4	4	4	5	5	2	73	77	E	3	2	3	4	2	13	60	C	1	3	6	60	C	Section I	
244	3	3	3	5	1	1	1	24	80	B	3	3	3	3	2	19	53	E	2	2	3	1	1	1	10	52	C	1	3	6	60	C	Section I	
245	3	3	1	1	1	1	1	24	80	B	3	3	3	3	1	14	80	B	4	4	1	1	4	1	10	40	C	2	3	6	60	C	Section I	
246	3	3	3	3	4	4	4	29	97	58	4	4	4	5	4	25	83	97	58	4	4	4	5	3	17	60	C	2	3	6	60	C	Section I	
247	3	3	3	3	1	1	1	28	83	53	3	3	3	4	3	23	77	77	53	3	3	1	5	1	11	44	C	4	4	5	50	C	Section I	
248	3	3	3	3	1	1	1	22	72	11	3	3	3	5	3	24	80	80	11	3	3	1	3	1	10	40	C	3	3	6	60	C	Section I	
249	3	3	3	3	1	1	1	25	87	58	3	3	3	5	3	20	67	67	58	3	3	1	5	1	5	48	C	1	3	6	60	C	Section I	
250	3	3	3	3	3	3	3	22	73	6	1	1	1	1	17	57	57	6	1	1	1	1	1	5	20	40	C	1	2	2	20	C	Section I	
251	3	3	3	3	3	3	3	20	81	55	2	2	2	3	3	11	70	70	55	2	2	1	4	1	10	40	C	1	2	3	40	C	Section I	
252	3	3	3	3	1	1	1	20	81	55	2	2	2	3	3	11	70	70	55	2	2	1	4	1	10	28	C	1	2	4	40	C	Section I	
253	3	3	3	3	3	3	3	20	100	93	3	3	3	3	3	24	80	80	93	3	3	3	3	2	15	60	C	3	3	6	60	C	Section I	
254	3	3	3	3	3	3	3	20	93	93	3	3	3	3	3	24	80	80	93	3	3	3	3	2	11	52	C	1	3	6	60	C	Section I	
255	3	3	3	3	3	3	3	27	90	58	4	4	4	4	4	24	80	80	58	4	4	4	4	3	10	64	C	3	3	6	60	C	Section I	
256	3	3	3	3	3	3	3	26	67	6	1	1	1	2	3	17	57	57	6	1	1	1	1	1	5	20	40	C	1	4	4	40	C	Section I
257	3	3	3	3	3	3	3	28	59	58	5	5	5	5	5	25	95	95	58	5	5	1	5	1	13	57	C	1	1	6	63	C	Section I	
258	3	3	3	3	3	3	3	28	53	50	4	4	4	4	4	25	83	83	50	4	4	3	5	1	15	60	C	3	3	6	60	C	Section I	
259	3	3	3	3	3	3	3	28	100	90	4	4	4	4	4	25	107	107	90	4	4	3	5	1	15	60	C	3	3	6	60	C	Section I	
260	3	3	3	3	3	3	3	28	97	58	4	4	4	4	4	25	83	83	58	4	4	3	5	1	15	60	C	3	3	6	60	C	Section I	





**ALOKASI PEMBIAYAAN KEGIATAN PRPPM MANDIRI PEDESAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2008**

NO KEGIATAN	NOMOR	JENIS	JURDID	KEGIATAN	MATA	DIMENSI		KEGIATAN	PEMBAYARAN		SWADAY A	TOTAL	Jumlah Pembiayaan/Target								
						PLS	LEB		UNIT	OP TRK %			OP UPR %	U.P.U P1	U.P.U P2	U.P.U P3					
1	SARANA PRASARANA	SARANA	SARANA	STUJUAN BANGUNAN DALAM	PENGJILAN KUBANG PESONG KE GURUNG 10	3000	6	324.900.200	0.238.500	6.038.300		341.938.500	U/P	300	200	150					
						800	8	224.800.000	7.447.000	4.896.000	248.247.000	U/P	150	100	80						
						2000	8	324.000.000	10.200.000	6.038.300	341.038.300	P	300	150	40						
						1000	1 UNIT	180.200.000	6.802.000	3.802.000	180.000.000	P	100	175	145						
						2250	6	324.200.000	50.245.000	6.802.000	341.247.000	U/P	500	200	200						
						2350	6	280.400.000	9.046.100	6.038.300	301.440.000	U/P	500	400	308						
						3000	6	290.000.000	10.082.500	6.708.300	312.232.000	L	150	143	35						
						1200	6	310.040.200	10.082.500	6.708.300	326.810.000	P	600	599	287						
						800	6	164.200.000	5.185.000	3.442.000	172.647.000	L	200	376	85						
						JUMLAH						16700		2.482.105.600	77.248.400	81.871.900		2.641.225.900	2.790	2.422	1.336
2	SARANA	SARANA	SARANA	STUJUAN BANGUNAN	MAYOR VI	1	1	14.000.000	442.000	204.000		14.786.000	P	8	8	3					
						1	1	17.000.000	882.800	360.000	18.471.000	P	7	7	3						
						1	1	18.000.000	571.800	347.000	17.652.000	P	9	9	4						
						1	1	20.000.000	776.300	404.200	20.210.000	P	11	11	6						
						1	1	30.000.000	1.152.500	708.500	30.421.000	P	14	14	8						
						1	1	27.000.000	632.500	368.500	28.421.000	P	11	11	4						
						1	1	20.000.000	884.000	566.000	20.473.000	P	3	3	4						
						1	1	40.000.000	1.307.000	808.000	40.295.000	P	17	17	8						
						1	1	40.000.000	1.421.000	894.000	40.309.000	P	16	16	10						
						1	1	25.000.000	742.000	404.000	24.798.000	P	20	20	9						
3	SARANA	SARANA	SARANA	STUJUAN BANGUNAN DALAM	MAYOR VII	1	1	30.000.000	947.000	602.000		31.549.000	P	28	28	12					
						1	1	12.000.000	378.000	232.000	12.611.000	P	9	9	3						
						1	1	20.000.000	631.500	471.000	21.042.500	P	11	11	4						
						1	1	18.200.000	512.000	341.000	18.033.000	P	10	10	4						
						1	1	30.000.000	1.107.000	757.000	30.254.000	P	14	14	4						
						JUMLAH						15		347.800.000	13.247.000	8.195.300		428.312.300	279	201	85
						GRAND TOTAL								2.830.005.600	89.495.400	89.967.200		3.000.000.000	2.790	2.422	1.421

Teknik Kegiatan  
1. Bina  
2. Gedung Sempit Cilik  
3. STP

Wali/Petugas/Unit  
Fakhrudin/Kelompok  
36280

Jumlah Dana  
2.353.569.000  
178.097.000  
468.313.300

TOTAL  
3.000.000.000

KECAMATAN : GURUKA

ALOKASI PEMBIAYAAN KEGIATAN INPM MAHDIRI PEDesaAN  
KABUPATEN IBA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2008

NO	REKAMATAN	JENIS	MAGAR	JURONG	KEGIATAN		DIBERI		REKAMATAN	OP TRG 2%	PEMBAYAN		TOTAL	URSAH K. D. / P.	PELOKAN/TAHAP/STASIA			
					MAKA	PKG	UMH	OP TRG 2%			OP UPR 2%	SHAWAFA			LAHANG	PEMBAT	RTM	
1	SABAYU PULAU-KEMAH		SIMPANG SUBURAN	BOHOKAH	JALAN SIRTU & RABAT BETON	1130	2,3	300.000.000	9.571.400	6.447.800	1.225.000	327.624.500	LP	81	74	152		
				LABANG	JALAN RABAT BETON	700	2	182.000.000	6.002.800	4.034.800	2.465.000	254.157.000	LP	86	70	81		
				BELEMEN	JALAN SIRTU & RIBAT BETON	1640	3	323.848.000	10.271.600	6.511.000	2.580.000	344.047.000	LP	178	150	205		
				TALANG	JALAN RABAT BETON	1950	3	320.820.000	10.124.000	6.714.000	2.520.000	344.078.000	LP	245	202	100		
				GUZUKA VII KOTO	JALAN SIRTU & RABAT BETON	825	3	311.815.500	10.461.500	6.887.700	1.750.000	320.134.700	LP	83	104	100		
				BUKALIMASORO	JALAN SIRTU & RABAT BETON	750	3	310.315.000	10.467.500	6.898.900	1.575.000	320.418.200	LP	1000	1500	1000		
				POKONG JEPONG	JALAN SIRTU & RABAT BETON	750	3	310.315.000	10.467.500	6.898.900	1.575.000	320.418.200	LP	1000	1500	1000		
				VII KOTO TALANG	JALAN RABAT BETON	720	3	302.190.000	10.427.000	6.911.000	875.000	308.442.000	LP	171	192	101		
				KUBANG	JALAN RABAT BETON	720	3	302.190.000	10.427.000	6.911.000	875.000	308.442.000	LP	171	192	101		
				Jumlah					7720		2.127.800.000	67.298.000	48.000.000	11.960.000	3.248.698.000		1.447	1.447
2	SIMPANG SUBURAN		BAUK	HEBATI				20.000.000	631.000	421.000		21.021.000	P	28	18			
			BOHOKAH	MAYANG MAUBERSAMA				18.000.000	473.700	318.000		18.791.500	P	43	28			
			SEL TALANG	MAYANG BERDURI				28.000.000	688.700	568.500		29.471.700	P	34	21			
			KALICAN	TAHAI BERTUH				20.000.000	631.000	421.000		21.001.000	P	40	44			
			GUZUKA	KACIKR YANDU				50.000.000	647.400	631.000		51.271.200	P	30	16			
			DELUKUN	PELITA /G				28.000.000	688.700	688.500		29.471.700	P	25	19			
			KORANAI	BATU KULU				20.000.000	631.000	421.000		21.001.000	P	46	50			
			TAUKA	SEANTO MANDIRI				24.500.000	771.700	614.000		25.781.500	P	22	11			
			CIKUNJANG	RAMBUYAN				24.000.000	751.000	562.000		24.291.000	P	17	7			
			CIKUNJANG	TERBATI				20.000.000	631.000	421.000		21.001.000	P	21	11			
3	GUSUKA VII KOTO		CIKUNJANG	STRANAH MANDIRI				20.000.000	788.400	528.400		20.311.500	P	28	28			
			KUBANG TAMPARER	POR DASA WINDA				22.000.000	781.400	528.400		22.511.600	P	48	33			
			DAKUL TALANG	BERKA TALANG				22.000.000	781.400	528.400		22.511.600	P	45	29			
			BERKA BATA	BERKA BATA				22.000.000	781.400	528.400		22.511.600	P	30	16			
			BUKALIMASORO	PER SELATI				22.000.000	681.600	421.000		22.681.600	P	20	10			
			KETINDANGAN	YASIN SUKHA				21.000.000	647.400	421.000		21.647.400	P	24	15			
			SIMPANG BANTI	HELO BUKOK WINDA TANI				20.000.000	631.000	421.000		21.001.000	P	20	12			
			TABATIK	SILAM PERGAMU				22.000.000	788.400	528.400		22.811.600	P	23	21			
			VII KOTO SABAYU	-PEBATA				22.000.000	781.400	528.400		22.511.600	P	33	28			
			VII KOTO SABAYU	ANAKKA				22.000.000	694.700	463.100		22.457.100	P	20	11			
4	KUBANG		PEKUNJANG KEMAH	SESTU BUI				24.000.000	647.400	631.000		24.678.400	P	35	18			
			PEKUNJANG KEMAH	SIPAKALANG				21.000.000	631.000	421.000		21.621.000	P	20	12			
			PEKUNJANG KEMAH	KORPEKASI BUNDO KANDUNIS				21.000.000	631.000	421.000		21.621.000	P	19	10			
			PEKUNJANG KEMAH	JARISAN SIPILANG				20.000.000	631.000	421.000		21.001.000	P	20	8			
			PEKUNJANG KEMAH	PEKUNJANG KEMAH				20.000.000	631.000	421.000		21.001.000	P	105	40			
			PEKUNJANG KEMAH	JARISAN BUKALIMASORO				20.000.000	647.400	421.000		21.067.800	P	37	20			
			PEKUNJANG KEMAH	TALANG				22.000.000	647.400	421.000		22.667.400	P	12	43			
			PEKUNJANG KEMAH	SEHA TI				20.000.000	647.400	421.000		20.647.400	P	33	13			
			PEKUNJANG KEMAH	KOTO KOCOR				20.000.000	647.400	421.000		20.647.400	P	33	17			
			PEKUNJANG KEMAH	JUK E AIR				21.000.000	647.400	421.000		21.647.400	P	14	87			
Jumlah					30		712.600.000	22.000.000	15.000.000	750.000.000		1.647	677					
Jumlah					30		2.840.400.000	89.298.000	63.000.000	3.072.698.000		3.094	2.524					

Total Keahlian  
1. Jalan  
2. SPP  
TOTAL

Vol/Target/Temp/Target  
Faktor/Keompok  
775  
30 Keompok

Jumlah Data  
2.286.905,00  
750.000,00  
3.036.905,00









**ALOKASI PEMBIAYAAN KEGIATAN PNPM MANDIRI PEDESAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	KEORBATAN	NAGARI	JURONG	KEGIATAN	NAMA	PLIG	LESA	UNIT	DIMENSI	KEGUAHAN	OP TRK %	PEMBAYARAN			TOTAL	JBL AN (RUP P)	PERSERIKATAAN/STAS AN	LAKI	MELAKSI	PRAK	PRM	PRAK	PRM					
												OP TRK %	OP UPK/2%	SWALAYAT A														
1	PENDUKAAN	BANUA LEMEH	PULU	TK HONOR GURU DAN KORBET		16	7	1 unit		153.996.700	4.800.100	3.240.200		162.016.900	UP	41		31		30								
			GUNTING	MTR HONOR GURU DAN KORBET		16	7	1 unit		135.308.500	4.372.300	2.186.150		142.446.900	UP	43		51		24								
			Jumlah							219.219.200	9.172.400	5.426.350		304.446.200														
2	SABANAN PIRABAHAN	BANUA LEMEH	BANUA BAK	PENINGKATAN JALAN	JALAN	1500	8			314.290.000	9.924.800	6.814.800		330.019.600	UP	110		177		52								
					BANUA LEMEH ZETEK	810	8			154.225.000	4.873.400	3.248.300		162.447.200	UP	111		118		112								
					PENINGKATAN JALAN	1778	8			200.950.100	6.990.100	5.197.800		208.889.900	UP	206		205		157								
					BATU BALAH JALAN 1	1400	8			307.010.000	9.714.000	6.478.000		323.602.000	UP	106		172		157								
					KOTO TANGSI	1400	8			258.270.500	9.148.800	6.029.000		277.448.300	UP	100		100		86								
					KAPANG BAKANG 1	43	1	1 unit		183.520.700	5.790.100	3.844.000		193.154.800	UP	150		100		90								
					KOTO TANGSI 2	475	5			315.800.500	9.072.100	6.846.500		331.729.100	UP	450		200		90								
						Jumlah				1.848.281.800	54.384.600	38.911.200		1.941.659.600					1.941.659.600		1.403		1.001		718			
								KUBU BARU	TUNAS HARAPAN						40.000.000	1.200.200	842.800		42.003.000	P			14		4			
								BANUA SUNDAUNG 1	ME ALI						33.000.000	1.032.100	694.700		34.726.800	P			22		9			
								BANUA SUNDAUNG 2	ELINA USAHA 3						45.000.000	1.431.000	947.400		47.368.400	P			30		3			
								MAWAT							37.000.000	1.010.500	673.700		37.684.200	P			26		4			
			BIGALI							30.000.000	1.042.100	694.700		31.736.800	P			34		4								
			TOBER GONGGANG	ISARU JAWATO						10.000.000	600.000	400.000		10.600.000	P			9		3								
			PUKUK BULEK	MEKATI						16.000.000	505.300	338.800		16.842.100	P			10		2								
			TOBERA	MAKELAY HULU						37.000.000	1.168.400	778.800		38.947.200	P			19		5								
			BUNGO JALUANG	BUNGO JALUANG						28.000.000	788.200	528.300		29.316.500	P			13		4								
			QUAYUNG	VA A AIR						8.500.000	250.400	170.800		8.921.200	P			8		2								
			PEMAYUNG AIR	SOUREVILLE						28.000.000	814.200	548.200		29.472.400	P			22		5								
3	SIP#	SUNDAI NAMAUN	BATU BALAH 1	SANGEREK						42.000.000	376.000	242.000		42.618.000	P			14		4								
					SEKUN						27.000.000	659.000	429.000		27.689.000	P			19		4							
					MEKATI						21.000.000	603.200	447.800		21.650.000	P			9		3							
					BATU BALAH 4						20.000.000	631.500	471.500		20.652.000	P			11		3							
					KOTO TANGSI 4						20.000.000	631.500	471.500		20.652.000	P			11		3							
					KOTO TANGSI 5							18.000.000	528.400	378.000		18.906.400	P			10		3						
					KOTO TANGSI 6							18.000.000	528.400	378.000		18.906.400	P			10		3						
					KOTO TANGSI 7							18.000.000	528.400	378.000		18.906.400	P			10		3						
					KOTO TANGSI 8							18.000.000	528.400	378.000		18.906.400	P			10		3						
					KOTO TANGSI 9								18.000.000	528.400	378.000		18.906.400	P			10		3					
					KOTO TANGSI 10								18.000.000	528.400	378.000		18.906.400	P			10		3					
								MAWAT	ELINA USAHA 3					13.000.000	413.500	273.500		13.687.000	P			8		2				
			ALP GURI	MEKATI					23.000.000	683.200	442.200		23.725.400	P			12		2									
			KOTA TANGSI 1	ELINA USAHA 3					13.000.000	413.500	273.500		13.687.000	P			8		2									
			AMPANG GARDANG 7	WORONGGANG SAKOTO					13.000.000	413.500	273.500		13.687.000	P			8		2									
			BUNGO SUNDAUNG	WIRA KARAYA					39.000.000	1.203.000	802.000		40.005.000	P			22		4									
			TUNAS KARAYA	TUNAS KARAYA					10.000.000	598.400	378.900		10.977.300	P			10		3									
			MAWAT BICUCI	MAWAT BICUCI					12.000.000	379.000	252.500		12.651.500	P			10		3									
			INDRI MAJIL	INDRI MAJIL					16.000.000	505.300	335.800		16.842.100	P			11		3									
			AL SUTIRMAJIL	AL SUTIRMAJIL					18.000.000	528.400	378.000		18.906.400	P			10		3									
			MAJU BERSAMA	MAJU BERSAMA					45.000.000	1.421.000	947.400		46.368.400	P			15		5									
			KOTO TANGSI	BERENING					42.000.000	1.329.200	884.200		43.653.400	P			15		5									
			Jumlah						112.500.000	3.220.000	2.150.200		115.870.200				29											
			Jumlah						2.830.000.000	84.000.000	50.000.000		2.964.000.000															

TOTAL

1. P. 100

2. P. 100

3. P. 100

4. P. 100

5. P. 100

6. P. 100

7. P. 100

8. P. 100

9. P. 100

10. P. 100

11. P. 100

12. P. 100

13. P. 100

14. P. 100

15. P. 100

16. P. 100

17. P. 100

18. P. 100

19. P. 100

20. P. 100

21. P. 100

22. P. 100

23. P. 100

24. P. 100

25. P. 100

26. P. 100

27. P. 100

28. P. 100

29. P. 100

30. P. 100

31. P. 100

32. P. 100

33. P. 100

34. P. 100

35. P. 100

36. P. 100

37. P. 100

38. P. 100

39. P. 100

40. P. 100

41. P. 100

42. P. 100

43. P. 100

44. P. 100

45. P. 100

46. P. 100

47. P. 100

48. P. 100

49. P. 100

50. P. 100

51. P. 100

52. P. 100

53. P. 100

54. P. 100

55. P. 100

56. P. 100

57. P. 100

58. P. 100

59. P. 100

60. P. 100

61. P. 100

62. P. 100

63. P. 100

64. P. 100

65. P. 100

66. P. 100

67. P. 100

68. P. 100

69. P. 100

70. P. 100

71. P. 100

72. P. 100

73. P. 100

74. P. 100

75. P. 100

76. P. 100

77. P. 100

78. P. 100

79. P. 100

80. P. 100

81. P. 100

82. P. 100

83. P. 100

84. P. 100

85. P. 100

86. P. 100

87. P. 100

88. P. 100

89. P. 100

90. P. 100

91. P. 100

92. P. 100

93. P. 100

94. P. 100

95. P. 100

96. P. 100

97. P. 100

98. P. 100

99. P. 100

100. P. 100

ALOKASI PENYALURAN KEGIATAN PNPM MANDIRI PEDESAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2008

KECAMATAN - SILEKI		KEGIATAN		DIMEJAL		PENYALURAN			USULAN/PERNYATAAN/INDIKATOR						
NO	KEGIATAN	NAMA	JURONG	NO	LBR	UNIT	REKONSTRUKSI	OP-TRK-TRK	OP-UPK-TRK	STATUS	NO	INDIKATOR	REKONSTRUKSI	STATUS	
JENIS															
1	PENDIRIKAN	SUNGAI RIBEANG	JURONG	TANJUNG BUNDO	UNGGUNAN	21	1	60.000.000	2.196.000	1.797.000	88.694.000	P	25	32	76
				LONBAY	REHAB MDA	21	9	196.351.800	4.324.000	3.292.000	194.022.800	P	45	82	32
				TANAH TINGGAH	PERBANYUAN TR	25	18	222.575.700	7.236.000	4.900.700	245.275.400	P	33	38	31
				Jumlah				474.157.500	14.952.000	9.989.700	498.194.600		57	35	138
								197.722.000	8.034.000	4.028.300	211.812.700	UP	30	72	45
								194.495.000	2.295.800	2.198.000	196.994.800	UP	174	118	50
								324.504.300	13.244.300	6.002.300	341.811.400	P	146	104	70
								257.546.000	8.133.300	5.422.000	271.101.300	P	218	268	81
								314.997.000	9.948.000	6.000.000	311.352.000	UP	74	74	28
								10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	UP	53	71	39
2	SANGKAP PIRASAKAN	SUNGAI RIBEANG	JURONG	TANJUNG BUNDO	PAJANG LAMBEH	36	75	205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	113	154	25
				LONBAY	REHAB MDA	36	1	205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	53	71	39
				TANAH TINGGAH	PERBANYUAN PASAR	40	2	205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	25	40	15
				Jumlah				205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489		25	40	15
								205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	113	154	25
								205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	53	71	39
								205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	25	40	15
								205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	113	154	25
								205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	53	71	39
								205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	25	40	15
3	SPP	SUNGAI RIBEANG	JURONG	LIMBANG	SAUT	459	2	114.997.000	9.948.000	6.000.000	121.343.000	P	74	74	28
				KEKAMPUNG DALANG	KEKAMPUNG DALANG	3000	1	104.495.000	2.295.800	2.198.000	106.994.800	P	174	118	50
				KURAI	ULOH LING	1500	5	257.546.000	8.133.300	5.422.000	271.101.300	P	218	268	81
				SUNGAI	SOBIK	1000	5	314.997.000	9.948.000	6.000.000	311.352.000	UP	74	74	28
				TANJUNG BUNDO	KUBU TONGAH	36	75	205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	113	154	25
				SUNGAI	PAJANG LAMBEH	36	1	205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	53	71	39
				Jumlah				205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489		25	40	15
								205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	113	154	25
								205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	53	71	39
								205.917.489	10.273.200	6.664.000	242.438.489	UP	25	40	15
GRAND TOTAL							2.196.000	1.797.000	88.694.000		57	35	138		
							205.917.489	10.273.200	6.664.000		25	40	15		
							205.917.489	10.273.200	6.664.000		113	154	25		
							205.917.489	10.273.200	6.664.000		53	71	39		
							205.917.489	10.273.200	6.664.000		25	40	15		
							205.917.489	10.273.200	6.664.000		113	154	25		
							205.917.489	10.273.200	6.664.000		53	71	39		
							205.917.489	10.273.200	6.664.000		25	40	15		
							205.917.489	10.273.200	6.664.000		113	154	25		
							205.917.489	10.273.200	6.664.000		53	71	39		

Total Kegiatan  
1. Jarak 3/500  
2. Jarak 4500  
3. Jarak 235.816.700  
4. Jarak 496.754.800  
5. Jarak 312.438.400  
6. Jarak 382.105.300  
7. Jarak 1000000.000

V. J. D. / ...  
Takeykelomok  
Jumlah Data

1000000.000  
312.438.400  
382.105.300  
1000000.000





KECAMATAN HARAU

ALOKASI PENYALANGAN KEGIATAN PPM/MDR PEDERSAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2008

NO	KEGIATAN	NOMOR	JURONG	MUDA	DWISIA		PEMISYARAN				USDA	PENYALANGAN																																																																																																													
					PAU	LSR	MSD/PAU	OP TR 3%	OP TR 2%	SWAKA YA		TOTAL	LUAS (HA)	PERSEK	BTM																																																																																																										
1	PENGIRAN BATILAMAK	KOTO TUDU	PADANG BANTANG	PERBANDIHAN TK	1	1	225.000.000	7.422.200	4.944.000	4.280.000	26.400.000	P	30	43	10																																																																																																										
																SANTILAMAK	PERBANDIHAN MOK	1	1	225.000.000	7.422.200	4.944.000	4.280.000	26.400.000	P	30	43	10																																																																																													
																													Jumlah	2	1	450.000.000	14.844.400	9.824.000	49.800.000	52.800.000	72.800.000	P	60	86	20																																																																																
																																										2	SARAWA POKSARAWA	TARUM	PADANG BARU	1	6	515	175.877.000	5.648.500	3.786.900	18.291.700	P	292	303	45																																																																	
																																																									GURUN	GURUN	1	7	1560	181.237.000	6.012.600	3.841.700	18.000.500	P	100	100	28																																																				
																																																																						TABAYATANG	LURIK LIPATU	1	0	790	122.744.000	3.907.800	2.282.200	100.200.000	P	200	24	142																																							
																																																																																			9LOK BIO-BIO	KOTO PEMANICAH	1	6	1028	172.046.000	5.822.500	3.274.300	18.418.800	P	120	250	50																										
																																																																																																BATU BALANG	KOTO PEMANICAH	1	8	1000	234.000.000	8.984.400	5.878.000	286.841.400	P	10	80	35													
																																																																																																													HARAU	PADANG MABUKANG	1	9	1300	187.446.000	6.238.000	4.198.300	287.831.700	P	74	2458	21
PILUBANG	DALAN	1	7	800	125.017.700	3.547.900	2.022.000	111.267.600	P	220	150	45																																																																																																													
													Jumlah	10	1	49.800.000	148.401.000	30.846.100	1.796.096.200	11.025.700	18.947.000	P	1421	3.714	812																																																																																																
																										TARUM	PULUTAN	1	1	37.000.000	611.600	421.100	21.025.700	15.025.700	P	15	5																																																																																				
																																						KOTO TUDU	PADANG BANTANG	1	1	37.000.000	611.600	421.100	21.025.700	15.025.700	P	15	5																																																																								
																																																		GURUN	LURIK LANTAN	1	1	36.400.000	1.148.500	788.300	34.316.800	25.0	P	20	18																																																												
																																																														TABAYATANG	TABAYATANG	1	1	27.000.000	852.800	588.400	10.421.000	10	P	10	3																																																
																																																																										9LOK BIO-BIO	DOKIMO	1	1	22.000.000	694.700	482.200	22.651.800	22	P	22	1																																				
																																																																																						BUKIK LIMBUKIL	KOTO PENJALINGAN	1	1	27.340.000	1.180.400	787.000	30.343.400	15.781.500	P	41	15																								
																																																																																																		BATU BALANG	III ALIUR	1	1	40.285.800	1.271.500	847.700	42.984.700	12	P	12	5												
																																																																																																														HARAU	YASIN PADANG TUKAM	1	1	30.000.000	1.271.500	847.700	42.984.700	12	P	12	5
SANTILAMAK	KOTI SUKAMAU	1	1	20.000.000	631.600	421.100	21.852.700	27	P	27	15																																																																																																														
												AIR PUTEH	ASOYA	1	1	51.000.000	1.610.500	1.073.700	25.984.200	110	P	50	25																																																																																																		
																								Jumlah	20	1	194.708.200	32.098.200	14.274.800	724.842.800	3.200	494																																																																																									
																																	GRAND TOTAL	20	1	194.708.200	32.098.200	14.274.800	724.842.800	3.200	494																																																																																

1. Sarung  
 2. Sarung  
 3. Sarung  
 4. Sarung  
 5. Sarung  
 TOTAL 25 3.000.000.000



ALOKASI PENDAFTARAN KEGIATAN PPM MANCI/RI PEDESAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2008

NO	KEGIATAN	NAGARI	JURONG	NAMA	RUWISI			PEMBAYARAN			ISUJAN (L.P.P)	PERNYATAAN/REKOR				
					PSJ	IBR	JUNT	KEGIATAN	OP TRK 3%	OP UPR 2%		SWAKRYA	TOTAL	JARUHAN PUNAN	PEREB	MTM
1	KESEHATAN	AMPILUJI	KOTO	PUSKESDAN MCK	1152			104.095.800	5.335.700	3.557.900	-	117.993.400	P	293	410	208
					2506			200.807.200	8.241.000	5.194.000	-	214.242.200	LP	301	375	282
					3000			103.200.800	4.838.800	3.225.000	-	111.264.600	LP	168	212	53
								203.193.500	18.415.500	12.977.900	-	234.171.900				
								320.300.400	10.115.800	6.744.800	-	337.221.000	LP	180	195	66
								180.274.400	5.699.100	3.780.400	-	189.872.900	LP	123	175	84
								231.217.600	7.301.800	4.887.700	-	243.300.100	LP	830	870	306
								732.632.200	23.117.300	15.415.200	-	771.164.700	P	1.123	1.243	444
								130.584.800	4.123.700	2.748.200	-	137.456.700	P	400	429	308
								171.257.000	5.423.900	3.615.800	-	180.296.700	LP	282	350	211
2	PEKERJAAN	BUNT SEKUPPA	PAKAY SINYAN	PEMBJEDUDG MAM NAGARI	22			320.300.400	10.115.800	6.744.800	-	337.221.000	LP	180	195	66
					16			180.274.400	5.699.100	3.780.400	-	189.872.900	LP	123	175	84
					21			231.217.600	7.301.800	4.887.700	-	243.300.100	LP	830	870	306
								732.632.200	23.117.300	15.415.200	-	771.164.700				
								130.584.800	4.123.700	2.748.200	-	137.456.700	P	400	429	308
								171.257.000	5.423.900	3.615.800	-	180.296.700	LP	282	350	211
								212.347.800	6.705.700	4.470.400	-	223.524.000	LP	260	457	107
								306.090.800	9.729.300	6.486.200	-	322.306.300	P	701	801	476
								822.287.200	24.982.800	17.271.600	5.000.000	871.041.600	P	1.803	2.206	1.133
								16.000.000	473.000	315.700	-	16.788.700	P	22	22	11
3	SABARU/ PUSKESDAN	BATU PUYUNG	TALANG SANGANG	JUMILAH	1			45.000.000	1.421.000	847.000	-	47.268.000	P	40	30	
					1			30.000.000	947.000	631.500	-	31.578.500	P	8	8	
					1			70.000.000	2.210.500	1.473.800	-	73.684.300	P	50	21	
					1			30.000.000	947.000	631.500	-	31.578.500	P	43	30	
					1			48.000.000	1.615.700	1.010.800	-	50.526.500	P	36	30	
					1			18.000.000	473.800	315.700	-	18.789.500	P	35	30	
					1			60.000.000	1.894.700	1.261.700	-	63.157.400	P	31	24	
					1			60.000.000	1.894.700	1.261.700	-	63.157.400	P	31	24	
					1			32.000.000	1.010.500	673.000	-	33.684.500	P	30	30	
					1			21.000.000	683.100	462.100	-	22.105.200	P	24	12	
4	SPP	BUPOT SIKUPPA	PADANG BALUBING	PAGESH	1			16.000.000	473.000	315.700	-	16.788.700	P	22	22	11
					1			30.000.000	947.000	631.500	-	31.578.500	P	8	8	
					1			70.000.000	2.210.500	1.473.800	-	73.684.300	P	50	21	
					1			30.000.000	947.000	631.500	-	31.578.500	P	43	30	
					1			48.000.000	1.615.700	1.010.800	-	50.526.500	P	36	30	
					1			18.000.000	473.800	315.700	-	18.789.500	P	35	30	
					1			60.000.000	1.894.700	1.261.700	-	63.157.400	P	31	24	
					1			60.000.000	1.894.700	1.261.700	-	63.157.400	P	31	24	
					1			32.000.000	1.010.500	673.000	-	33.684.500	P	30	30	
					1			21.000.000	683.100	462.100	-	22.105.200	P	24	12	
5	STANJANG	KABIN	TANAH MINGGIAK	YAN JAYA	1			16.000.000	473.000	315.700	-	16.788.700	P	22	22	11
					1			30.000.000	947.000	631.500	-	31.578.500	P	8	8	
					1			70.000.000	2.210.500	1.473.800	-	73.684.300	P	50	21	
					1			30.000.000	947.000	631.500	-	31.578.500	P	43	30	
					1			48.000.000	1.615.700	1.010.800	-	50.526.500	P	36	30	
					1			18.000.000	473.800	315.700	-	18.789.500	P	35	30	
					1			60.000.000	1.894.700	1.261.700	-	63.157.400	P	31	24	
					1			60.000.000	1.894.700	1.261.700	-	63.157.400	P	31	24	
					1			32.000.000	1.010.500	673.000	-	33.684.500	P	30	30	
					1			21.000.000	683.100	462.100	-	22.105.200	P	24	12	
6	YALUBAN	KAPALU BUKIK	PANGH TANGKAIH	ULUNG TAWUNG	1			16.000.000	473.000	315.700	-	16.788.700	P	22	22	11
					1			30.000.000	947.000	631.500	-	31.578.500	P	8	8	
					1			70.000.000	2.210.500	1.473.800	-	73.684.300	P	50	21	
					1			30.000.000	947.000	631.500	-	31.578.500	P	43	30	
					1			48.000.000	1.615.700	1.010.800	-	50.526.500	P	36	30	
					1			18.000.000	473.800	315.700	-	18.789.500	P	35	30	
					1			60.000.000	1.894.700	1.261.700	-	63.157.400	P	31	24	
					1			60.000.000	1.894.700	1.261.700	-	63.157.400	P	31	24	
					1			32.000.000	1.010.500	673.000	-	33.684.500	P	30	30	
					1			21.000.000	683.100	462.100	-	22.105.200	P	24	12	
7	DAUN PANJANG	KUBANG BAKAU	SANTO SAKATO	PINDOLAN HOCOK	1			25.000.000	789.400	529.500	-	26.318.900	P	20	16	
					1			30.000.000	947.000	631.500	-	31.578.500	P	11	8	
					20			712.000.000	22.483.000	14.980.200	-	749.463.200	P	11	8	
								712.000.000	22.483.000	14.980.200	-	749.463.200				
								25.000.000	789.400	529.500	-	26.318.900	P	20	16	
								30.000.000	947.000	631.500	-	31.578.500	P	11	8	
								712.000.000	22.483.000	14.980.200	-	749.463.200	P	11	8	
								712.000.000	22.483.000	14.980.200	-	749.463.200				
								25.000.000	789.400	529.500	-	26.318.900	P	20	16	
								30.000.000	947.000	631.500	-	31.578.500	P	11	8	

1. Jarak  
 2. Jarak  
 3. Jarak  
 4. Jarak  
 5. Jarak  
 6. Jarak  
 TOTAL

696.278.500  
 180.297.400  
 719.247.300  
 611.854.400  
 431.593.700  
 307.223.400  
 3.000.000.000



